

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : II/MPR/1993
TENTANG
GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa menjadi konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara yang merupakan rangkaian program-program pembangunan di segala bidang yang berlangsung secara terus-menerus, untuk dapat mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. bahwa Garis-garis Besar Haluan Negara itu harus memberikan kejelasan arah bagi perjuangan negara dan rakyat Indonesia yang dewasa ini sedang membangun, agar dengan demikian dapat mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendatang dalam rangka kelanjutannya yang berjangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia;
 - c. bahwa pokok-pokok penyusunan dan penguangannya haruslah mampu memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan, sehingga Garis-garis Besar Haluan Negara perlu disusun dan dituangkan dalam satu naskah secara sistematis, dalam kebulatan hubungan yang menyeluruh.
 - d. bahwa Garis-garis Besar Haluan Negara 1993-1998 yang didalamnya mengandung pula Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam mempunyai arti yang khusus dan strategis, karena merupakan tahapan pertama Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun Kedua, dan sekaligus merintis serta mempersiapkan

proses tinggal landas pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila;

- e. bahwa oleh karena itu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia perlu menetapkan Ketetapan yang mengatur Garis-garis Besar Haluan Negara yang didasarkan atas aspirasi dan kepribadian Bangsa Indonesia demi penghayatan dan Pengamalan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengingat :

1. Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1993 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1988;
3. Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Memperhatikan:

1. Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/1992 tentang penyelenggaraan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II bulan Maret 1993;
2. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1993 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Putusan Rapat Paripurna ke-9 tanggal 9 Maret 1993 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1993.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA.

Pasal 1

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh maka sistematika Garis-garis Besar Haluan Negara disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PEMBANGUNAN NASIONAL

BAB III PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA

BAB IV PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM

BAB V PELAKSANAAN

BAB VI PENUTUP

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, terdapat dalam naskah Garis-garis Besar Haluan Negara yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

Pasal 3

Dengan adanya Ketetapan ini, materi yang belum tertampung dalam dan tidak bertentangan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara ini, dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mengemban dan melaksanakan Ketetapan ini dengan bagian Ketetapan yang berupa Garis-garis Besar Haluan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ketetapan ini sesuai dengan bunyi dan makna sumpah jabatannya.

Pasal 5

Ketetapan ini disahkan pada tanggal ditetapkan dan mulai berlaku pada saat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 4 Ketetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Maret 1993

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

ttd

H. Wahono

WAKIL KETUA,

ttd

Soetedjo

WAKIL KETUA,

ttd

Prof. Dr. John Ario Katili

WAKIL KETUA,

ttd

H. Ismail Hasan Metareum, S.H.

WAKIL KETUA,

ttd

Soerjadi

WAKIL KETUA,

ttd

Prof. Dr. H.A. Amiruddin

NASKAH GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA

BAB I

PENDAHULUAN

A. ANGGARAN

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaannya, dengan kesadaran dan keteguhan pada falsafah Pancasila, telah berhasil menyelesaikan Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama yang berakhir pada Pembangunan Lima Tahun Kelima dengan mencapai kemajuan di berbagai segi kehidupan rakyat dan selanjutnya melaksanakan Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua, yang diawali dengan Pembangunan Lima Tahun Keenam.

Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua merupakan proses kelanjutan, peningkatan, perluasan, dan pembaharuan dari Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama.

Dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua, bangsa Indonesia memasuki proses tinggal landas menuju terwujudnya masyarakat yang maju, adil, makmur, dan mandiri berdasarkan Pancasila. Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua merupakan masa kebangkitan nasional kedua bagi bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dengan makin mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta makin menggedorinya semangat kebangsaan untuk membangun bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan kehidupan yang seajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

B. PENGERTIAN

Garis-garis Besar Haluan Negara adalah haluan negara tentang pembangunan nasional dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat setiap lima tahun.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Garis-garis Besar Haluan Negara ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaannya dengan tujuan mewujudkan kondisi yang diinginkan, baik dalam jangka sedang 5 tahun maupun dalam jangka panjang 25 tahun, sehingga secara bertahap cita-cita bangsa Indonesia seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat dicapai, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

D. LANDASAN

Garis-garis Besar Haluan Negara disusun dengan Pancasila sebagai landasan idiil, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

E. RUANG LINGKUP

Untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dan diperjuangkan serta bagaimana mencapainya, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka sedang, Garis-garis Besar Haluan Negara yang materinya meliputi Pembangunan Nasional, Pembangunan Jangka Panjang Kedua, Pembangunan Lima Tahun Keenam, dan Pelaksanaan disusun dalam sistematika secara berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : PEMBANGUNAN NASIONAL
- BAB III : PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA
- BAB IV : PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM
- BAB V : PELAKSANAAN
- BAB VI : PENUTUP

BAB II

A. MAKNA DAN HAKIKAT

PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Keseluruhan semangat, arah, dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan semua sila Pancasila serta serasi dan sebagai kesatuan yang utuh, yang meliputi :

1. Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang antara lain mencakup tanggung jawab bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus-menerus dan bersama-sama meletakkan landasan spiritual, moral, dan etik yang kukuh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila
2. Pengamalan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang antara lain mencakup peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan, dan ketidakadilan dari muka bumi.
3. Pengamalan Sila Persatuan Indonesia, yang antara lain mencakup peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
4. Pengamalan Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yang antara lain mencakup upaya makin menumbuhkan dan mengembangkan sistem politik Demokrasi Pancasila yang makin mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis, mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab politik warga negara, serta menggalakkan rakyat dalam proses politik.
5. Pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-

hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Berdasarkan pokok pikiran di atas, maka hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat, serta harus benar-benar dapat dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan, dengan senantiasa harus merupakan perwujudan Wawasan Nusantara serta memperkuat Ketahanan Nasional, yang diselenggarakan dengan membangun bidang-bidang pembangunan diselenggarakan dengan sasaran jangka panjang yang ingin diwujudkan. Pembangunan nasional merupakan mencerminkan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa terarah, dan rasa keadilan serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab bagi seluruh rakyat. Pembangunan nasional menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia, dan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya.

Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional diselenggarakan secara bertahap dalam jangka panjang 25 tahunan dan jangka sedang 5 tahunan, dengan mendayagunakan seluruh sumber daya nasional untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

B. TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

C. ASAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Asas pembangunan nasional adalah prinsip pokok yang harus ditetapkan dan dipegang teguh dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Asas-asas tersebut adalah :

1. Asas Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etik dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila
2. Asas Manfaat : bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan pribadi warga negara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
3. Asas Demokrasi Pancasila: bahwa upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong-royong, persatuan dan keatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Asas Adil dan Merata: bahwa pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan diseluruh wilayah tanah air di mana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara.
5. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam Perikehidupan: bahwa dalam pembangunan nasional harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara

- kepentingan dunia dan akhirat, materiil dan spiiitual, jiwa dan raga, individu, masyarakat dan negara, pusat dan daerah serta antardaerah, kepentingan perikehidupan darat, laut, udara, dan dirgantara serta kepentingan nasional dan internasional.
6. Asas Hukum; bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional setiap warga negara dan penyelenggara negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.
 7. Asas Kemandirian: bahwa pembangunan nasional berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersandikan kepada kepribadian bangsa.
 8. Asas Kejuangan bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, penyelenggara negara dan masyarakat harus memiliki mental, tekad, jiwa, dan semangat pengabdian serta ketaatan dan disiplin yang tinggi dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.
 9. Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: bahwa agar pembangunan nasional dapat memberikan kesejahteraan rakyat lahir batin yang setinggi-tingginya, penyelenggaraannya perlu menerapkan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendorong peminatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara saksama dan bertanggung jawab dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

D. MODAL DASAR DAN FAKTOR DOMINAN

1. Modal Dasar

Modal dasar pembangunan nasional adalah keseluruhan sumber kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional, yaitu :

- a. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia
- b. Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa
- c. Wilayah nusantara yang luas dan berkedudukan di khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan kondisi alamiahnya yang memiliki berbagai keuntungan komparatif.
- d. Kekayaan alam yang beraneka ragam dan terdapat di darat, laut, udara, dan dirgantara yang dapat didayagunana secara bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat.

- e. Penduduk yang besar jumlahnya sebagai sumber daya manusia yang potensial dan produktif bagi pembangunan nasional.
 - f. Rohaniah dan mental, yaitu keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan tenaga penggerak yang tak ternilai harganya bagi pengisian aspirasi bangsa. Juga kepercayaan dan keyakinan bangsa atas kebenaran falsafah Pancasila sebagai satu-kesatuan asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, merupakan modal sikap mental yang dapat membawa bangsa menuju cita-citanya.
 - g. Budaya bangsa Indonesia yang dinamis yang telah berkembang sepanjang sejarah bangsa yang bercirikan kebhinekaan dan keekaan bangsa.
 - h. Potensi dan kekuatan efektif bangsa, yakni segala sesuatu yang bersifat potensi dan produktif yang telah menjadi milik bangsa, dan yang tumbuh dari rakyat termasuk kekuatan sosial politik antara lain partai politik dan golongan karya.
 - i. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuasaan pertahanan keamanan dan kekuasaan sosial politik yang tumbuh dari rakyat dan bersama rakyat menegakkan serta mengisi kemerdekaan bangsa dan negara.
2. Faktor Dominan
- Faktor dominan adalah segala sesuatu yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pembangunan agar memperlancar pencapaian sasaran pembangunan nasional, meliputi:
- a. Kependudukan dan sosial budaya termasuk pergeseran nilai dan perkembangan aspirasi rakyat yang dinamis.
 - b. Wilayah yang bercirikan kepulauan dan kelautan dengan lingkungan dan alam tropiknya.
 - c. Sumber daya alam yang beraneka ragam dan tidak merata penyebarannya, termasuk flora dan fauna.
 - d. Kualitas manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia dan penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. Disiplin nasional yang merupakan perwujudan kepatuhan dan ketaatan kepada hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
 - f. Manajemen nasional sebagai mekanisme penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

- g. Perkembangan regional dan global serta tatanan internasional yang selalu berubah secara dinamis.
- h. Kemungkinan pengembangan.

E. WAWASAN NUSANTARA

Wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional adalah Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mencakup.

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, dalam arti :
 - a. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan mata seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa
 - b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
 - c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
 - d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya
 - e. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - f. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.
 - g. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas dan aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.

2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi, dalam arti :
 - a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
 - b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
 - c. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial dan Budaya dalam arti :
 - a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perkehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.
 - b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.
4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan, dalam arti :
 - a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
 - b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

F. KETAHANAN NASIONAL

1. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam, maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan

- keterpaduan antara segala aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh.
2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong pembangunan nasional.
 3. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan.
 - a. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
 - b. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif.
 - c. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
 - d. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.
 - e. Ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung

kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

G. KAJIDAH PENUNTUN

Penyelenggaraan pembangunan nasional mengacu pada kaidah penuntun yang merupakan pedoman bagi penentuan kebijaksanaan pembangunan nasional agar senantiasa sesuai dengan landasan, makna dan hakikat, asas, wawasan, dan tujuannya yang merupakan pengamalan semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh.

1. Pembangunan ekonomi harus selalu mengarah kepada mantapnya sistem ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi yang harus dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan yang memiliki ciri sebagai berikut :
 - a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
 - b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 - c. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - d. Sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga perwakilan rakyat, dan pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula.
 - e. Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
 - f. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 - g. Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
 - h. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

Dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia.
 - b. Sistem etatisme dalam arti bahwa negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
 - c. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.
2. Pembangunan kesejahteraan rakyat harus senantiasa memperhatikan bahwa setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan yang layak serta berkewajiban ikut serta dalam upaya mewujudkan kemakmuran rakyat.
 3. Pembinaan dan pemantapan kepribadian bangsa senantiasa memperhatikan pelestarian nilai luhur budaya bangsa yang bersumber pada kebhinekaan budaya daerah dengan tidak menutup diri terhadap masuknya nilai positif budaya bangsa lain untuk mewujudkan dan mengembangkan kemampuan dan jati diri serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pembangunan harus dapat meningkatkan kecerdasan dan nilai tambah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mempercepat proses pembangunan dengan mengindahkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat.
 4. Kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur bangsa merupakan usaha bersama untuk menciptakan landasan spiritual, moral, dan etik bagi pembangunan untuk mewujudkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya dan kualitas masyarakat Indonesia seluruhnya dengan menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, meningkatkan peran serta umat beragama dalam pembangunan serta memantapkan kerukunan antarumat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa

5. Pandangan integralistik bangsa Indonesia dan paham kekeluargaan yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa yang dijadikan kesepakatan dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 harus dijadikan paham kebangsaan Indonesia untuk makin memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu adanya golongan dalam masyarakat Indonesia dan hak asasi perseorangan melalui kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat di depan umum diakui keberadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. MPR dan DPR sebagai lembaga permusyawaratan/perwakilan yang anggotanya dipilih dan diangkat, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan negara Indonesia.
7. Demokrasi politik berdasarkan Pancasila pada hakikatnya adalah wujud kedaulatan di tangan rakyat yang diselenggarakan melalui permusyawaratan/perwakilan, berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa dalam penyelesaian masalah nasional yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sejauh mungkin ditempuh jalan musyawarah untuk mencapai mufakat bagi kepentingan rakyat. Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia tidak mengenal pemisahan kekuasaan secara murni, tetapi menganut pembagian kekuasaan berdasarkan paham kekeluargaan. Dalam Demokrasi Pancasila yang menganut paham kekeluargaan tidak dikenal bentuk-bentuk oposisi, diktatur mayoritas, dan tirani minoritas. Hubungan antara lembaga pemerintahan dan antar lembaga pemerintah dengan lembaga negara lainnya senantiasa dilandasi semangat kebersamaan, keterpaduan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Hukum nasional sebagai sarana ketertiban dan kesejahteraan masyarakat yang berintikan keadilan dan kebenaran, harus dapat berperan mengayomi masyarakat serta mengabdikan pada kepentingan nasional.
8. Untuk memperkukuh negara kesatuan dan memperlancar penyelenggaraan pembangunan nasional, pelaksanaan pemerintahan di daerah didasarkan pada otonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab serta disesuaikan dengan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Pelaksanaan pemerintahan otonomi di daerah hendaknya memacu peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh tanah air dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara dan memperkukuh Ketahanan nasional.
9. Hubungan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, baik politik, ekonomi sosial budaya maupun pertahanan keamanan, didasarkan pada hubungan bebas aktif

yang diabdikan untuk kepentingan nasional dan ditujukan pada tercapainya tatanan kehidupan antar bangsa yang merdeka, tertib, damai, adil, dan sejahtera.

10. Penyelenggaraan pertahanan keamanan negara dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta yang bersifat kesemestaan, kerakyatan, dan kewilayahan serta dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban bela negara bagi setiap warga negara dengan mendayagunakannya secara optimal dan terpadu. Pembangunan ABRI sebagai prajurit pejuang dan pejuang prajurit yang berfungsi sebagai kekuasaan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik diabdikan bagi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA

A. UMUM

1. Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah menghasilkan kemajuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan telah meletakkan landasan yang cukup kuat bagi bangsa Indonesia untuk memasuki Pembangunan Jangka Panjang Kedua sebagai awal bagi kebangkitan nasional kedua dan proses tinggal landas.
2. Dalam periode Pembangunan Jangka Panjang Kedua masyarakat Indonesia akan menghadapi banyak perubahan yang mengandung peluang dan kendala sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam Pembangunan Jangka Panjang Pertama, kemajuan pesat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia yang mengakibatkan kegiatan pembangunan nasional makin terkait dengan perkembangan internasional.
3. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan dapat dicapai berkat peranserta rakyat secara menyeluruh, mantapnya pemerintahan dan kepemimpinan nasional yang didukung oleh stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang meliputi stabilitas ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang tercermin dalam terwujudnya Ketahanan Nasional yang tangguh.
4. Pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah banyak mencapai kemajuan dan telah berhasil meningkatkan taraf hidup serta harkat dan martabat rakyat Indonesia. Sasaran pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah dapat diwujudkan, yaitu telah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan struktur ekonomi yang makin seimbang antara industri dan pertanian. Keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi telah memberikan dukungan dan dorongan terhadap pembangunan di bidang-bidang lainnya sehingga terciptalah landasan yang mantap bagi bangsa Indonesia lainnya sehingga tahap pembangunan berikutnya. Meskipun telah tercapai banyak kemajuan, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan yang masih perlu dilanjutkan upaya mengatasinya pada Pembangunan Jangka Panjang Kedua.
5. Pertumbuhan di berbagai sektor ekonomi, terutama di sektor pertanian, antara lain telah mencapai swasembada pangan dan di sektor industri telah mulai menjadi tumpuan ekonomi menggantikan sektor yang menghasilkan minyak dan gas bumi, didukung oleh berbagai kebijaksanaan ekonomi dan moneter

yang telah menciptakan kondisi stabilitas ekonomi serta memungkinkan memanfaatkan peluang yang tercipta di pasar dunia dan di pasar dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi telah pula memungkinkan terjadinya pemerataan pembangunan sehingga rakyat telah menikmati hasil-hasilnya serta lebih aktif terlibat dalam upaya pembangunan. Dalam Pembangunan Jangka Panjang Pertama pembangunan telah menyebar di seluruh penjuru tanah air dan jumlah rakyat yang hidup di dalam kemiskinan telah sangat banyak berkurang. Upaya untuk lebih pemeratakan pembangunan serta menghilangkan kemiskinan dan keterbelakangan masih perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Dalam rangka ini maka penataan peran ketiga pelaku ekonomi dalam ekonomi nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 masih perlu terus dilanjutkan, terutama peranan koperasi. Perhatian secara khusus perlu diberikan kepada pembinaan usaha golongan masyarakat yang berkemampuan lemah serta upaya untuk menciptakan lapangan kerja guna menampung angkatan kerja yang terus meningkat.

6. Dalam Pembangunan Jangka Panjang Pertama kesejahteraan rakyat telah makin meningkat, tercermin dalam peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia. Pendidikan telah diselenggarakan merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, antara lain dengan wajib belajar tingkat pendidikan dasar bagi setiap warga negara. Pendidikan nasional, di samping menghasilkan kader pembangunan, juga telah makin memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Upaya pembangunan pendidikan masih perlu terus dilanjutkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pelayanan kesehatan telah pula meningkat dan telah mampu menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan di bidang kesehatan serta keluarga berencana telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup dan telah menekan laju pertumbuhan penduduk yang didukung oleh perumahan dan permukiman yang layak. Pembangunan kesehatan masih perlu terus dilanjutkan terutama guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta jangkauan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan yang hidup di daerah terpencil. Laju pertumbuhan penduduk masih perlu terus ditekan sehingga jumlah penduduk mencapai tingkat keseimbangan. Pembangunan perumahan dan permukiman yang layak masih perlu dilanjutkan.
7. Kerukunan hidup antar-dan antara umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, peranserta umat beragama dalam pembangunan, dan kualitas kehidupan beragama makin meningkat, tata nilai dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara makin mantap serta pengaruh nilai baru yang positif menumbuhkan dan memperkuat sikap dan perilaku manusia Indonesia yang makin maju, mandiri, dan berkepribadian luhur.

8. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berhasil memajukan tingkat kecerdasan masyarakat, mengembangkan kemampuan bangsa serta ikut mendorong proses pembaharuan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin pesat, persaingan antar bangsa yang makin ketat, serta dampak arus globalisasi yang makin meluas, menuntut pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih tepat, cepat, dan cermat serta bertanggung jawab agar mampu memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat yang mandiri, maju, dan sejahtera.
9. Pembangunan hukum dan perundang-undangan telah menciptakan sistem hukum dan produk hukum yang mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi kegiatan masyarakat dan pembangunan. Kesadaran hukum yang makin meningkat dan makin lajunya pembangunan menuntut terbentuknya sistem hukum nasional dan produk hukum yang mendukung dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan hukum selanjutnya masih perlu memperhatikan peningkatan permasayakatan hukum, peningkatan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen, peningkatan aparat hukum yang berkualitas dan bertanggung jawab, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
10. Keberhasilan pembangunan politik telah makin memantapkan tatanan kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan demokrasi Pancasila yang mendorong makin berfungsi dan berperannya lembaga politik, mantapnya perkembangan organisasi kekuasaan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan, serta mendorong meningkatnya kesadaran politik masyarakat. Organisasi kekuatan sosial politik makin dituntut untuk lebih berkualitas dan mandiri sehingga lebih berperan dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat makin dituntut untuk lebih terbuka dan peka dalam menanggapi dinamika aspirasi masyarakat. Peranan penerangan, komunikasi, dan media massa dalam pembangunan nasional makin menumbuhkan peranserta masyarakat. Keterbukaan yang bertanggung jawab telah makin meningkat dan berkembang, sementara arus komunikasi timbul dan penyaluran aspirasi politik masih memerlukan perhatian.
11. Pembangunan daerah sebagai bagian integral pembangunan nasional telah makin mendorong dan meningkatkan stabilitas, pemerataan, pertumbuhan dan pengembangan daerah serta peranserta dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan upaya pembangunan daerah harus senantiasa didasarkan pada otonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dalam rangka lebih meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan, dan mendorong pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya di seluruh tanah air.

12. Perkembangan penyelenggaraan hubungan luar negeri berdasarkan prinsip politik bebas aktif dan diabdikan bagi kepentingan nasional, pada tingkat regional cenderung makin positif. Namun, dalam menghadapi tantangan pada tingkat global masih perlu terus ditingkatkan kewaspadaan, keteguhan sikap, dan kemandirian ideologi dalam memelihara Ketahanan Nasional dan menghadapi tantangan karena adanya kecenderungan dan gejala dominasi negara adikuasa yang karena memaksakan kehendaknya yang berdampak negatif bagi kepentingan negara-negara berkembang.
13. Pembangunan pertahanan keamanan negara selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah berhasil meningkatkan kesadaran bela negara dan mengembangkan kemampuan bangsa untuk mengatasi segala tantangan yang dihadapi bangsa dan negara, yang tercermin dalam terpeliharanya stabilitas nasional yang dinamis, sehingga pembangunan nasional dapat berlangsung dengan lancar dan aman. Kebutuhan personel, alat utama, serta sarana dan prasarana pendukungnya, baik jumlah maupun kualitas, masih perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan pengamanan pembangunan mengingat luas, posisi wilayah negara, dan jumlah penduduk yang besar, serta kemungkinan tantangan global yang makin meningkat.

B. TUJUAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA

Pembangunan Jangka Panjang Kedua bertujuan mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

C. SASARAN UMUM PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA

Sasaran umum Pembangunan Jangka Panjang Kedua adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkeseimbangan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam dan lingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa

D. TITIK BERAT PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA

Titik berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua diletakkan pada bidang ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama,

selaras, dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

E. SASARAN BIDAANG PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA

Pembangunan nasional di segala bidang harus senantiasa makin mewujudkan pemantapan Wawasan Nusantara dan memperkuat Ketahanan Nasional. Perwujudannya melalui pembangunan empat aspek kehidupan bangsa yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, sedangkan bidang-bidang pembangunan disesuaikan dengan Sasaran Umum Pembangunan Jangka Panjang Kedua.

Upaya pencapaian Sasaran Umum Pembangunan Jangka Panjang Kedua diselenggarakan melalui tujuh bidang pembangunan, yaitu bidang ekonomi; bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan; bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; bidang hukum; bidang politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi, dan media massa; serta bidang pertahanan keamanan.

1. Sasaran Bidang Ekonomi

Terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata, pertumbuhan yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang mantap, bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh, koperasi yang sehat dan kuat, serta perdagangan yang maju dengan sistem distribusi yang mantap, didorong oleh kemitraan usaha yang kukuh antara badan usaha koperasi, negara, dan swasta serta pendayagunaan sumber daya alam yang optimal yang kesemuanya didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, maju produktif, dan profesional, iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Sasaran Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan.

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang makin sejahtera lahir dan batin secara adil dan merata, terselenggaranya pendidikan nasional dan pelayanan kesehatan yang makin bermutu dan merata yang mampu mewujudkan manusia yang beriman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, tangguh, sehat, cerdas, patriotik, berdisiplin, kreatif, produktif dan profesional; makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat manusia Indonesia, dan memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa.

3. Sasaran Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Terciptanya suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang penuh keimanan dan ketakwaan, penuh kerukunan yang dinamis antar-dan antara umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara bersama-sama makin memperkuat landasan spiritual, moral, dan etik bagi pembangunan nasional, yang tercermin dalam suasana kehidupan yang harmonis, serta kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila

4. Sasaran Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Tercapainya kemampuan nasional dalam pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban, serta ketangguhan dan daya saing bangsa yang diperlukan untuk memacu pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menuju masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri serta sejahtera, yang dilandasi nilai-nilai spiritual, moral, dan didasarkan nilai luhur budaya bangsa serta nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

5. Sasaran Bidang Hukum

Terbentuknya dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparat hukum, sarana, dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum.

6. Sasaran Bidang Politik, Aparatur Negara, Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa

Tercipta dan berfungsinya tatanan kehidupan politik yang konstitusional berdasarkan demokrasi Pancasila yang mantap dan dinamis, dengan kualitas manusia dan masyarakat yang memiliki kesadaran dan etika politik yang tinggi serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan budaya politik Pancasila dalam semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang berwawasan Nusantara; makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab; hubungan luar negeri yang dilandasi prinsip politik luar negeri bebas aktif yang makin mampu menunjang kepentingan nasional serta makin mampu mendukung terwujudnya tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; aparaturnegara yang bersih, bertanggung jawab, penuh pengabdian dan profesional; diperkuat oleh penyelenggaraan penerangan, komunikasi, dan media massa yang mampu menggugah peranserta rakyat dan berfungsi positif terhadap upaya mengoptimalkan dan pemeratakan manfaat pembangunan di segala

bidang, memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan kualitas demokrasi.

7. Sasaran Bidang Pertahanan Keamanan

Terwujudnya kekuatan dan kemampuan pertahanan keamanan negara dengan daya tangkal yang tangguh berdasarkan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, yang ditandai oleh kemampuan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara yang andal, kesadaran bela negara yang tinggi, pelaksanaan Dwifungsi ABRI dan kemandirian ABRI-rakyat yang makin mantap dan dinamis, didukung sarana dan prasarana, industri strategis yang andal sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap.

F. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA

1. Pembangunan Jangka Panjang Kedua diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia agar makin maju, mandiri, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua, rasa cinta tanah air yang melandasi kesadaran kebangsaan, semangat pengabdian, dan tekad untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik harus terus dibangkitkan dan dipelihara sehingga berkembang menjadi sikap mental dan sikap hidup masyarakat yang mampu mendorong percepatan proses pembangunan di segala aspek kehidupan bangsa guna memperkokuh persatuan dan kesatuan bangsa demi terwujudnya tujuan nasional.
2. Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Kedua diarahkan untuk tetap bertumpu kepada Triologi Pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang-bidang lain sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dengan lebih memberi peran kepada rakyat untuk berperanserta aktif dalam pembangunan, dijiwai semangat kekeluargaan, didukung oleh stabilitas nasional yang mantap dan dinamis melalui pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Melalui upaya pembangunan, potensi sumber daya nasional diarahkan menjadi kekuatan ekonomi, sosial budaya politik, dan pertahanan keamanan yang nyata, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas yang memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan manajemen. Sumber daya manusia, termasuk pemuda aspirasi, peranan, dan kepentingannya ke dalam gerak pembangunan bangsa melalui peranserta aktif dalam seluruh kegiatan pembangunan.

4. Pembangunan ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan andal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil, dan merata. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Dalam rangka ini perlu lebih diberikan perhatian kepada usaha untuk membina dan melindungi usaha kecil dan tradisional serta golongan ekonomi lemah pada umumnya. Pembangunan koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat, dan mandiri serta sebagai sokoguru perekonomian nasional, yang merupakan wadah untuk menggalang kemampuan ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional, sehingga mampu berperan utama dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan itu, perlu ditingkatkan dengan sungguh-sungguh penataan koperasi, usaha negara, dan usaha swasta agar masing-masing melaksanakan fungsi dan peranannya dalam perekonomian nasional yang didasarkan pada demokrasi ekonomi berlandaskan Pancasila. Pembangunan ekonomi secara bertahap harus ditata dalam peraturan perundang-undangan.
5. Pertumbuhan ekonomi harus didukung oleh peningkatan produktivitas dan efisiensi serta sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan industri dan pertanian serta sektor produktif lainnya ditingkatkan dan diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pembangunan industri terus ditingkatkan dan diarahkan agar sektor industri makin menjadi penggerak utama ekonomi dan diarahkan agar sektor industri makin menjadi penggerak utama ekonomi yang efisien, berdaya saing tinggi, mempunyai struktur yang makin kukuh dengan pola produksi yang berkembang dari barang-barang yang mengandalkan pada tenaga kerja yang produktif dan sumber daya alam yang melimpah menjadi barang yang makin bermutu, bernilai tambah yang tinggi, dan padat keterampilan. Sektor pertanian terus ditingkatkan agar mampu menghasilkan pangan dan bahan mentah yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan rakyat, meningkatkan daya beli rakyat, dan mampu melanjutkan proses industrialisasi, serta makin terkait dan terpadu dengan sektor industri dan jasa menuju terbentuknya jaringan kegiatan agroindustri dan agribisnis yang produktif.
6. Jasa, termasuk pelayanan infrastruktur dan jasa keuangan, terus dikembangkan menuju terciptanya jaringan informasi, perhubungan, perdagangan, dan pelayanan keuangan yang andal, efisien, mampu mendukung industrialisasi, dan upaya pemerataan. Perdagangan harus mampu menunjang peningkatan produksi dan memperlancar distribusi sehingga mampu mendukung upaya pemerataan, serta memperkuat daya saing melalui pengembangan kemampuan untuk memperkirakan dan

memanfaatkan pengaruh perkembangan ekonomi dunia. Perhubungan harus diselenggarakan secara efisien sehingga makin memperlancar arus lalu lintas orang, barang, dan jasa. Pembangunan perhubungan yang meliputi transportasi, pos, dan telekomunikasi harus diarahkan agar makin menunjang pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional serta upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan, dengan menembus isolasi dan keterbelakangan daerah terpencil sehingga akan makin memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara dan memperkuat Ketahanan Nasional. Pembangunan perhubungan juga akan meningkatkan pengembangan kepariwisataan yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Pembangunan kepariwisataan harus lebih ditingkatkan dan diarahkan untuk meningkatkan penerimaan devisa, pendapatan daerah dan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa, dengan memanfaatkan keindahan dan kekayaan alam Indonesia yang beraneka ragam.

7. Pendayagunaan sumber daya alam sebagai pokok pokok kemakmuran rakyat dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan. Tata ruang nasional yang berwawasan nusantara dijadikan pedoman bagi perencanaan pembangunan agar penataan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara aman, tertib, efisien, dan efektif.
8. Pembangunan ekonomi yang mengelola kekayaan bumi Indonesia, seperti kehutanan dan pertambangan, harus senantiasa memperhatikan bahwa pengelolaan sumber daya alam, di samping untuk memberi kemanfaatan masa kini, juga harus menjamin kehidupan masa depan. Sumber daya alam yang terbarukan harus dikelola sedemikian rupa sehingga fungsinya dapat selalu terpelihara sepanjang masa. Oleh karena itu, sumber daya alam harus dijaga agar kemampuannya untuk memperbaharui diri selalu terpelihara. Sumber daya alam yang tidak terbarukan harus digunakan sehemat mungkin dan diusahakan habisnya selama mungkin. Pembangunan kehutanan harus makin diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan hutan bagi industri dalam negeri sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya. Pembangunan pertambangan diarahkan pula untuk menghasilkan bahan tambang sebagai bahan baku bagi industri dalam negeri sehingga dapat menghasilkan nilai tambah yang setinggi-tingginya dan menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya. Pembangunan sektor ini juga harus membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wilayah, pembangunan daerah, dan peningkatan taraf hidup rakyat. Energi merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh kehidupan dan bagi

pembangunan, terutama untuk mendukung proses industrialisasi. Pembangunan energi harus diarahkan untuk menjamin kemandirian dalam energi, dan untuk itu perlu ditingkatkan upaya untuk mengembangkan dan memelihara cadangan sumber energi, mengankaragamkan penggunaan berbagai sumber energi dan menghemat pemakaiannya, serta lebih mengembangkan penggunaan sumber energi yang terbarukan. Kegiatan di sektor yang mengelola sumber daya alam dari bumi memiliki potensi untuk merusak lingkungan, baik air, tanah maupun udara. Oleh karena itu, harus selalu dijaga agar kegiatan pembangunan di sektor ini memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

9. Dana untuk pembiayaan pembangunan terutama digali dari sumber kemampuan sendiri. Sumber dana luar negeri yang masih diperlukan merupakan pelengkap, dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan dan mencegah keterikatan serta campur tangan asing. Pembangunan nasional pada dasarnya diselenggarakan oleh masyarakat bersama pemerintah. Oleh karena itu, peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pembangunan adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh rakyat. Tabungan nasional yang meliputi tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat perlu ditingkatkan. Tabungan pemerintah ditingkatkan melalui peningkatan penerimaan negara, terutama yang berasal dari sumber nonmigas, diiringi dengan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana tersebut untuk mencapai sasaran pembangunan. Semua upaya itu dilaksanakan dalam kerangka kebijaksanaan fiskal yang tetap didasarkan pada prinsip anggaran berimbang dan dinamis yang menjamin pemerataan pembangunan yang meluas, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis. Tabungan masyarakat ditingkatkan melalui kebijaksanaan moneter yang didukung kebijaksanaan di bidang lain, yang menjamin kestabilan nilai mata uang dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, pengembangan lembaga keuangan dan perbankan yang efisien dan makin meluas jangkauannya.
10. Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peranserta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, pembangunan daerah dan kawasan yang kurang berkembang, seperti di kawasan timur Indonesia,

daerah terpencil dan daerah perbatasan, perlu ditingkatkan sebagai perwujudan Wawasan Nusantara.

11. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia serta kualitas sumber daya manusia Indonesia dan memperlancar serta meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan termasuk di daerah terpencil. Peningkatan kualitas pendidikan harus dipenuhi melalui peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan lainnya, pembaharuan kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan zaman dan tahapan pembangunan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Pendidikan yang berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan sedini mungkin merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dalam semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan perlu didorong dan ditingkatkan.
12. Budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa, karsa, dan karya bangsa Indonesia yang dilandasi nilai luhur bangsa berdasarkan Pancasila, bercirikan Bhineka Tunggal Ika dan berwawasan nusantara, harus diupayakan agar senantiasa menjwai perilaku masyarakat dan pelaksana pembangunan, serta membangkitkan sikap kesetiakawanan dan tanggung jawab sosial dan disiplin serta semangat pantang menyerah. Kebudayaan nasional yang merupakan puncak-puncak kebudayaan daerah harus mengangkat nilai budaya daerah yang luhur, menyaring dan menyerap nilai budaya dari luar yang positif dan sekaligus menolak nilai budaya yang merugikan pembangunan dalam upaya menuju ke arah kemajuan adab dan mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Pembiayaan dan pengembangan bahasa Indonesia terus ditingkatkan sehingga mampu menjadi wahana komunikasi sosial dan wahana ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dalam rangka meningkatkan kualitas manusia, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa serta memantapkan kepribadian bangsa.
13. Pembangunan kependudukan diarahkan pada peningkatan kualitas penduduk dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, serta perwujudan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Upaya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk perlu dilanjutkan dan lebih ditingkatkan. Upaya persebaran penduduk secara serasi, antara lain melalui transmigrasi, perlu dilanjutkan dan lebih diarahkan kepada transmigrasi swakarsa. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan mutu dan kemudahan pelayanan kesehatan yang harus makin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat serta meningkatkan gizi dan membudayakan sikap hidup bersih dan sehat, didukung dengan pembangunan perumahan dan permukiman yang layak.

14. Pembinaan anak, remaja, dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa diarahkan untuk mengembangkan sikap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, sikap keteladanan dan disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus dilaksanakan sedini mungkin di lingkungan keluarga, di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Pembinaan peranan wanita sebagai mitra sejajar pria dalam pembangunan harus dikembangkan dengan tetap memperhatikan kodrat serta harkat dan martabatnya. Perlu diberikan perhatian terhadap penduduk usia lanjut sebagai warga negara yang memiliki pengalaman luas serta kearsifan dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.
15. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi memegang peranan penting serta akan sangat mempengaruhi perkembangan dalam masa Pembangunan Jangka Panjang Kedua. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mempengaruhi keberhasilan membangun masyarakat maju dan mandiri. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan agar bermanfaat, meningkatkan, dan penguasaannya dapat mempercepat pengembangan kecerdasan dan kemampuan bangsa, mempercepat proses pembaharuan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas, harkat dan martabat bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan, penguatan sistem kelembagaan, serta penyediaan sarana dan prasarana penelitian, penerapan, dan pengembangan yang memadai. Dalam penyelenggaraannya harus senantiasa berpedoman pada nilai agama nilai budaya bangsa serta memperhatikan keterbatasan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
16. Pembangunan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diarahkan untuk mampu meningkatkan kualitas umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga tercipta suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang penuh keimanan, ketakwaan, dan kerukunan yang dinamis serta makin meningkatkan peranserta umat dalam pembangunan. Upaya ini diselenggarakan melalui peningkatan pemasyarakatan nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, didukung oleh perluasan sarana dan prasarana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
17. Dalam rangka memantapkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan hukum diarahkan untuk menghasilkan produk hukum nasional yang mampu mengatur tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan nasional, didukung

oleh aparaturnya yang bersih, berprestasi, penuh pengabdian, sadar dan taat hukum, mempunyai rasa keadilan sesuai dengan kemanusiaan, serta yang profesional, efisien dan efektif, dilengkapi sarana dan prasarana hukum yang memadai serta mengembangkan masyarakat yang sadar dan taat hukum. Penyusunan dan perencanaan hukum nasional harus dilakukan secara terpadu dalam sistem hukum nasional.

18. Pembangunan politik diarahkan pada terwujudnya tatanan kehidupan politik berdasarkan demokrasi Pancasila yang makin mampu menjamin berfungsinya lembaga kemasyarakatan, mantapnya proses komunikasi politik, baik antara supra- dan infrastruktur politik maupun antarsesama supra- dan infrastruktur politik dan dengan masyarakat, serta mengembangkannya dan sikap keterbukaan yang bertanggung jawab. Pembangunan politik harus makin meningkatkan kualitas pendidikan politik, keteladanan dan kaderisasi politik, memantapkan etik dan moral budaya politik yang berdasarkan Pancasila, meningkatkan peranserta politik masyarakat, dan membangun suasana kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan penerapan, komunikasi, dan media massa lebih ditingkatkan dan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta menggerakkan dan menggairahkan peranserta aktif dalam pembangunan nasional dan dalam seluruh dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyelenggaraan hubungan luar negeri yang didasarkan pada politik luar negeri yang bebas aktif perlu terus ditingkatkan dan dimantapkan dalam rangka menunjang pencapaian tujuan nasional.
19. Pembangunan aparaturnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas aparaturnya agar aparaturnya lebih memiliki sikap dan perilaku yang berorientasi pada pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, dan kewibawaan sehingga dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat. Sejalan dengan itu, perlu diupayakan penataan kewenangan yang rasional di antara jajaran dan perangkat aparaturnya sehingga terlaksana penyelenggaraan administrasi negara yang bersih, berprestasi, profesional, efisien, dan efektif.
20. Pembangunan pertahanan keamanan negara diarahkan pada kemampuan untuk mewujudkan daya tangkal bangsa yang tangguh dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, didukung oleh manusia yang profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara yang tinggi, kemandirian ABRI-rakyat dan pelaksanaan fungsi sosial politik ABRI yang mantap dan dinamis, serta didukung pula oleh sarana-prasarana dan industri strategis yang andal sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar terjamin stabilitas keamanan yang mantap dan dinamis,

kelangsungan pembangunan nasional serta teap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

www.tatanusa.co.id

BAB IV PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM

A. KONDISI UMUM

1. Dalam Pembangunan Jangka Panjang Pertama yang berakhir pada Pembangunan Lima Tahun Kelima, bangsa Indonesia telah berhasil menciptakan kerangka landasan yang cukup mantap, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan keamanan sebagai pangkal tolak bagi upaya untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri, sehingga dalam Pelita Keenam bangsa Indonesia dapat memasuki proses tinggal landas. Di bidang ekonomi telah dapat diciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang dengan industri yang semakin kuat, yang saling mendukung dengan pertanian yang makin tangguh. Penguatan dan pendalaman struktur industri dalam Pembangunan Lima Tahun Keenam akan dimantapkan bersamaan dengan usaha peningkatan, diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi pertanian dan pengembangan agroindustri serta agribisnis yang makin tangguh. Di bidang politik, proses pembahasan kehidupan politik yang didukung makin mantap dan dalamnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah makin memantapkan kesepakatan politik untuk menegaskan kembali dan menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penerapan prinsip politik luar negeri bebas aktif secara konsekuen dengan berperan aktif dalam kerja sama ASEAN, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Gerakan Nonblok, Organisasi Konferensi Islam, dan organisasi internasional lainnya dalam penyelesaian masalah regional serta masalah internasional telah meningkatkan citra, wibawa, kedudukan, dan peranan Indonesia dalam ikut serta menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera. Dalam kehidupan sosial budaya, kualitas sumber daya manusia telah makin meningkat, dan keserasian, keselarasan serta keseimbangan kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia baik lahir maupun batin makin berkembang, tercermin dalam kerukunan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, makin berkembangnya kebudayaan nasional yang dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila, disamping melembagakan budaya dan semangat membangun di kalangan masyarakat, serta makin mantapnya semangat kebangsaan yang berwawasan nusantara. Di bidang pertahanan keamanan telah dapat diwujudkan pengamanan perjuangan nasional termasuk pengamanan pelaksanaan pembangunan berkat kemampuan bangsa

- memelihara stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, serta makin meningkatnya ketahanan nasional di segala bidang.
2. Perkembangan, perubahan, dan gejala internasional pada akhir Pembangunan Jangka Panjang Pertama ditandai oleh gejala baru, yaitu globalisasi yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional dan ketahanan nasional yang pada gilirannya akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan nasional di masa yang akan datang. Globalisasi yang didorong kemajuan pesat di bidang teknologi, terutama teknologi telekomunikasi, menyebabkan semakin derasnya arus informasi dengan segala dampaknya baik positif maupun negatif. Peluang yang timbul dari globalisasi adalah makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, terutama yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Tantangan di bidang ekonomi, di samping makin kuatnya persaingan di pasaran internasional, adalah munculnya pengelompokan antar negara yang cenderung meningkatkan proteksionalisme dan diskriminasi pasar yang dapat menghambat pemasaran hasil produksi dalam negeri dan mendorong persaingan yang kurang sehat. Ancaman di bidang politik dan pertahanan keamanan adalah kemungkinan timbulnya rongrongan terhadap ideologi Pancasila, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional, khususnya persatuan dan kesatuan bangsa yang dapat mengganggu kelancaran jalannya pembangunan nasional. Ancaman di bidang sosial budaya adalah masuknya nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
 3. Pembangunan telah berhasil meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan rakyat pada umumnya walaupun masih ada ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang menuntut usaha yang sungguh-sungguh untuk mengatasinya agar tidak berkelanjutan dan berkembang ke arah keangkuhan dan kecemburuan sosial. Perluasan dan penataan dunia usaha perlu ditingkatkan dalam rangka menggalakan kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih merata melalui mantapnya iklim yang mendukung pembinaan dan peningkatan usaha informal, usaha kecil, golongan ekonomi lemah, dan usaha menengah, kerja sama kemitraan pula upaya untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi dalam berbagai bentuk monopoli, monopsoni, dan praktek lainnya yang merugikan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi yang berdasar atas asas kekeluargaan, koperasi telah mulai dikembangkan didorong, dan dibimbing agar makin mandiri dan mampu menjadi pelaku utama dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagian koperasi masih memerlukan upaya pengembangan agar menjadi gerakan ekonomi rakyat yang nyata, sehat, dan mandiri. Secara kelembagaan koperasi telah tumbuh dan berkembang ke seluruh wilayah tanah air terutama koperasi di pedesaan.

4. Upaya untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dalam dan luar negeri telah dapat memperlancar arus barang dan jasa, mendorong ekspor, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, serta meningkatkan stabilitas ekonomi. Upaya tersebut telah makin mantap dan mendorong peningkatan produksi melalui pembentukan dan jaminan harga yang layak dalam iklim persaingan yang sehat dan terkendali, serta makin memberikan peluang bagi peningkatan nilai tambah yang memadai dan peningkatan pemerataan pendapatan rakyat secara lebih adil.
5. Dana pembangunan yang diperoleh dari sumber dalam negeri telah makin meningkat. Pembangunan yang makin meningkat memerlukan biaya yang makin besar yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai dari sumber dana dalam negeri. Oleh karena itu, juga diperlukan pembiayaan dari sumber dana luar negeri sebagai pelengkap yang peranannya telah diupayakan agar makin kecil. Peranan kebijaksanaan moneter dan fiskal sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan pembangunan telah makin berkembang, terutama yang berkaitan dengan tatanan dan perangkat kelembagaannya, namun masih belum sepenuhnya mampu mendorong peran aktif masyarakat dalam pembiayaan pembangunan, antara lain melalui perpajakan.
6. Pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan rakyat telah diupayakan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta senantiasa memperhitungkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan demi kepentingan generasi yang akan datang. Pengankaragaman pemanfaatan sumber daya alam dalam usaha memacu pertumbuhan yang mendukung pemerataan ekonomi serta peningkatan ketahanan ekonomi, telah diupayakan sejalan dengan kemampuan alam Indonesia yang beraneka ragam dan kebutuhan masyarakat yang makin beranekaragam pula. Peningkatan potensi sumber daya yang dapat diperbaharui telah diupayakan dengan jalan rehabilitasi sumber daya alam yang keadaannya kritis dan konservasi sumber daya yang masih utuh. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan daya dukung lingkungan hidup telah makin meningkat, yang dapat mendorong pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan yang makin meningkat dan bertambahnya jumlah penduduk akan dihadapkan kepada kondisi sumber daya alam yang makin terbatas, khususnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lahan, air, dan hutan serta pola tata ruang masih belum sepenuhnya dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu terus diperhatikan bersamaan dengan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup antara lain yang berkaitan dengan upaya pelestarian daerah resapan dan daerah penyangga air.

7. Pengembangan dan pemanfaatan energi telah diupayakan melalui pengelolaan energi agar hemat dan efisien sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional yang makin meningkat dan dengan memperhatikan kelestarian sumber energi dan lingkungan hidup untuk jangka panjang. Upaya penganekaragaman sumber energi melalui penemuan, pemanfaatan, dan pemasyarakatan sumber energi alternatif telah mulai digalakkan, tetapi kebutuhan akan energi meningkat lebih cepat sehingga menuntut kebijaksanaan yang menyeluruh dan terpadu yang menjamin pemenuhan kebutuhan energi yang memenuhi persyaratan, aman, adil, dan terjangkau oleh daya beli rakyat.
8. Pembangunan kesejahteraan rakyat telah ditingkatkan antara lain dengan makin meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan lembaga sosial masyarakat, baik di panti sosial maupun diluar panti, dengan peran masyarakat yang makin nyata. Harapan dan tuntutan masyarakat juga makin meningkat. Kesadaran, tanggung jawab sosial, dan rasa kesetiakawanan sosial masyarakat telah makin meningkat untuk berperan serta menyelesaikan masalah sosial yang dialami oleh sebagian masyarakat yang kurang beruntung.
9. Pembangunan pendidikan telah berhasil meletakkan dasar yang makin mantap bagi terwujudnya sistem pendidikan nasional, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan secara lebih merata, serta telah berhasil makin meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Jumlah lulusan pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dari tahun ke tahun terus bertambah meskipun mutu pendidikan masih perlu terus ditingkatkan. Pembinaan anak dan remaja sebagai tunas bangsa, termasuk pembinaan untuk menanamkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, pendidikan budi pekerti, peningkatan minat baca, dan semangat belajar, telah mengalami kemajuan yang berarti meskipun masih perlu ditingkatkan dengan berbagai upaya yang makin terpadu.
10. Pembangunan kesehatan telah berhasil meningkatkan pelayanan kesehatan dasar secara lebih merata sehingga dapat menurunkan angka kematian bayi dan balita, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan keadaan gizi masyarakat, dan memperpanjang usia harapan hidup rata-rata penduduk. Namun, peningkatan mutu, pemerataan pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat masih memerlukan perhatian lebih besar lagi. Pembangunan kesehatan masih perlu terus ditingkatkan dengan lebih mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran secara saksama dan bertanggung jawab.
11. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk telah berhasil dengan baik terutama melalui gerakan keluarga berencana. Pembangunan keluarga

sejahtera, sesuai dengan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera telah dilaksanakan melalui program yang menyeluruh dan terpadu sehingga selain telah berhasil menurunkan tingkat kelahiran, juga telah membantu penurunan angka kematian. Namun, penambahan jumlah penduduk dan perbandingan penduduk usia muda yang masih besar serta persebaran penduduk yang masih belum merata menimbulkan masalah pengembangan sumber daya manusia khususnya masalah peningkatan kualitas, penyediaan lapangan kerja, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

12. Pembinaan generasi muda telah dapat meningkatkan kualitas generasi muda, mengembangkan suasana serta semangat yang sehat, dan menumbuhkan sikap tanggap terhadap tantangan pembangunan masa depan. Organisasi kepemudaan makin menghadapi tantangan yang makin besar untuk lebih mampu melaksanakan fungsinya dalam pembangunan secara optimal, termasuk pelaksanaan pendidikan politik yang dapat menjangkau pemuda di seluruh tanah air.
13. Pembinaan peranan wanita untuk meningkatkan peran serta aktif dalam proses pembangunan nasional sesuai dengan kodrat serta harkat dan martabatnya sebagai mitra sejajar pria telah berhasil menjangkau sebagian besar kaum wanita, masih perlu diperhatikan peningkatan kualitasnya dan iklim sosial budaya yang lebih mendukung bagi wanita untuk mengembangkan diri dan perannya dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
14. Pembinaan dan pengembangan nilai kepeloporan, kepemimpinan, dan kepahlawanan telah dilaksanakan antara lain melalui pemberian penghargaan kepada pahlawan nasional, veteran, pejuang kemerdekaan, dan warga negara yang berjasa luar biasa kepada bangsa dan negara. Sikap dan semangat kepeloporan dan keperintisan serta sikap dan semangat menghargai pahlawan serta wadah pembinaannya masih perlu ditingkatkan.
15. Pembangunan olahraga telah berhasil memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani masyarakat. Berbagai upaya masih diperlukan untuk lebih meningkatkan prestasi olahraga sehingga dapat ikut mengharumkan nama bangsa di dunia internasional dan membangkitkan rasa kebanggaan nasional, serta untuk memupuk watak bangsa dan memasyarakatkan budaya disiplin dan sportivitas.
16. Pembangunan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah berhasil meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan suasana kehidupan beragama yang

makin semarak, menanamkan dan membina kerukunan antar dan antara sesama umat beragama, antar- dan sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sarana beribadah makin bertambah dan pemanfaatannya oleh masyarakat makin meningkat. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah kedalam pengamalan ajaran dan nilai-nilai agama serta kemandirian kehidupan beragama dalam rangka mengukuhkan landasan spiritual, moral, dan etik bagi pembangunan serta landasan persatuan dan kesatuan bangsa

17. Pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kecerdasan masyarakat, meningkatkan kemampuan bangsa, serta mempercepat proses pembaharuan telah diupayakan dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kemampuan nasional dalam segala aspek kehidupan. Kemampuan tersebut masih perlu terus ditingkatkan untuk dapat mengimbangi kemajuan dan memenuhi kebutuhan pembangunan yang terus meningkat dan berubah secara cepat dalam rangka menjawab tantangan masa depan.
18. Pembangunan hukum yang menuju terbentuknya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 masih menghadapi berbagai macam tantangan yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum telah makin meningkat, di lain pihak tuntutan masyarakat terhadap kepastian dan pengayoman hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran meningkat lebih cepat, sehingga pembangunan hukum yang menuju terwujudnya sistem hukum nasional perlu sungguh-sungguh diperhatikan.
19. Pembangunan bidang politik melalui proses pembaharuan kehidupan politik, terutama dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, telah mampu memantapkan penciptaan stabilitas nasional di bidang politik. Walaupun demikian pengamalan budaya politik Pancasila terutama menyangkut etika dan moral politik serta kegiatan perluasan pendidikan politik masih memerlukan perhatian. Mekanisme kepemimpinan nasional lima tahun telah berjalan cukup mantap walaupun masih memerlukan perhatian terhadap fungsinya secara mantap supra- dan infrastruktur politik termasuk mekanisme komunikasi politik yang mengait pada sikap keterbukaan yang bertanggung jawab dan berlandaskan Demokrasi Pancasila
20. Dalam rangka pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia sebagai pemantapan perwujudan Wawasan Nusantara, telah diupayakan pelaksanaan otonomi daerah dengan mempertimbangkan kemampuan pembangunan daerah yang bersangkutan. Masih perlu diberikan perhatian

yang lebih besar khususnya kepada daerah yang terbelakang, daerah yang padat, dan daerah yang sangat kurang penduduknya, daerah transmigrasi, daerah terpencil, dan daerah perbatasan, serta daerah yang memiliki ciri khas seperti daerah tertentu di kawasan timur Indonesia

21. Pembangunan pertahanan keamanan negara, terutama pembangunan kemampuan ABRI, telah berhasil meningkatkan kemampuan pertahanan keamanan negara dalam menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga mampu mendukung terciptanya kemantapan stabilitas nasional dalam semua aspek kehidupan yang mendukung penyelenggaraan pembangunan nasional. Dihadapkan kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan pertahanan keamanan negara masih memerlukan perhatian agar senantiasa mampu mengemban fungsi daya tangkal yang tangguh dan mantap. Pelaksanaan peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik melalui pelaksanaan fungsi stabilisator dan dinamisatornya telah berhasil lebih menumbuhkembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila.

B. TUJUAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM.

Tujuan Pembangunan Lima Tahun Keenam adalah :

1. Menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin yang lebih selaras, adil, dan merata.
2. Meletakkan landasan pembangunan yang mantap untuk tahap pembangunan berikutnya.

C. SASARAN UMUM PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM

Sasaran umum Pembangunan Lima Tahun Keenam adalah tumbuhnya sikap kemandirian dalam diri manusia dan masyarakat Indonesia melalui peningkatan peranserta aktif, efisiensi, dan produktivitas rakyat dalam rangka meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan lahir batin.

D. PRIORITAS PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM

Dengan ditetapkannya bidang ekonomi sebagai titik berat yang merupakan penggerak utama Pembangunan Jangka Panjang Kedua, seiring dengan kualitas sumber daya manusia, maka prioritas Pembangunan Lima Tahun Keenam adalah pembangunan sektor-sektor di bidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang dikembangkan sebagai berikut :

1. Penataan industri nasional yang mengarah pada penguatan dan pendalaman struktur industri yang didukung kemampuan teknologi yang makin

meningkat; peningkatan ketangguhan pertanian; pemantapan sistem dan kelembagaan koperasi; penyempurnaan pola perdagangan, jasa dan sistem distribusi; pemanfaatan secara optimal dan tepat guna faktor produksi dan sumber daya ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi produksi dan sumber daya ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai prasyarat terbentuknya masyarakat industri yang menjamin peningkatan keadilan, kemakmuran, dan pemerataan pendapatan serta kesejahteraan rakyat, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Pembangunan sumber daya manusia agar makin meningkat kualitasnya sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dengan pendidikan nasional yang makin merata dan bermutu disertai peningkatan dan perluasan pendidikan keahlian yang dibutuhkan berbagai bidang pembangunan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin mantap.

Pembangunan bidang lainnya terus ditingkatkan selaras dan serasi serta saling memperkuat dengan pembangunan bidang ekonomi sehingga keseluruhan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan gerak dalam mewujudkan masyarakat maju, mandiri, dan sejahtera.

E. SASARAN BIDANG PEMBANGUNAN LIMATAHUN KEENAM

1. Bidang Ekonomi

Penataan dan pemantapan industri nasional yang mengarah pada penguatan, pendalaman, peningkatan, perluasan, dan penyebaran industri ke seluruh wilayah Indonesia, dan makin kukuhnya struktur industri dengan peningkatan keterkaitan antara industri hulu, industri antara, dan industri hilir serta antara industri besar, industri menengah, industri kecil, dan industri rakyat, serta keterkaitan industri dengan sektor ekonomi lainnya; peningkatan diversifikasi usaha dan hasil pertanian serta peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian yang didukung oleh industri pertanian; penataan dan pemantapan kelembagaan dan sistem koperasi agar koperasi makin efisien serta berperan utama dalam perekonomian rakyat dan berakar dalam masyarakat; peningkatan peran pasar dalam negeri serta perluasan pasar luar negeri dengan pola perdagangan dan sistem distribusi yang makin meluas dan mantap; keseluruhannya bersamaan dengan upaya peningkatan pemerataan yang meliputi peningkatan kegiatan ekonomi rakyat, kesempatan usaha, lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan, dan Kebudayaan.

Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan umum yang makin adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat, penyediaan sandang, pangan, dan papan yang memadai; penataan pendidikan nasional untuk

mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, dengan mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar serta perluasan pendidikan keahlian dan kejuruan; peningkatan penghayatan nilai luhur budaya bangsa yang menjiwai perilaku manusia dan masyarakat dalam segenap aspek kehidupan; peningkatan derajat kesehatan melalui peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan yang makin menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

3. Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Penataan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang harmonis, yang tercermin dalam makin meningkatnya keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, makin meningkatnya kerukunan kehidupan umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, makin meningkatnya peran serta umat dalam pembangunan melalui pendidikan di lingkungan keluarga, di masyarakat, dan di sekolah, bersamaan dengan perluasan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan untuk menunaikan ibadah masing-masing.

4. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Peningkatan kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan dengan mengutamakan peningkatan dan kemampuan alih teknologi melalui perubahan dan pembaharuan teknologi yang didukung oleh pengembangan kemampuan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan yang memadai, serta peningkatan mutu pendidikan sehingga mampu mendukung upaya penguatan, pendalaman, dan perluasan industri dalam rangka menunjang proses industrialisasi menuju terwujudnya bangsa Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera.

5. Bidang Hukum

Penataan hukum nasional dengan meletakkan pola pikir yang mendasari penyusunan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945' penyusunan kerangka sistem hukum nasional serta penginventarisasian dan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum dalam rangka pembaharuan hukum nasional; peningkatan penegakan hukum dan pembinaan aparaturnya; serta peningkatan sarana dan prasarana hukum.

6. Bidang Politik, Aparatur Negara, Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa

Penataan kehidupan politik yang didukung oleh suasana yang memungkinkan berkembangnya budaya politik yang mengarah pada perwujudan sikap keterbukaan yang bertanggung jawab dalam komunikasi antar dan antara suprastruktur dan infrastruktur politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; terselenggaranya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab; peningkatan hubungan kerja sama internasional yang saling menguntungkan dan menunjang kepentingan nasional; penataan manajemen aparatur negara untuk meningkatkan kualitas, kemampuan, dan kesejahteraan manusianya; serta peningkatan kemampuan dan kegiatan penerangan, komunikasi dan media massa dalam menggerakkan dan menggairahkan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan.

7. Bidang Pertahanan Keamanan

Penataan kemampuan segenap komponen pertahanan keamanan negara dalam rangka sisten pertahanan keamanan rakyat semesta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mulai penataan perangkat dan perwujudan rakyat terlatih dan perlindungan masyarakat secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan; pembangunan ABRI yang lebih efisien, efektif, dan modern agar berkemampuan optimal, baik sebagai kekuatan pertahanan keamanan maupun sebagai kekuatan sosial politik, yang didukung oleh makin mantapnya kemanuggalan ABRI-rakyat serta makin meningkatnya keterpaduan pembinaan danpenyiapan komponen pendukung pertahanan keamanan negara.

F. KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

LIMA TAHUN KEENAM

UMUM

1. Sebagai kelanjutan dari kegiatan pembangunan dan berdasarkan pada hasil pembangunan sebelumnya, kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun Keenam diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia dan kualitas kehidupan masyarakat agar makin maju dan mandiri yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang makin meluas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, penciptaan dan perluasan lapangan kerja serta lapangan usaha dan penggalakkan pembangunan daerah terbelakang, khususnya kawasan timur Indonesia, ditingkatkan dan diarahkan agar mampu mewujudkan kesejahteraan yang makin adil dan makin merata bagi seluruh rakyat, serta menumbuhkan sikap kemandirian bangsa.
2. Dalam Pembangunan Lima Tahun Keenam, kebijaksanaan pembangunan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yaitu :

- a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi,
- c. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis,

Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut saling mengait dan perlu dikembangkan secara selaras, terpadu, dan saling memperkuat. Laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi harus diupayakan dengan makin mengandalkan pada peningkatan efisiensi dan produktivitas nasional yang perwujudannya dilandaskan pada peran serta aktif dan luas oleh masyarakat yang dijiwai oleh semangat kemitraan dalam berusaha. Hasil pembangunan harus dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh masyarakat dan stabilitas nasional dapat terpelihara dengan mantap serta terjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup.

3. Setiap perkembangan, perubahan, dan gejolak dunia baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun militer terus diikuti secara saksama. Perkembangan yang menimbulkan kendala bagi pembangunan nasional perlu diantisipasi dan diatasi serta diambil langkah-langkah penanganannya sedini mungkin, sedangkan yang mengandung peluang perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan. Pembangunan nasional yang makin meluas dan kompleks dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin canggih memerlukan peningkatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dalam manajemen pembangunan nasional yang terpadu, berpijak pada potensi, kekuatan efektif dan kemampuan dalam negeri yang dilandasi disiplin, tanggung jawab, semangat pengabdian, dan semangat pembangunan serta kemampuan profesional yang tinggi.
4. Kegiatan produksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat terus ditingkatkan dan diusahakan untuk mengembangkan produk unggulan yang mampu menerobos pasar internasional. Sejalan dengan itu perlu dikembangkan sumber daya manusia sebagai tenaga ahli dan terampil yang mampu melaksanakan alih berbagai jenis teknologi, termasuk mampu memilih teknologi tepat serta menerapkan, menguasai, dan mengembangkannya sebagai teknologi hasil sendiri yang serasi dengan perkembangan budaya masyarakat agar dapat lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pendapatan masyarakat.
5. Pembangunan industri diarahkan pada penguatan dan pendalaman struktur industri untuk terus meningkatkan efisiensi dan daya saing industri menuju kemandirian, serta menghasilkan barang yang makin bermutu yang dikaitkan dengan pembangunan sektor lainnya, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar

dalam negeri maupun pasar luar negeri. Bersamaan dengan itu perlu terus ditingkatkan kemampuan rancang bangun dan rekayasa industri dengan memanfaatkan kemampuan teknologi untuk dapat menghasilkan produk unggulan bernilai tambah yang tinggi dan padat keterampilan. Penyebaran lokasi industri keluar Jawa diarahkan untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan industri di daerah yang potensial untuk dikembangkan sebagai upaya pemerataan kesempatan dan lapangan kerja, kesempatan usaha, dan pemanfaatan sumber daya setempat secara optimal dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sejalan dengan itu perlu dikembangkan kemampuan sumber daya manusia, baik untuk perencanaan, pelaksanaan, dan penguasaan teknologi maupun tumbuhnya profesionalisme dan kewiraswastaan, menuju terwujudnya masyarakat industri Indonesia.

6. Pertanian dalam arti yang luas terus dikembangkan agar makin maju dan efisien, dan diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta keanekaragaman hasil pertanian, melalui usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi, dan rehabilitasi pertanian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta kebutuhan bahan baku industri. Industri pertanian dan industri lain yang terkait terus didorong perkembangannya sehingga makin mampu memanfaatkan peluang pasar dalam dan luar negeri, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja. Semua itu diarahkan untuk memperbaiki taraf hidup petani dan masyarakat pedesaannya.
7. Penciptaan dan perluasan lapangan kerja terus diupayakan, terutama melalui peningkatan dan pemerataan pembangunan industri, pertanian, dan jasa yang mampu menyerap tenaga kerja yang banyak serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya tersebut harus didukung oleh keterpaduan kebijaksanaan investasi, fiskal dan moneter, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan dan penyuluhan, penerapan teknologi serta pengembangan dan pemanfaatan pusat informasi pasar dalam dan luar negeri. Kebijakan pemerataan dan peningkatan kesempatan kerja serta pelatihan tenaga kerja terus dilanjutkan dan ditingkatkan agar menjangkau setiap warga negara dan terarah pada terwujudnya angkatan kerja yang terampil dan tangguh. Kesempatan kerja terbuka bagi setiap orang sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keahliannya serta didukung oleh kemudahan memperoleh pendidikan dan pelatihan, penguasaan teknologi, informasi pasar ketenaga kerjaan serta tingkat upah yang sesuai dengan prestasi dan kualifikasi yang dipersyaratkan.
8. Perdagangan dalam negeri dan distribusi diarahkan untuk memperlancar arus barang dan jasa serta melindungi kepentingan produsen dan konsumen dalam rangka memantapkan stabilitas ekonomi, mempercepat pembangunan,

menyebarkan dan pemeratakan hasil pembangunan ke seluruh wilayah tanah air sehingga kesempatan usaha dan lapangan kerja terbuka lebih luas serta lebih mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Peningkatan ekspor barang dan jasa termasuk jasa konstruksi diarahkan pada penganeekaragaman jenis komoditi ekspor, peningkatan jumlah serta mutu barang dan jasa ekspor serta meningkatkan daya saing melalui upaya perluasan pasar, penyebaran informasi dan peningkatan promosi, didukung oleh sarana dan prasarana telekomunikasi, komunikasi, dan transportasi serta lembaga keuangan yang andal. Impor barang dan jasa diarahkan untuk meningkatkan produksi dalam negeri yang berorientasi pada ekspor, penghematan devisa, dan pola hidup sederhana.

9. Pembangunan sistem transportasi diarahkan pada peningkatan peranannya sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan antara lain dengan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi serta menyempurnakan pengaturan yang harus selalu didasarkan pada kepentingan nasional. Perhatian khusus diberikan kepada perluasan sistem transportasi kawasan timur Indonesia, daerah terbelakang lainnya, ke dan di daerah pedesaan, daerah dan pulau terpencil serta wilayah perbatasan dalam rangka perwujudan wawasan nusantara. Pembangunan sistem transportasi darat, laut, dan udara termasuk manajemennya dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan memanfaatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Pembangunan pos dan telekomunikasi terus dilanjutkan dan ditingkatkan agar lebih mampu mendukung kegiatan pembangunan yang makin meluas, dengan meningkatkan mutu dan efisiensi pengelolaannya serta memperluas jangkauan pelayanan ke seluruh wilayah tanah air dan luar negeri. Dalam pembangunan pos dan telekomunikasi, kerja sama internasional perlu terus ditingkatkan dalam rangka mempercepat hubungan antarbangsa.
11. Pembangunan kepariwisataan terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk memperbesar penerimaan devisa, memperluas dan pemeratakan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperkaya kebudayaan nasional dengan tetap mempertahankan kepribadian bangsa dan tetap terpeliharanya nilai-nilai agama, mempererat persahabatan antar bangsa, memupuk cinta tanah air, serta memperhatikan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup. Pembangunan kepariwisataan juga diarahkan untuk mendorong pengembangan, pengenalan, dan pemasaran produk nasional.
12. Kekayaan alam yang potensial berupa barang tambang, minyak dan gas bumi, serta mineral lainnya yang terdapat di darat dan di dasar laut nusantara, makin ditingkatkan eksplorasi, penggalian dan penayangunaannya untuk menunjang

- pembangunan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dengan memanfaatkan teknologi maju. Pembangunan pertambangan harus memberikan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan industri dalam rangka memperkuat struktur ekonomi yang seimbang dan meningkatkan pendapatan nasional.
13. Pembangunan energi diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan energi yang makin meningkat, baik bagi kehidupan masyarakat maupun bagi kegiatan ekonomi dan pembangunan terutama bagi kebutuhan industri dan jasa yang terus meningkat sejalan dengan tingkat perkembangan pembangunan. Potensi sumber energi nasional, baik yang konvensional maupun yang nonkonvensional, terus digali dan dikembangkan dengan bepegangan pada prinsip menguntungkan secara ekonomis, layak secara teknis, dan diterima secara sosial budaya serta tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup serta terjangkau oleh daya beli rakyat. Untuk menjaga kelestarian sumber energi perlu diupayakan pemanfaatannya secara hemat, penggunaan bahan energi alternatif dan penggunaan peralatan yang hemat energi serta kebijaksanaan energi nasional yang terpadu dan menyeluruh.
 14. Pembangunan kehutanan terus ditingkatkan dan diarahkan untuk menjamin kelangsungan penyediaan dan perluasan keanekaragaman hasil hutan bagi pembangunan industri, perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha sumber pendapatan negara dan pemacu pembangunan daerah, serta menjaga fungsinya sebagai salah satu penentu ekosistem untuk memelihara tata air, plasma nutfah, kesuburan tanah, dan iklim. Upaya perlindungan penertiban, pengamanan, pengawasan, pengadilan serta rehabilitasi dan konservasi hutan tetap dilanjutkan dan ditingkatkan untuk menjaga kelestarian hutan.
 15. Air, tanah, dan lahan yang mempunyai nilai ekonomi dan fungsi sosial pemanfaatannya perlu diatur dan dikembangkan dalam pola tata ruang yang terkoordinasi bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat melalui berbagai penggunaan, terutama untuk keperluan permukiman, pertanian, kehutanan, industri, pertambangan dan kelistrikan, serta prasarana pembangunan lainnya. Tata guna air dan tata guna lahan serta kehutanan diselenggarakan secara terpadu sehingga menjamin kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Perhatian khusus perlu diberikan pada konservasi dan rehabilitasi lahan kritis, pemeliharaan wilayah peresapan dan daerah aliran sungai serta sumber air lainnya.
 16. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah, antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan serta membuka

daerah terisolasi dan mempercepat pembangunan kawasan timur Indonesia, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan prioritas daerah serta melalui pengembangan potensi daerah seoptimal mungkin. Peran aktif masyarakat dalam pembangunan perlu dikembangkan melalui pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada daerah khususnya daerah otonom, dengan tetap mengacu pada arah dan tujuan pembangunan nasional serta pada upaya perwujudan Wawasan Nusantara.

17. Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, memperluas penyebaran penduduk dan tenaga kerja ke berbagai wilayah tanah air, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan para transmigrasi khususnya dan masyarakat pada umumnya, memperkuat pertahanan keamanan negara serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kebijakan transmigrasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah serta sumber daya dan kondisi lingkungan setempat secara terpadu sehingga mendorong peningkatan transmigrasi swakarsa dan mengembangkan kegiatan ekonomi di daerah.
18. Pembangunan kelautan diarahkan pada pengeksploitasi, pemanfaatan, dan pembudidayaan sumber daya kelautan serta pemeliharaan kelestarian ekosistem dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan kawasan laut sebagai media penghubung perlu terus ditingkatkan untuk menjamin kelancaran kegiatan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan berwawasan nusantara. Pendayagunaan sumber daya kelautan ditujukan untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, yang sangat memerlukan pendalaman pengetahuan tentang potensi yang terkandung di dalam dan di dasar lautan nusantara. Pemetaan dasar laut dan pengungkapan potensi yang ada didalamnya yang sangat strategis bagi pengembangan perencanaan pendayagunaan sumber daya kelautan perlu terus ditingkatkan.
19. Pembangunan kedirgantaraan perlu terus ditingkatkan. Hak penggunaan wilayah dirgantara di atas Indonesia perlu dikukuhkan dengan memperjuangkannya dalam forum internasional. Sarana, jasa, dan industri dirgantara terus dikembangkan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkemampuan tinggi.
20. Usaha nasional yang terdiri atas koperasi, usaha negara dan usaha swasta terus dikembangkan agar menjadi kekuatan ekonomi nasional yang makin tangguh melalui penciptaan iklim usaha dan pola perdagangan yang sehat, menyuburkan semangat dan kreativitas usaha serta mendorong efisiensi produktivitas, dan daya saing. Tata hubungan dan kerja sama serta kemitraan usaha antara berbagai unsur ekonomi nasional terutama antara pengusaha

kuat dan lemah, terus dibina dan dijalin dalam suasana saling membantu dan saling menguntungkan, sebagai suatu perwujudan kesatuan kekuatan ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan kebersamaan sesuai dengan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Cabang-cabang produksi yang bernilai strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan terus dikembangkan secara efektif serta dikelola secara efisien dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam upaya memperluas peran aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi untuk menopang peningkatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi perlu terus dikembangkan kebijaksanaan yang memajukan golongan ekonomi lemah melalui perluasan aksesnya terhadap sumber-sumber ekonomi dan faktor-faktor produksi serta kemudahan memasuki pasar.

21. Koperasi yang merupakan bagian integral dan perekonomian nasional, baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat, pembangunannya diarahkan untuk mengembangkan koperasi menjadi makin maju, makin mandiri, dan makin berakar dalam masyarakat serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan di semua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat, dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan koperasi diselenggarakan melalui peningkatan kemampuan organisasi, manajemen, kewiraswastaan, dan permodalan dengan didukung oleh peningkatan jiwa dan semangat berkoperasi menuju pematangan perannya sebagai sokoguru perekonomian nasional.
22. Pembangunan sektor keuangan ditingkatkan, diperluas, dan diarahkan untuk memperbesar kemampuan sumber dana dalam negeri bagi pembiayaan pembangunan nasional. Untuk menjaga kestabilan ekonomi, prinsip anggaran yang berimbang dan dinamis dilanjutkan. Sumber dana luar negeri berfungsi sebagai pelengkap yang diperoleh dengan syarat lunak, tidak memberatkan dan tanpa ikatan politik dan digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan yang produktif sesuai prioritas dan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat serta peranannya secara bertahap harus dikurangi. Peranan investasi modal asing terus didorong dan potensi peran serta pihak asing perlu lebih dikembangkan terutama melalui pasar modal dalam negeri. Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang penting ditingkatkan peranannya terutama pajak langsung, secara bertahap harus dikurangi. Peranan investasi modal asing terus didorong dan potensi peran serta pihak asing perlu lebih dikembangkan terutama melalui pasar modal dalam negeri. Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang penting ditingkatkan peranannya, terutama pajak langsung, secara bertahap sesuai dengan kemampuan masyarakat dan dirasakan adil agar mampu

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dan mampu menunjang kegiatan ekonomi. Upaya menghimpun dana masyarakat terus ditingkatkan dan diarahkan untuk menyediakan dana bagi pembangunan melalui lembaga keuangan yang efisien dan dipercaya oleh masyarakat serta makin dapat menjangkau segenap lapisan masyarakat di seluruh tanah air dengan menciptakan iklim yang mendukung agar mampu meningkatkan peran aktif masyarakat.

23. Penanaman modal dalam negeri dan modal asing makin didorong untuk memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja. Kemudahan dan iklim investasi yang lebih menarik terus dikembangkan antara lain dengan penyediaan sarana dan prasarana ekonomi yang memadai, peraturan perundang-undangan yang mendukung dan menyederhanakan prosedur pelayanan investasi serta kebijaksanaan ekonomi makro yang tepat.
24. Upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat agar makin adil dan merata terus ditingkatkan. Pertumbuhan ekonomi sebagai hasil pembangunan harus dapat dirasakan masyarakat melalui upaya pemerataan daya beli masyarakat. Keberhasilan pembangunan yang dirasakan sebagai perbaikan taraf hidup oleh segenap golongan masyarakat akan meningkatkan kesadaran rakyat tentang makna serta manfaat pembangunan sehingga motivasi rakyat makin tergugah untuk berperan aktif dalam pembangunan.
25. Hasil pembangunan nasional harus dapat dirasakan oleh segenap rakyat secara makin adil dan merata. Pemberian pelayanan sosial kepada masyarakat rentan, sebagai tanggung jawab negara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial, perlu ditingkatkan sehingga dapat dirasakan makin adil dan makin merata di seluruh tanah air. Peran aktif golongan masyarakat yang mampu dalam penyelenggaraan pelayanan sosial perlu digalakkan dan dibudayakan tidak hanya sebagai perwujudan kesetiakawanan sosial, tetapi juga sebagai upaya memperkecil kesenjangan sosial.
26. Pendidikan nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa diselenggarakan secara terpadu dan diarahkan pada peningkatan kualitas serta pemerataan pendidikan, terutama peningkatan kualitas pendidikan dasar serta jumlah dan kualitas pendidikan kejuruan, sehingga memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan menumbuhkan kesadaran serta sikap budaya bangsa untuk selalu berupaya menambah pengetahuan dan keterampilan serta mengamalkannya sehingga terwujud manusia dan masyarakat Indonesia yang

- beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lebih maju, mandiri, berkualitas, dan menghargai setiap jenis pekerjaan yang memiliki harkat dan martabat sesuai dengan falsafah Pancasila.
27. Kebudayaan nasional diarahkan untuk memberikan wawasan budaya dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap dimensi kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara. Kebudayaan nasional ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, jati diri dan kepribadian jiwa persatuan dan kesatuan bangsa sebagai pencerminan pembangunan yang berbudaya. Dalam mengembangkan kebudayaan bangsa perlu ditumbuhkan kemampuan untuk mengembangkan nilai budaya daerah yang luhur dan beradab serta menyerap nilai budaya asing yang positif, untuk memperkaya budaya nasional.
 28. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk makin meningkatkan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat termasuk perbaikan gizi masyarakat. Pelayanan kesehatan dikembangkan dengan terus mendorong peran serta aktif masyarakat termasuk dunia usaha. Kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan bersih berorientasi kepada kepedulian lingkungan terus dibina sehingga tumbuh dan berkembang menjadi sikap dan budaya bangsa. Semua itu perlu didukung oleh sumber daya kesehatan yang cukup memadai dan amdal, termasuk pengembangan dan peningkatan industri farmasi.
 29. Pembangunan keluarga sejahtera diarahkan secara terpadu untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera khususnya melalui pembudayaan keluarga berencana dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang menjangkau segenap lapisan dan golongan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi dan menghargai nilai-nilai agama, moral, etik dan sosial budaya masyarakat.
 30. Pembangunan kependudukan diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kemampuan manusia serta masyarakat Indonesia sebagai pelaku utama dan sasaran pembangunan. Untuk itu perlu terus dikembangkan iklim kemasyarakatan yang mendukung bagi terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pembangunan di berbagai bidang dan sektor. Pembangunan kependudukan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, penciptaan keserasian antar generasi, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Penduduk usia lanjut yang memiliki pengalaman luas dan kearifan perlu diberikan perhatian untuk tetap berperan dalam pembangunan.

31. Pembinaan dan pengembangan anak, remaja, dan pemuda diupayakan melalui pembangunan di berbagai bidang dan sektor serta didukung oleh iklim yang menunjang terwujudnya masyarakat belajar. Pembinaan dan pengembangan anak dan remaja Indonesia harus dimulai sedini mungkin dan perlu terus ditekankan pada kedudukan dan fungsi mereka sebagai tunas bangsa dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pembinaan dan pengembangan pemuda diarahkan pada upaya persiapan generasi muda menjadi kader bangsa yang tangguh dan ulet dalam menghadapi tantangan pembangunan serta bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan bangsa dan negara. Pemuda sebagai penerus perjuangan bangsa diarahkan agar mampu mewujudkan cita-cita nasional serta mampu berperan sebagai insan pembangunan nasional yang berjiwa Pancasila, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berpikir maju, beridealisme tinggi, patriot, berkepribadian, mandiri, dan berwawasan masa depan.
32. Wanita sebagai mitra sejajar pria harus lebih dapat berperan dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta ikut melestarikan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, perlu terus dikembangkan iklim sosial budaya yang mendukung agar mereka dapat menciptakan dan memanfaatkan seluas-luasnya kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya melalui peningkatan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan dengan tetap memperhatikan kodrat serta harkat dan martabat kaum wanita.
33. Pembangunan perumahan dan permukiman dilanjutkan dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian, lingkungan kehidupan, pertumbuhan wilayah dengan memperhatikan keseimbangan antara pengembangan perdesaan dan perkotaan, memperluas lapangan kerja, serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembangunan perumahan dan permukiman, perlu ditingkatkan kerja sama secara terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, koperasi, usaha negara, usaha swasta, dan masyarakat dengan mengindahkan persyaratan minimum bagi perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, dan serasi dengan lingkungan serta terjangkau oleh daya beli masyarakat luas, dengan memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang berpenghasilan menengah dan rendah.
34. Pembinaan olahraga sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kondisi kesehatan fisik, mental, dan rohani manusia Indonesia dalam upaya pembentukan watak dan kepribadian, disiplin dan sportivitas serta pencapaian prestasi yang setinggi-tingginya agar dapat meningkatkan citra bangsa dan kebanggaan nasional. Peningkatan prestasi olahraga perlu digalakkan melalui perencanaan dan

- pelaksanaan yang mantap dan terpadu serta dilakukan merata di seluruh wilayah tanah air, baik oleh pemerintah maupun peran serta masyarakat, dibarengi dengan upaya pembibitan secara dini serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
35. Pembinaan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa diarahkan pada peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, terpeliharanya kerukunan antar- dan antara umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta meningkatkan kesadaran dan peran serta aktif umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan tanggung jawabnya untuk secara bersama-sama memperkuat landasan spiritual, moral, dan etik bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila
 36. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, termasuk kalangan akademisi dan pengusaha, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya ketangguhan dan keunggulan bangsa. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi harus ditunjang oleh kemampuan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan teknik produksi, teknologi, ilmu pengetahuan terapan dan ilmu pengetahuan dasar secara seimbang dalam hubungan yang dinamis dan efektif antara pembinaan sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta rekayasa dan produksi barang dan jasa. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi terus ditingkatkan dan diarahkan untuk menaikkan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup bangsa yang harus selaras dengan nilai-nilai agama, nilai luhur budaya bangsa, kondisi sosial budaya, dan lingkungan hidup. Pembangunan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu ditingkatkan untuk mencapai produktivitas, efisiensi, dan efektivitas penelitian dan pengembangan yang lebih tinggi dalam rangka pemanfaatan dan penguasaan teknologi yang memberikan nilai tambah serta memberikan pemecahan masalah konkret dalam pembangunan.
 37. Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum dalam rangka pembangunan negara hukum, untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku yang mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan

dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur, serta penyelenggaraan pembangunan nasional yang makin lancar.

38. Kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan semangat kekeluargaan, gotong-royong, dan kebersamaan merupakan syarat mudah bagi mantapnya stabilitas kehidupan politik diarahkan pada pembaharuan kehidupan politik untuk meningkatkan fungsi infrastruktur dan suprastruktur politik serta interaksi secara terbuka antar dan antara keduanya sesuai dengan demokrasi Pancasila; meningkatkan dan mengembangkan kesadaran politik rakyat; meningkatkan kemampuan, kualitas, dan kemandirian infrastruktur politik; meningkatkan peran serta seluruh masyarakat dalam kehidupan politik; mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan budaya politik melalui upaya pemahaman dan pengamalan moral, etika dan sikap politik berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
39. Pembangunan otonomi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk lebih mengembangkan dan memacu pembangunan daerah, memperluas peran serta masyarakat, serta lebih meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dengan memperhatikan kemungkinan pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah dan secara saling mendukung dengan kemampuan nasional. Pelaksanaan otonomi daerah ditujukan pada perwujudan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.
40. Politik luar negeri bebas aktif terus ditingkatkan dan diabdikan untuk kepentingan nasional. Upaya untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia dan turut mewujudkan tata dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial terus ditingkatkan melalui kerja sama di berbagai forum internasional, baik regional maupun internasional terutama di antara negara-negara nonblok. Kerja sama antara negara anggota ASEAN perlu terus ditingkatkan dan diperluas dalam rangka memperkuat ketahanan regional yang didukung oleh dan memberi dampak kepada ketahanan nasional masing-masing negara anggota menuju terwujudnya kawasan Asia Tenggara yang damai, bebas, netral, dan sejahtera.
41. Pembangunan aparatur negara diarahkan untuk mewujudkan aparatur negara yang andal serta mampu melaksanakan keseluruhan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembangunan dengan efisien, efektif, dan terpadu, yang didukung oleh aparat negara yang profesional, bertanggung jawab, dan keadilan. Pendayagunaan aparatur negara terus ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan kualitas, efisiensi pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat serta kemampuan profesional dan kesejahteraan aparatnya.

42. Pembangunan penerapan, komunikasi, dan media massa diarahkan pada terlaksananya pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemasyarakatan dasar pemikiran dan pelaksanaan pembangunan nasional serta hasil-hasilnya yang berwawasan nusantara dan berketahanan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan peran serta rakyat dalam pembangunan, memperlancar keterpaduan gerak pembangunan di segala bidang, serta mendukung kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa
43. Pembangunan pertahanan keamanan negara mulai diarahkan pada pembangunan segenap komponen pertahanan keamanan negara yang terus dilanjutkan sesuai dengan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dengan ABRI sebagai kekuatan inti dengan daya tangkal yang tangguh serta mampu memelihara stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, dengan senantiasa terus mewaspadaikan perkembangan lingkungan strategis. Dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sehingga perlu diusahakan dengan penumbuhan dan pembudayaan rasa cinta pada tanah air yang dilandasi keyakinan akan kebenaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui kegiatan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Hakikat kemandirian ABRI-rakyat harus terus ditanamkan ke dalam jiwa dan sanubari seluruh prajurit dan rakyat Indonesia agar terwujud kekuatan pertahanan keamanan negara yang andal dengan ketahanan mental ideologi yang tangguh.
44. Pembangunan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan inti dalam pertahanan keamanan perlu terus ditingkatkan kemampuan dan kualitas profesionalnya baik sebagai kekuatan pertahanan keamanan maupun sebagai kekuatan sosial politik. Dwifungsi ABRI perlu terus dimasyarakatkan secara luas dengan memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan sejarah perjuangan ABRI dalam perjuangan nasional.
45. Pembangunan komponen pendukung kekuatan pertahanan keamanan negara yang meliputi sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional, termasuk industri strategis, terus dikembangkan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat didayagunakan secara nasional. Pembinaan wilayah negara dan yurisdiksi nasional yang bertumpu pada kondisi geografis Indonesia yang sarwanusantara ditujukan pada pengembangan kemampuan aparat keamanan, penyediaan sarana dan prasarana penegak hukum terutama di laut, serta penataan penyelenggaraan penegak kedaulatan nasional yang lebih terpadu.

EKONOMI

1. Industri

- a. Pembangunan industri diarahkan untuk menuju kemandirian perekonomian nasional, meningkatkan kemampuan bersaing, dan menaikkan pangsa pasar dalam negeri dan pasar luar negeri dengan selalu memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pembangunan industri ditujukan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional dengan ketertiban yang kuat dan saling mendukung antar sektor meningkatkan daya tahan perekonomian nasional, memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha sehingga mendorong berkembangnya kegiatan berbagai sektor pembangunan lainnya. Pengembangan industri nasional termasuk kegiatan rancang bangun dan rekayasa dimantapkan dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia, memanfaatkan keunggulan komparatif dan menciptakan keunggulan kompetitif dengan selalu memperhatikan dampaknya bagi stabilitas ekonomi sehingga mampu bersaing di pasar dalam negeri dan pasar luar negeri. Industri nasional diarahkan untuk lebih banyak menggunakan kemampuan rancang bangun dan rekayasa, bahan baku, komponen, dan bahan penolong buatan dalam negeri.
- b. Pembangunan industri dikembangkan secara bertahap dan terpadu melalui peningkatan keterkaitan antara industri dan antar sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya, terutama dengan sektor ekonomi yang memasok bahan baku industri, melalui penciptaan iklim yang lebih merangsang bagi penanaman modal dan penyebaran pembangunan industri di berbagai daerah terutama di kawasan timur Indonesia sesuai dengan potensi masing-masing dan sesuai dengan pola tata ruang terciptanya iklim usaha yang dapat memantapkan usaha serta demi terciptanya iklim usaha yang dapat memantapkan pertumbuhan industri nasional, maka perluasan usaha industri yang mengarah pada pemusatan kekuatan industri dalam berbagai bentuk monopoli yang merugikan masyarakat perlu dicegah.
- c. Pembangunan industri yang mempunyai nilai tambah yang tinggi dan jangkauan strategis, seperti industri maritim, industri transportasi darat, industri penerbangan dan dirgantara, industri telekomunikasi, industri elektronika, industri energi, industri kimia, industri alat dan mesin pertanian, industri pertahanan kemanan, serta industri yang menghasilkan mesin dan peralatan industri perlu didorong perkembangannya agar menjadi lebih efisien dan mampu bersaing baik di tingkat regional maupun global melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemampuan pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, didukung oleh upaya

- peningkatan kerja sama lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- d. Industri penghasil bahan baku, komponen dan bahan penolong terus dikembangkan untuk makin memperdalam struktur industri secara efisien dan mampu bersaing sehingga mengurangi ketergantungan pada impor. Pembangunan agroindustri ditingkatkan agar mampu menjamin pemanfaatan hasil pertanian secara optimal dengan memberikan nilai tambah yang tinggi melalui pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan teknologi pengolahan dan melalui keterkaitan yang saling menguntungkan antara petani produsen dengan industri. Industri yang mengolah bahan mentah dan hasil tambang lainnya terus ditingkatkan dalam rangka peningkatan nilai tambahnya.
- e. Industri rancang bangun dan rekayasa serta jasa konstruksi perlu dibina dan dikembangkan kemampuannya serta ditingkatkan efisien dan daya saingnya melalui peningkatan tenaga kerja yang profesional dan penciptaan iklim usaha yang dapat menumbuhkan usaha industri rancang bangun dan rekayasa serta jasa konstruksi sehingga makin mampu berperan dalam pembangunan nasional serta dalam penyebaran dan pemerataan pembangunan di seluruh tanah air dan makin mampu memanfaatkan baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
- f. Industri kecil dan menengah termasuk industri kerajinan dan industri rumah tangga perlu lebih dibina menjadi usaha yang makin efisien dan mampu berkembang mandiri, meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan makin mampu meningkatkan peranannya dalam penyediaan barang dan jasa serta berbagai komponen baik untuk keperluan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Pengembangan industri kecil dan menengah perlu diberi kemudahan baik dalam permodalan, perizinan maupun pemasaran serta ditingkatkan keterkaitannya dengan industri yang berskala besar secara efisien dan saling menguntungkan melalui pola kemitraan dalam usaha untuk meningkatkan peran dan kedudukannya dalam pembangunan industri. Kemampuan dan peranan koperasi dalam pembangunan industri, khususnya industri kecil dan menengah, perlu terus dikembangkan. Dalam pembangunan industri dijaga kelangsungan dan keberadaan industri Kerajinan dan industri rumah tangga serta industri rakyat tradisional lainnya.
- g. Untuk mendorong penemuan, inovasi, serta peningkatan mutu dan efisien industri nasional, perlindungan hak milik intelektual, hasil penelitian dan pengembangan industri, dan standarisasi perlu

disempurnakan dan dimasyarakatkan. Masyarakat perlu didorong untuk meningkatkan kecintaan akan produksi dalam negeri.

2. Pertanian

- a. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan nelayan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta mengisi dan memperluas pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri, melalui pertanian yang maju, efisien, dan tangguh sehingga makin mampu meningkatkan dan menganeekaragamkan hasil, meningkatkan mutu dan derajat pengolahan produksi, dan menunjang pembangunan wilayah Penataan tata ruang perlu dilaksanakan agar perkembangan sektor industri, permukiman dan prasarana jalan tidak mengurangi lahan pertanian yang produktif. Keikutsertaan petani, peternak, dan nelayan dalam pembangunan pertanian melalui koperasi dan kelompok tani perlu lebih ditingkatkan. Usaha pertanian besar didorong untuk ikut serta dalam meningkatkan kegiatan koperasi dan membantu pengembangan usaha pertanian rakyat termasuk hasil produksinya
- b. Usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi, dan rehabilitasi pertanian perlu dilanjutkan dan ditingkatkan dengan perencanaan dan penyelenggaraan yang makin terpadu dan disesuaikan dengan kondisi tanah, air, dan iklim, pola tata ruang, upaya pelestarian lingkungan hidup, pembangunan sektor lain, serta kehidupan dan kebutuhan masyarakat setempat. Usaha tersebut juga dikembangkan dengan memperhatikan dan didukung sepenuhnya oleh peran serta aktif petani. Sejalan dengan itu makin ditingkatkan pula kemampuan dalam pengelolaan usaha pertanian terutama yang dikaitkan dengan usaha agroindustri dan agribisnis untuk makin memperlancar keanekaragaman produksi serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian. Untuk menjamin keseimbangan pembangunan pertanian, usaha penelitian dan pengembangan teknologi pertanian yang sesuai dengan kebutuhan petani perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Kemampuan para petani dalam penerapan dan penguasaan teknologi pertanian harus ditumbuhkan melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan.
- c. Pembangunan pertanian tanaman pangan terus ditingkatkan untuk memelihara kemandirian swasembada pangan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan memperbaiki keadaan gizi melalui penganeekaragaman jenis bahan pangan. Peningkatan produksi tanaman pangan dilaksanakan antara lain melalui peningkatan pemanfaatan lahan kering, pekarangan dan rawa dengan didukung oleh peningkatan pemanfaatan

ilmu pengetahuan dan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana yang makin memadai, penanganan pascapanen yang makin efisien dan kebijaksanaan harga yang sesuai.

- d. Pembangunan perkebunan dilanjutkan untuk meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan industri dalam negeri melalui peremajaan, rehabilitasi, perbaikan mutu tanaman, penganeekaragaman jenis dan pemanfaatan lahan transmigrasi perkebunan, lahan kering, dan rawa yang ditangani secara lebih intensif dalam sistem agribisnis yang terpadu dengan agroindustri melalui keterkaitan yang saling menguntungkan antara petani produsen dengan industri, didukung oleh pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penyediaan serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Pembangunan perkebunan dan rehabilitasi perkebunan terlantar dilaksanakan dengan pola perusahaan inti rakyat dan pola swasembada dengan mengikutsertakan perkebunan negara dan perkebunan besar swasta nasional melalui pengembangan kelembagaan koperasi petani perkebunan, dengan perhatian khusus diberikan pada usaha perlindungan dan pengembangan perkebunan rakyat yang didukung oleh kemudahan pendanaan dan pemasaran.
- e. Pembangunan perikanan dilanjutkan dan lebih diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan dan memajukan kualitas kehidupan desa pantai melalui peningkatan dan diversifikasi produksi ikan guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta meningkatkan nilai ekspor. Agribisnis perikanan dikembangkan melalui pola perikanan inti rakyat dengan memperkuat koperasi, melalui pengembangan serta penerapan teknologi maju dalam berbagai usaha budidaya ikan di daerah pantai dan daerah lepas pantai. Kegiatan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif perlu diatur melalui pola pengusahaan yang menjamin penerimaan sebesar-besarnya bagi negara. Perhatian khusus perlu diberikan pada koperasi bersamaan dengan usaha perlindungan dan pengembangan perikanan rakyat serta peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan dan memajukan kehidupan masyarakat desa pantai.
- f. Pembangunan peternakan terus dilanjutkan melalui peningkatan usaha diversifikasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi temak, didukung oleh usaha pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perhatian khusus perlu diberikan pada pengembangan peternakan rakyat dengan meningkatkan peranan koperasi serta keikutsertaan swasta. Pembangunan peternakan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan

petani peternak, mendorong diversifikasi pangan dan perbaikan mutu gizi masyarakat, serta mengembangkan ekspor.

- g. Pembangunan pertanian hortikultura yang meliputi tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan ditumbuhkembangkan menjadi agribisnis dalam rangka memanfaatkan peluang dan keunggulan komparatif berupa iklim yang bervariasi, tanah yang subur, tenaga kerja yang banyak, serta lahan yang tersedia. Produk hortikultura ditumbuhkembangkan terutama melalui koperasi, agar mampu mencukupi kebutuhan pasar dalam negeri termasuk agroindustri serta memenuhi kebutuhan pasar luar negeri.
- h. Usaha pertanian berskala besar yang menghasilkan produk pertanian yang mampu bersaing di pasar dalam negeri dan di pasar luar negeri terus didorong perkembangan dan keterkaitannya yang saling menunjang dan saling menguntungkan dengan usaha pertanian rakyat dan koperasi dengan senantiasa memperhatikan kelestarian daya dukung sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup.
- i. Penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk bioteknologi dan penyebarannya perlu dilanjutkan dan diintensifikan dengan koordinasi lintas sektoral yang mantap. Mutu lembaga penelitian, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan pertanian terus ditingkatkan dan dikembangkan, serta diarahkan pada peningkatan kemampuan masyarakat petani untuk mengelola dan mengembangkan usaha taninya.
- j. Rehabilitasi tanah kritis ditingkatkan untuk memulihkan dan mempertahankan kesuburan tanah, memelihara sumber air dan kelestarian fungsinya dan kemampuan daya dukung lingkungan serta fungsi lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan mengikutsertakan dan memberi manfaat bagi masyarakat setempat. Pembangunan pertanian perlu didukung oleh pengaturan tata ruang dan tata guna lahan sehingga pemanfaatan tanah subur diprioritaskan untuk lahan pertanian. Penggunaan, penguasaan, pemilikan, dan pengalihan hak atas lahan harus dapat menjamin kelangsungan usaha pertanian. Pemilikan lahan pertanian oleh perseorangan secara berlebihan, pemilikan lahan pertanian yang sangat kecil, dan penguasaan lahan secara absenti dan diterlantarkan perlu dicegah agar terjaga fungsi tanah sebagai faktor produksi dan sumber kehidupan yang layak bagi petani.
- k. Pembangunan pengairan dilanjutkan dengan perluasan jaringan irigasi untuk lebih menyeimbangkan pemanfaatan air dan usaha konservasi, melindungi areal produksi dan menghindarkan kerusakan akibat banjir

dan kekeringan, serta mendukung pembukaan dan pemanfaatan areal pertanian baru dan penyediaan air bagi masyarakat. Pembangunan pengairan untuk pertanian perlu ditingkatkan untuk memelihara tetap berfungsinya sumber air dan jaringan irigasi bagi pertanian. Pembangunan pengairan juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk permukiman, industri dan pengembangan kelistrikan serta pariwisata. Pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi terus ditingkatkan untuk lebih memantapkan fungsinya melalui peran aktif masyarakat baik secara swadaya maupun dengan bantuan pemerintah, terutama bagi irigasi tersier dan kuarter. Perlu diperhatikan pula pemeliharaan, perbaikan dan pengaturan sungai, pengembangan pengairan pasang surut, rawa, pantai dan danau, serta pemanfaatan air tanah dan air hujan. Kemampuan dan peran aktif masyarakat dalam pemeliharaan saluran dan bangunan irigasi tersier dan kuarter secara swadaya serta pengaturan penggunaan air secara lebih efisien perlu digalakkan dan ditingkatkan antara lain melalui peningkatan peranan koperasi, pembinaan kelompok tani pemakai air, serta pengembangan sistem pengelolaan sumber air. Jaringan irigasi dijaga agar tetap berfungsi dan sumber air dipelihara agar air bagi pertanian tetap tersedia secara lestari.

3. Tenaga Kerja

- a. Pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran serta pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada pembentukan tenaga profesional yang mandiri dan beretos kerja tinggi dan produktif. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh dan ditujukan pada peningkatan pembentukan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efisien, efektif, dan berjiwa wirausaha sehingga mampu mengisi, menciptakan, dan memperluas lapangan kerja serta kesempatan usaha. Pengadaan tenaga kerja yang merupakan bagian dari perwujudan kebijaksanaan perencanaan ketenagakerjaan nasional harus mendorong pemerataan kesempatan kerja antar daerah dengan memperhatikan potensi angkatan kerja setempat. Dalam pembangunan ketenagakerjaan perlu dibina dan dikembangkan perbaikan syarat-syarat kerja serta perlindungan tenaga kerja dalam sistem hubungan industrial Pancasila menuju kepada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan didukung oleh organisasi pekerja dan koperasi tenaga kerja yang dipimpin dan dikelola para perkeja itu sendiri secara efisien dan efektif dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya. Penyandang cacat sebagai bagian dari angkatan kerja nasional dibina dan didorong untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

- b. Peningkatan kesadaran akan produktivitas, efisiensi, efektivitas dan kewirausahaan serta etos kerja produktif dilaksanakan melalui berbagai kegiatan motivasi, penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga kerja berdasarkan rencana ketenagakerjaan nasional yang harus terus disempurnakan secara terarah, terpadu, dan menyeluruh. Pembinaan, pendidikan, dan pelatihan tenaga kerja dilaksanakan untuk memajukan nilai-nilai kemanusiaan yang menumbuhkan harkat dan martabat serta harga diri kaum pekerja dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan dilakukan di lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah, serta pemagangan di lingkungan kerja baik industri, pertanian maupun sektor lainnya. Peningkatan kualitas tenaga kerja merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat serta badan usaha yang memakai tenaga kerja diselenggarakan di dalam negeri dan di luar negeri. Kerja sama antara lembaga pendidikan dan pelatihan serta lembaga pendidikan tinggi dengan koperasi, usaha negara, dan usaha swasta serta organisasi pekerja dan lembaga kemasyarakatan perlu dikembangkan.
- c. Perlindungan tenaga kerja yang meliputi hak berserikat dan berunding bersama, keselamatan dan kesehatan kerja, dan jaminan sosial tenaga kerja yang mencakup jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan terhadap kecelakaan, dan jaminan kematian serta syarat-syarat kerja lainnya perlu dikembangkan secara terpadu dan bertahap dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan moneter, kesiapan sektor terkait, kondisi pemberi kerja, lapangan kerja dan kemampuan tenaga kerja. Khusus bagi tenaga kerja wanita perlu diberi perhatian dan perlindungan sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya.
- d. Kebijakan pengupahan dan penggajian didasarkan pada kebutuhan hidup, pengembangan diri dan keluarga tenaga kerja dalam sistem upah yang tidak menimbulkan kesenjangan sosial, dengan mempertimbangkan prestasi kerja dan nilai kemanusiaan yang menumbuhkan rasa harga diri. Pengupahan dan penggajian, kondisi kesehatan, keselamatan kerja wanita serta hubungan industri Pancasila serta syarat-syarat kerja lainnya pelaksanaannya perlu berlaku. Serikat pekerja, sebagai wadah dan badan kolektif dalam perekonomian, demikian pula koperasi tenaga kerja terus dikembangkan agar makin berperan dalam upaya meningkatkan kemampuan profesional, etos kerja produktif serta harkat dan martabat pekerja Indonesia.

- e. Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang pada hakikatnya merupakan ekspor jasa penghasil devisa diselenggarakan dengan efisien dan dengan memberikan kemudahan serta perlindungan yang diperlukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai bagian dari perencanaan ketenagakerjaan nasional dengan tetap memperhatikan harkat dan martabat serta nama baik bangsa dan negara. Penggunaan tenaga kerja asing dilakukan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal serta mendorong alih teknologi.
4. Perdagangan
 - a. Pembangunan perdagangan diarahkan pada terciptanya sistem perdagangan nasional yang makin efisien dan efektif, mampu memanfaatkan dan memperluas pasar serta membentuk harga yang wajar, dan memperkuat kesatuan ekonomi nasional dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara. Pembangunan perdagangan ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi dan daya saing, meningkatkan pendapatan produsen terutama produsen hasil pertanian rakyat dan pedagang melindungi kepentingan konsumen, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, serta meningkatkan penerimaan devisa negara. Pembangunan perdagangan perlu ditunjang oleh sistem komunikasi, sistem transportasi, dan penyebaran informasi pasar yang makin efisien, serta penyederhanaan berbagai pengaturan tata niaga sebagai upaya pencegah persaingan tidak sehat, etatisme, serta berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan rakyat.
 - b. Penyediaan kebutuhan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya serta usaha pemasarannya perlu disesuaikan dengan pola produksi dan konsumsi masyarakat, didukung oleh sistem pembiayaan dan jasa transportasi, baik antar daerah maupun antar pulau, dan jaringan distribusi yang mantap agar terjamin penyebaran barang yang merata dengan harga yang layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat banyak di seluruh wilayah tanah air. Koperasi perlu berperan seluas-luasnya dalam penyediaan kebutuhan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya, di samping usaha negara dan usaha swasta
 - c. Guna mendorong ekspor, khususnya komoditi non migas, upaya peningkatan daya saing dan penerobosan serta perluasan pasar luar negeri terus dikembangkan melalui peningkatan efisiensi produksi, mutu komoditi, jaminan kesinambungan dan ketepatan waktu penyerahan, serta penganekaragaman produk dan pasar, yang didukung oleh penyempurnaan sarana dan prasarana perdagangan termasuk jaringan

informasi pasar, peningkatan promosi serta peningkatan akses pasar melalui kerja sama perdagangan internasional dan regional, baik bilateral maupun multilateral. Berbagai sarana dan prasarana penunjang ekspor terutama perkreditan, perasuransian, lalu lintas keuangan, dukungan perangkat hukum serta pelayanan usaha perlu makin dimantapkan. Dalam pelaksanaan ekspor perlu dibina keterkaitan yang saling menguntungkan antara produsen dan eksportir.

- d. Kebijaksanaan impor untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa khususnya barang modal, bahan baku dan bahan penolong untuk industri diarahkan untuk mendorong pengembangan industri dalam negeri sehingga mampu menghasilkan barang dan jasa dengan mutu dan harga yang bersaing dalam rangka menunjang ekspor dan mendorong penggunaan produksi dalam negeri, dengan selalu memperhatikan keseimbangan neraca perdagangan luar negeri. Perlu pula dilakukan penghematan penggunaan devisa terutama yang digunakan untuk impor barang mewah.
 - e. Kebijaksanaan dan kegiatan perdagangan juga diarahkan untuk mendorong dan membantu pengusaha kecil, golongan ekonomi lemah, termasuk usaha rumah tangga dan usaha informasi serta tradisional sebagai potensi ekonomi rakyat dilaksanakan secara terpadu melalui penciptaan iklim yang mendukung, penyediaan tempat usaha, kemudahan memperoleh kredit serta sumber pembiayaan lainnya, peningkatan penyuluhan dan informasi perdagangan, serta pembinaan kemampuan berusaha dan perlindungan usaha. Kerja sama antara usaha besar, menengah, dan kecil termasuk usaha informal serta tradisional terus didorong perkembangannya dalam usaha kemitraan usaha yang saling mendukung dan saling menguntungkan.
5. Transportasi
- a. Pembangunan transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya politik, dan pertahanan keamanan diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi nasional yang andal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman, dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamikan pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung pola distribusi nasional, serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.

- b. Sistem transportasi nasional ditata dan terus disempurnakan dengan didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga terwujud baik keandalan untuk pelayanan maupun keterpaduan antar dan intramoda transportasi, serta disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, tingkat kemajuan teknologi, kebijaksanaan tata ruang, pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kebijaksanaan energi nasional agar selalu dapat memenuhi kebutuhan pembangunan, tuntutan masyarakat serta kebutuhan perdagangan nasional dan internasional dengan memperhatikan keandalan maupun kelaikan sarana transportasi. Peran serta pihak swasta dan koperasi dalam penyelenggaraan transportasi perlu didorong dan digalakkan melalui penciptaan iklim yang menumbuhkan kompetisi yang sehat dan saling menghidupi, termasuk dalam penyediaan transportasi perintis serta pengembangan jalur transportasi yang strategis. Peran serta swasta dan badan usaha milik negara dalam sistem transportasi internasional baik laut maupun udara harus terus didorong sehingga mampu memperoleh pangsa pasar yang wajar dalam transportasi penumpang dan barang dari dan ke luar negeri. Jasa transportasi yang sangat penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat serta mengabdikan pada kepentingan nasional.
- c. Transportasi ke dan di pedesaan, daerah dan pulau terpencil, daerah transmigrasi, daerah terbelakang, dan daerah perbatasan, terutama di kawasan timur Indonesia, perlu terus dibangun, dikembangkan, dilembagakan, dan ditangani secara khusus dalam rangka menunjang pengembangan wilayah dan agar peningkatan serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih meluas. Di wilayah perkotaan dikembangkan transportasi massal yang tertib, lancar, aman, nyaman, dan efisien agar memberikan daya tarik bagi pengguna jasa transportasi serta agar kemacetan dan gangguan lalu lintas dapat dihindarkan dan kualitas lingkungan hidup dapat dipertahankan.
- d. Pembangunan transportasi darat diarahkan pada pengembangan secara terpadu transportasi jalan raya, kereta api, sungai, danau, dan penyeberangan di seluruh wilayah tanah air sehingga tercipta transportasi darat yang tertib, lancar, aman, nyaman, dan efisien melalui pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan manajemen dan pelayanan, termasuk pembinaan disiplin pengguna jalan, serta kejelasan informasi lalu lintas agar mampu memacu pembangunan di semua sektor dan di daerah.

- e. Pembangunan jalan perlu terus ditumbuhkembangkan dan diserasikan dengan perkembangan transportasi jalan raya, terutama keserasian antar beban dan kepadatan lalu lintas kendaraan dengan kemampuan daya dukung jalan, jaringan jalan di pusat pertumbuhan, pusat produksi dan yang menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasaran. Pembangunan jalan yang membuka daerah terpencil dan mendukung pengembangan permukiman termasuk permukiman transmigrasi terus ditingkatkan. Pembangunan jalan tol bebas hambatan yang mendukung sistem transportasi cepat dikembangkan bersama-sama antara pemerintah dan swasta dengan tetap memperhatikan adanya jalan alternatif yang memadai. Transportasi penumpang dan barang dalam kota, antarkota dan antardaerah dibina dan dikembangkan agar mampu berperan dalam meningkatkan kelancaran arus penumpang dan barang, selaras dengan dinamika pembangunan. Keamanan, ketertiban, dan keselamatan transportasi jalan raya, sehubungan dengan kecanggihan peralatan yang cenderung semakin meningkatkan kecepatan kendaraan, perlu mendapatkan perhatian khusus.
- f. Pembangunan perkeretaapian yang memiliki potensi dan peluang besar dalam sistem transportasi masal yang mengangkut muatan yang berat dalam jumlah yang besar terus ditingkatkan secara optimal dan dimodernisasikan dengan memanfaatkan teknologi yang lebih canggih, dengan jalur jalan kereta api yang tepat dengan kemungkinan perluasannya terutama jalur ganda pada lintasan padat. Penyempurnaan manajemen dan mutu pelayanan makin ditingkatkan agar kereta api dapat diandalkan sebagai transportasi masal yang ekonomis dan aman.
- g. Pembangunan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan dilanjutkan dan ditingkatkan baik sebagai transportasi yang berdiri sendiri maupun sebagai transportasi yang merupakan bagian dari jenis transportasi lain sehingga perannya dalam menunjang pembangunan di berbagai sektor dan daerah termasuk daerah permukiman pembangunan di berbagai sektor dan daerah termasuk daerah permukiman di pedalaman dan daerah terpencil dapat diandalkan. Perhatian khusus perlu diberikan pada upaya pemeliharaan sarana dan prasarana jalur pelayanan sungai, kualitas lingkungan alur transportasi, dan pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- h. Transportasi laut sebagai bagian dari sistem transportasi nasional perlu dikembangkan dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara yang mempersatukan seluruh wilayah Indonesia, termasuk lautan nusantara sebagai satu kesatuan wilayah nasional. Pengembangan transportasi laut harus mampu menggerakkan pembangunan nasional dan

pembangunan daerah, khususnya di kawasan timur Indonesia, dengan mengutamakan keteraturan kunjungan kapal yang dapat mengarahkan tumbuhnya perdagangan dan kegiatan pembangunan umumnya Laut nusantara sebagai lahan usaha kelautan mengharuskan pengutamaan pelayanan nusantara nasional yang mampu menjamin tersedianya pelayanan transportasi laut yang layak dan aman sekaligus menciptakan lapangan kerja.

- i. Pembangunan pelayanan nasional terus ditingkatkan dan diperluas, termasuk penyempurnaan manajemen dan dukungan fasilitas pelabuhan, sehingga transportasi laut makin mampu berperan mendukung pembangunan nasional dan dalam menyalurkan seluruh wilayah tanah air. Armada transportasi laut nasional terus ditumbuhkembangkan dengan dukungan fasilitas pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan kapal yang andal, didukung oleh teknologi yang sesuai agar mampu bersaing dengan pelayanan internasional. Pelayanan dalam negeri dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan kapal berbendera Indonesia. Pelayanan rakyat dan pelayanan perintis dibina dan dikembangkan agar lebih mampu ikut terpencil. Kemampuan pelayanan samudera nasional terus ditingkatkan dengan dukungan yang serasi dengan pembangunan galangan kapal nasional yang efisien, serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana agar mampu memenuhi kebutuhan transportasi barang baik ekspor maupun impor.
- j. Pembangunan transportasi udara termasuk sarana dan prasarananya terus ditingkatkan agar lebih diandalkan dalam memenuhi kebutuhan jasa transportasi udara dalam negeri yang mampu beroperasi secara optimal menjangkau seluruh wilayah nasional dan kebutuhan penerbangan luar negeri yang kompetitif, serta didukung oleh industri pesawat terbang, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan pesawat terbang beserta komponennya yang andal dan efisien. Transportasi udara perintis ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat menjangkau semua daerah dan pulau terpencil terutama yang belum dapat dijangkau dengan jaringan transportasi darat dan laut, didukung peningkatan peran aktif pemerintah daerah dan usaha swasta setempat. Mutu pelayanan transportasi udara terus dikembangkan terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan manajemen usaha termasuk bidang pemasaran. Jangkauan, pola jaringan, armada pesawat terbang, mutu pelayanan, dan daya saing penerbangan nasional rute luar negeri makin ditingkatkan agar dapat memperbesar pangsa pasar, dan arus wisata serta makin mampu berperan untuk memenuhi keperluan jasa transportasi penumpang dan barang dalam lalu lintas internasional.

- k. Jasa meteorologi dan geofisika terus dikembangkan untuk menunjang berbagai sektor pembangunan, khususnya penyediaan informasi cuaca yang diperlukan demi terwujudnya kelancaran dan keselamatan penyelenggaraan transportasi laut dan udara. Kebutuhan informasi cuaca dan geofisika yang terpercaya perlu didukung oleh organisasi, kualitas sumber daya manusia, manajemen, serta sarana dan prasarananya agar mampu menyelenggarakan bantuan penyelamatan dengan cepat dan tepat.
6. Pertambangan
- a. Pembangunan pertambangan diarahkan untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya alam tambang secara hemat dan optimal bagi pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta ditujukan untuk menyediakan bahan baku bagi industri dalam negeri, bagi keperluan energi, dan bagi keperluan masyarakat, serta untuk meningkatkan ekspor, meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan daerah, serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha
 - b. Dalam pembangunan pertambangan, perlu ditingkatkan upaya peningkatan produksi, pengendalian hasil tambang, pengelolaan usaha pertambangan secara efektif dan efisien, didukung oleh usaha inventarisasi dan pemetaan serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan bahan tambang yang makin meningkat dengan menguasai dan memanfaatkan teknologi yang tepat. Pengembangan pertambangan perlu diarahkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dengan mempertimbangkan prinsip penggunaan lahan berganda dan pola tata ruang nasional melalui kebijaksanaan optimal manfaat dari pendayagunaan kekayaan alam.
 - c. Pembangunan pertambangan diselenggarakan secara terpadu dengan pembangunan daerah dan pembangunan berbagai sektor lainnya, terutama yang berkaitan erat dengan perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta pengembangan wilayah dengan selalu memperhatikan kebutuhan masa depan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengetahuan geologi perlu ditingkatkan untuk memperoleh manfaat maksimal dan kemampuan untuk memperkirakan secara tepat bencana alam geologi sehingga dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat.
 - d. Pemanfaatan bahan dan hasil tambang terus dikembangkan melalui peningkatan produksi dan usaha pemasarannya di dalam negeri dan di luar negeri serta pengolahannya perlu didukung oleh industri pengolahan

yang maju agar mampu meningkatkan nilai tambah dan pendapatan negara.

- e. Upaya untuk memproduksi minyak dan gas bumi serta menemukan cadangan baru perlu ditingkatkan, disertai usaha perluasan pemasaran produk hasil pengolahan minyak dan gas bumi dalam rangka peningkatan dan penganekaragaman sumber penerimaan dan devisa negara. Dengan makin terbatasnya cadangan minyak dan gas bumi serta makin sulitnya menemukan ladang baru, upaya penganekaragaman sumber energi perlu makin ditingkatkan, terutama batubara, sehingga ketergantungan pada minyak dan gas bumi makin berkurang.
 - f. Pertambangan rakyat dilindungi, dibina, dan ditingkatkan pengelolannya antara lain melalui pengaturan, penyuluhan, dan pembinaan usaha pertambangan, termasuk usaha koperasi, dalam rangka perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha serta peningkatan pendapatan dan taraf hidup rakyat, khususnya rakyat penambang. Kerja sama pertambangan rakyat dengan usaha pertambangan negara dan swasta besar perlu didorong agar saling menunjang dan saling memperkuat.
 - g. Penanaman modal swasta di sektor pertambangan di luar pertambangan rakyat dan galian strategis, baik modal dalam negeri maupun modal asing terus didorong dan ditingkatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan nasional dan alih teknologi, antara lain melalui penciptaan iklim yang lebih sehat dan menarik bagi penanaman modal.
 - h. Penguasaan teknologi pertambangan, termasuk teknologi eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang baik didarat maupun di dasar laut terus ditingkatkan melalui peningkatan keterampilan dan keahlian di sektor pertambangan.
 - i. Penambangan dan pengelolaan bahan galian yang tidak vital dan tidak strategis harus mengikutsertakan rakyat setempat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - j. Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan upaya reklamasi pascatambang perlu dilaksanakan sejak awal sehingga bekas tambang dapat lebih dimanfaatkan.
7. Kehutanan

- a. Pembangunan kehutanan diarahkan untuk memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi hutan, dan dengan mengutamakan pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup, memelihara tata air serta untuk memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja meningkatkan sumber pendapatan negara dan devisa serta memacu pembangunan daerah. Pengusahaan hutan dan hasil hutan diatur melalui pola pengusahaan hutan yang menjamin penerimaan sebesar-besarnya bagi negara dan diselaraskan dengan kepentingan rakyat yang tinggal dan hidup di wilayah hutan serta diatur bersama pemerintah daerah setempat.
- b. Pengembangan produksi hasil kayu dan nonkayu diselenggarakan melalui upaya peningkatan pengusahaan hutan produksi, hutan rakyat, hutan tanaman industri, dan upaya peningkatan produktivitas hutan alam yang didukung oleh penyediaan bibit tanaman hutan yang unggul dan budidaya kehutanan yang tangguh. Kegiatan produksi hasil hutan dan pemanfaatannya dilanjutkan, disertai usaha penertiban dan pengamanan hutan serta peningkatan penanaman kembali hutan yang rusak. Pengusahaan hutan harus mencegah terjadinya kerusakan hutan dan pengaturan pendayagunaan serta perlindungan hutan perlu ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Hutan sebagai salah satu penentu ekosistem, pengelolaannya ditingkatkan secara terpadu dan berwawasan lingkungan untuk menjaga dan memelihara fungsi tanah, air, udara, iklim, dan lingkungan hidup serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Inventarisasi dan penatagunaan hutan ditingkatkan untuk memantapkan status kawasan hutan, memanfaatkan hutan konversi bagi penyediaan lahan untuk kepentingan pembangunan, serta untuk melestarikan manfaat ekosistem dan keserasian tata lingkungan. Konservasi hutan tanah kering, hutan rawa, dan hutan perairan serta kekhasan alam, termasuk flora dan faunanya, ditingkatkan untuk melindungi plasma nutfah, keanekaragaman hayati, dan ekosistem beserta unsur-unsur, juga untuk mengembangkan cagar alam wisata.
- d. Upaya rehabilitasi hutan dan tanah kritis, konservasi tanah, rehabilitasi sungai, danau, rawa, hutan bakau, pelestarian gua-gua alam, karang laut, flora dan fauna langka serta pengembangan fungsi Daerah Aliran Sungai ditingkatkan dan makin disempumakan. Rehabilitasi lahan kritis untuk memulihkan kesuburan tanah, mata air, dan kelestarian daya dukung lingkungan terus ditingkatkan melalui konservasi tanah dan reboisasi.

- e. Dalam pembangunan kehutanan, keikutsertaan masyarakat di kawasan hutan dan sekitarnya termasuk masyarakat transmigrasi kehutanan perlu diberi peluang dan ditingkatkan. Usaha kehutanan besar didorong agar dapat membantupengembangan usaha hutan rakyat dan perajin kayu. Peran serta koperasi terutama di dalam pengolahan dan pemasaran hasil hutan nonkayu perlu ditingkatkan. Pengaturan permukiman masyarakat yang tinggal di hutan dan peladang berpindah perlu disempurnakan.
 - f. Pengusahaan hasil hutan disesuaikan dengan daya dukung sumber daya alamnya agar kelestarian sumber daya hutan terjamin dan kerusakan lingkungan dapat dicegah. Penganekaragaman produk dan produktivitas pengolahan hasil hutan dilanjutkan agar makin mampu menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan kayu untuk perumahan penduduk. Permintaan pasar akan hasil hutan baik di dalam maupun di luar negeri diusahakan dipenuhi melalui industri perkayuan yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan mutu serta harga yang bersaing.
 - g. Pembangunan kehutanan perlu didukung dengan kegiatan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan, peraturan perundang-undangan, penyediaan informasi, serta penelitian dan pengembangan. Peranan dan mutu kelembagaan kehutanan baik pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya terus ditingkatkan. Penyuluhan kehutanan lebih diutamakan pada peningkatan kemampuan dan peran serta masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dalam bentuk perhutanan sosial.
8. Usaha Nasional
- a. Pengembangan dan pembinaan usaha nasional yang meliputi koperasi, usaha negara, dan usaha swasta diarahkan agar tumbuh menjadi kegiatan usaha yang mampu menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja menuju terwujudnya perekonomian nasional yang tangguh dan mandiri. Dalam rangka pengembangan dan pembinaan usaha nasional terus didorong perluasan kerja sama dan keterkaitan usaha antarsektor dan antar subsektor, antara usaha skala besar, menengah, dan kecil, berdasar kemitraan usaha yang saling menunjang dan saling menguntungkan, dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Usaha nasional terus dibina dan dikembangkan agar makin berperan dalam mendorong perkembangan pasar dalam negeri dan meningkatkan daya beli rakyat serta makin mampu bersaing untuk melakukan terobosan pasar internasional

sehingga makin mampu menghadapi arus globalisasi dan regionalisasi perekonomian dunia. Kerja sama usaha terutama dalam kegiatan investasi, perdagangan, dan pariwisata di lingkungan negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik terus ditingkatkan secara menguntungkan dan diabdikan kepada kepentingan nasional.

- b. Dalam pengembangan usaha nasional harus dicegah pengusahaan sumber ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok atau golongan masyarakat tertentu dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat. Kerja sama antar koperasi, usaha negara, dan usaha swasta perlu lebih ditingkatkan dan dikembangkan. Badan usaha yang sudah berkembang dan berhasil harus didorong untuk membantu usaha ekonomi yang belum maju dalam meningkatkan kemampuan usaha ekonominya. Koperasi didorong untuk meningkatkan kerja sama antar koperasi dan memperkuat jaringan usahanya sehingga mampu berkembang menjadi usaha berskala besar yang lebih efisien dan produktif. Badan usaha milik negara terutama yang kegiatannya menyangkut kepentingan negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, perlu makin ditingkatkan efisiensi dan produktivitasnya.
- c. Kemampuan dan peranan usaha kecil dikembangkan dengan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana usaha disertai dengan pengembangan iklim yang mendukung, termasuk penyederhanaan perizinan, menyediakan kemudahan dalam melakukan investasi, memperoleh permodalan dan kesempatan usaha, juga kemudahan dalam memperoleh pendidikan, pelatihan dan bimbingan manajemen, serta alih teknologi. Teknologi yang telah dikuasai secara turun-temurun dan padat karya atau mempunyai ciri seni budaya daerah yang khas yang dimiliki oleh usaha kecil perlu memperoleh pengembangan dan perlindungan.
- d. Kewirausahaan di kalangan generasi muda, koperasi dan golongan ekonomi lemah perlu terus dipupuk dan dikembangkan melalui peningkatan kemampuan berproduksi, berusaha dan bekerja sama serta kemampuan menciptakan daya saing dalam pemasaran hasil produksi dan jasa. Pemberian berbagai bimbingan teknis dan informasi pasar perlu dilanjutkan agar koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah makin mampu memanfaatkan setiap peluang usaha yang mempercepat kemandirian dan memiliki kepribadian yang tangguh sebagai wiraswasta.
- e. Untuk menunjang usaha nasional, penanaman modal oleh masyarakat perlu lebih digalakkan, terutama penanaman modal dalam negeri.

Penanaman modal asing masih diperlukan dan didorong untuk mendukung pembangunan di berbagai kegiatan yang belum mampu sepenuhnya dilaksanakan dengan modal dalam negeri, terutama yang menghasilkan barang modal, bahan baku, dan komponen sebagai substitusi impor, barang jadi, dan barang setengah jadi guna menciptakan kesempatan usaha dan lapangan kerja, meningkatkan ekspor, dan mendorong alih teknologi. Proses indonesianisasi penanaman modal asing perlu terus dilakukan secara terarah dan bertahap.

- f. Usaha informasi dan tradisional sebagai bagian ekonomi rakyat yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat serta merupakan kegiatan ekonomi nyata yang makin luas, perlu terus dibina dan dilindungi agar tumbuh menjadi unsur kekuatan ekonomi yang andal, mandiri, dan maju serta mampu berperan dalam menciptakan kesempatan usaha dan lapangan kerja. Pembinaan usaha ekonomi rakyat diutamakan pada pengembangan kewiraswastaan, penyediaan sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan penyuluhan, serta permodalan agar dapat meningkatkan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Pariwisataa

- a. Pembangunan Kepariwisataan diarahkan pada peningkatan periwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lain yang terkait, sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah, dan pendapatan negara, serta penerimaan devisa meningkat melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan nasional.
- b. Dalam pembangunan kepariwisataan harus dijaga tetap terpeliharanya kepribadian bangsa serta kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup. Kepariwisataan perlu ditata secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan sektor lain yang terkait dalam suatu keutuhan usaha kepariwisataan yang saling menunjang dan saling menguntungkan, baik yang berskala kecil, menengah, maupun besar.
- c. Pengembangan pariwisata nusantara dilaksanakan sejalan dengan upaya memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa, serta menanamkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka lebih memperkuat persatuan dan kesatuan nasional, terutama dalam bentuk penggalakan pariwisata remaja dan pemuda dengan lebih meningkatkan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kepariwisataan. Daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan wisata mancanegara perlu ditingkatkan melalui upaya pemeliharaan benda dan khazanah bersejarah yang menggambarkan ketinggian budaya dan kebesaran bangsa, serta didukung dengan promosi yang memikat.
- d. Upaya mengembangkan objek dan daya tarik wisata serta kegiatan promosi dan pemasarannya, baik di dalam maupun di luar negeri terus ditingkatkan secara terencana, terarah, terpadu, dan efektif antara lain dengan memanfaatkan secara optimal kerja sama kepariwisataan regional dan global guna meningkatkan hubungan antar bangsa
- e. Pendidikan dan pelatihan kepariwisataan perlu makin ditingkatkan, disertai penyediaan sarana dan prasarana yang makin baik, dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk menjamin mutu dan kelancaran pelayanan serta penyelenggaraan pariwisata.
- f. Kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan perlu makin ditingkatkan melalui penyuluhan dan pembinaan kelompok seni budaya, industri kerajinan, serta upaya lain untuk meningkatkan kualitas kebudayaan dan daya tarik kepariwisataan Indonesia dengan tetap menjaga nilai-nilai agama, citra kepribadian bangsa, serta harkat dan martabat bangsa. Dalam upaya pengembangan usaha

kepariwisataan, harus dicegah hal-hal yang dapat merugikan kehidupan masyarakat dan kelestarian kehidupan budaya bangsa. Dalam pembangunan kawasan pariwisata keikutsertaan masyarakat setempat terus ditingkatkan.

10. Pos dan Telekomunikasi

- a. Pembangunan pos dan telekomunikasi diarahkan untuk mendukung peningkatan pembangunan nasional dengan makin memperlancar arus surat, barang, dan informasi serta makin memperluas jangkauan jasa ke seluruh pelosok tanah air dan keluar negeri, serta ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, efisiensi, dan keandalannya dalam pemberian jasa komunikasi, informasi, pos dan giro kepada masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
- b. Pembangunan pos terus ditingkatkan supaya jangkauan jasa pos dan giro makin luas dan makin memasyarakat serta dapat mencapai desa dan daerah terpencil, termasuk daerah perbukitan transmigrasi, agar masyarakat luas memperoleh pelayanan yang mampu menjamin terselenggaranya arus surat, barang, dan jasa giro yang lancar, cepat, dan aman.
- c. Telekomunikasi terus dikembangkan menjadi wahana yang dapat diandalkan untuk terselenggaranya arus berita, informasi, dan data baik nasional maupun internasional secara lancar, jelas dan cepat guna mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan, jaringan dan jangkauan telekomunikasi terus diperluas dengan menggunakan teknologi maju dan sesuai, serta meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanannya. Fasilitas telekomunikasi umum terus dikembangkan di seluruh pelosok tanah air sehingga makin tersebar dan menjangkau masyarakat luas.
- d. Pembangunan pos dan telekomunikasi harus didukung oleh peningkatan kemampuan sumber daya manusia serta oleh pemanfaatan, penguasaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan serta pengembangan industri sarana pos dan industri telekomunikasi nasional.
- e. Kerja sama internasional pos dan telekomunikasi terus ditingkatkan terutama dalam rangka memperlancar arus barang dan informasi mempererat hubungan antar bangsa, serta meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

11. Koperasi

- a. Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Koperasi sebagai badan usaha yang makin mandiri dan andal harus mampu memajukan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjadi sokoguru perekonomian nasional yang tangguh. Koperasi di pedesaan perlu dikembangkan mutu dan kemampuannya, dan perlu makin ditingkatkan perannya dalam kehidupan ekonomi di pedesaan.
- b. Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Peran aktif masyarakat dalam menumbuhkembangkan koperasi terus ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran, kegairahan, dan kemampuan berkoperasi di seluruh lapisan masyarakat melalui upaya penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan. Fungsi dan peranan koperasi juga menjadi tanggung jawab lembaga gerakan koperasi sebagai wadah perjuangan kepentingan dan pembawa aspirasi gerakan koperasi, bekerja sama dengan pemerintah sebagai pembina dan pelindung.
- c. Pengembangan koperasi didukung melalui pemberian kesempatan berusaha yang seluas-luasnya di segala sektor kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan penciptaan iklim usaha yang mendukung dengan kemudahan memperoleh permodalan. Untuk mengembangkan dan melindungi usaha rakyat yang diselenggarakan dalam wadah koperasi demi kepentingan rakyat, dapat ditetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi. Kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi agar tidak dimasuki oleh badan usaha lainnya dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional dalam rangka pemerataan kesempatan usaha dan kesempatan kerja.
- d. Kerja sama antar koperasi dan antar koperasi dengan usaha negara dan usaha swasta sebagai mitra usaha dikembangkan secara lebih nyata untuk mewujudkan kehidupan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang dijiwai semangat dan asas kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan usaha, dan kesetiakawanan, serta saling mendukung dan saling menguntungkan. Potensi koperasi untuk tumbuh menjadi usaha skala besar terus ditingkatkan antara lain melalui perluasan jaringan

usaha koperasi, pemilikan saham, keterkaitan dengan usaha hulu dan usaha hilir baik dalam usaha negara maupun usaha swasta

12. Pembangunan Daerah

- a. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah, antar dan antara kota dan desa, antar sektor, serta pembukaan dan percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, daerah terpancill, daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan, dan daerah terbelakang lainnya, yang disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah bersangkutan sehingga terwujud pola pembangunan yang merupakan perwujudan Wawasan Nusantara. Peran aktif masyarakat dalam pembangunan perlu lebih dikembangkan melalui pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada daerah, khususnya daerah otonom. Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antar pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air.
- b. Kerja sama antar daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pengembangan wilayah didorong dan ditingkatkan agar berbagai daerah dapat tumbuh secara serasi dan mampu memecahkan masalah yang terdapat di wilayah dan daerah secara bersama. Kemampuan daerah untuk melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan ditingkatkan melalui pendayagunaan sumber daya alam dan pembinaan sumber daya manusia yang terdapat di daerah yang bersangkutan secara berencana, terpadu, dan dengan memperhatikan saling ketergantungan dengan daerah lain dalam rangka pembangunan nasional.
- c. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, prakarsa dan peran aktif masyarakat beserta lembaga perencanaan daerah ditingkatkan, pengawasan dan koordinasi pembangunan makin dimantapkan, serta fungsi lembaga perwakilan daerah lebih didayagunakan sebagai perwujudan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Kemampuan manajemen pembangunan seluruh aparat pemerintah daerah ditingkatkan untuk lebih mendayagunakan potensi daerah dan makin mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.
- d. Pembangunan desa dan masyarakat perdesaan terus didorong melalui peningkatan koordinasi dan peningkatan pembangunan sektoral,

pengembangan kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan penumbuhan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat dan desa swakarsa menuju desa swasembada. Kemampuan masyarakat desa untuk berproduksi dan memasarkan hasil produksinya perlu didukung dan ditingkatkan melalui penataan kelembagaan dan perluasan serta diversifikasi usaha agar makin mampu mengarahkan dan memanfaatkan dana dan daya bagi peningkatan pendapatan dan taraf hidupnya. Pembangunan berbagai sarana dan prasarana perekonomian termasuk koperasi dan lembaga keuangan ditingkatkan agar mampu berperan serta dalam pengembangan ekonomi rakyat serta makin meningkatkan swadaya masyarakat perdesaan dalam pembangunan.

- e. Pembangunan perkotaan ditingkatkan dan diselenggarakan secara berencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana umum tata ruang, pertumbuhan penduduk, lingkungan permukiman, lingkungan usaha dan lingkungan kerja, serta kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial lainnya agar terwujud pengelolaan perkotaan yang efisien dan tercipta lingkungan yang sehat, rapi, aman, dan nyaman. Perhatian khusus perlu diberikan pada peningkatan sarana dan prasarana umum yang layak. Keserasian hubungan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan serta antar masyarakat kota terus diupayakan agar terwujud keserasian kehidupan masyarakat dalam segala aspek kehidupannya.
- f. Penataan penguasaan tanah oleh negara diarahkan agar pemanfaatannya dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan penataan penggunaan tanah dilaksanakan secara berencana guna mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Penataan penggunaan tanah perlu memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah pertanian dan perkotaan, serta pencegahan penelantaran tanah, termasuk berbagai upaya untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat. Kelembagaan pertanahan disempurnakan agar makin terwujud sistem pengelolaan pertanahan yang terpadu, serasi, efektif dan efisien, yang meliputi tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan serta tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Kegiatan pengembangan administrasi pertanahan perlu ditingkatkan dan ditunjang dengan perangkat analisis dan perangkat informasi pertanahan yang makin baik.
- g. Penataan kembali batas wilayah dan daerah dalam rangka pemekaran dan penyesuaian status daerah tertentu perlu terus dilanjutkan untuk

meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah dan administrasi pemerintahan daerah.

www.tatanusa.co.id

13. Kelautan

- a. Pembangunan kelautan diarahkan pada pendayagunaan sumber daya laut dan dasar laut serta pemanfaatan fungsi wilayah laut nasional, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif secara serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung kelautan dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja. Pembangunan wilayah laut nasional juga dilaksanakan untuk mendukung penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional serta perwujudan Wawasan Nusantara.
- b. Pengusahaan potensi kelautan menjadi berbagai kegiatan ekonomi perlu dipacu melalui peningkatan investasi, khususnya di kawasan timur Indonesia, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup agar mampu memberikan sumbangan lebih besar pada upaya pembangunan nasional. Sarana dan prasarana kelautan terus ditingkatkan agar laut memenuhi fungsinya sebagai media penghubung pemersatu bangsa, dan lahan penghidupan rakyat serta lebih berperan dalam segenap aspek kehidupan bangsa. Industri kelautan antara lain industri transportasi, perkapalan, dan industri lepas pantai dan pariwisata, didorong dan digalakkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat maritim. Industri perikanan dan budidaya laut lainnya perlu terus ditingkatkan baik sarana, prasarana maupun sumber daya manusianya sehingga potensi biota lautnya dapat dimanfaatkan guna kepentingan pembangunan dengan tetap memperhatikan kelestarian daya dukungnya. Eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut dan dasar laut dan segala isi yang ada didalamnya ditingkatkan dan diselenggarakan secara optimal, disertai rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi sesuai dengan daya dukungnya. Pengusahaan potensi kelautan dengan investasi skala besar baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing harus menjamin pendapatan sebesar-besarnya bagi negara.
- c. Data dan informasi kelautan terus digali, dikumpulkan, dan diolah melalui peningkatan kegiatan survei dan penelitian dalam rangka inventarisasi kekayaan laut. Pemetaan dasar lautan nusantara terus ditingkatkan karena diperlukan untuk mendayagunakan potensi kelautan nusantara di samping fungsinya yang strategis bagi pemeliharaan stabilitas dan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

- d. Pemupukan jiwa bahari melalui pengenalan, pemahaman, kesadaran, dan kecintaan masyarakat pada laut terus ditingkatkan agar keinginan dan keyakinan untuk mendayagunakan potensi kelautan makin tumbuh dan berkembang. Pendidikan dan pelatihan kelautan ditingkatkan dan diperluas agar menghasilkan tenaga ahli dan kejuruan serta tenaga terampil yang diperlukan untuk dapat mewujudkan potensi kelautan nasional menjadi kekuatan ekonomi yang nyata dan andal.
 - e. Organisasi dan kelembagaan kelautan perlu dikembangkan agar makin terwujud sistem pengelolaan yang terpadu, serasi, efektif, dan efisien sehingga mampu memberikan pelayanan dan dorongan berbagai kegiatan ekonomi di sektor kelautan.
 - f. Dalam upaya mempertahankan daya dukung dan kelestarian laut perlu ditingkatkan pencegahan pencemaran laut melalui upaya pembinaan serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum.
14. Kedirgantaraan.
- a. Pembangunan kedirgantaraan yang merupakan matra dan wahana kehidupan berupa wilayah dirgantara nasional yang merupakan wilayah yurisdiksi nasional dan terdiri atas udara sebagai wilayah kedaulatan dan antariksa diarahkan pada penegakan kedaulatan dan pendayagunaan keunggulan komparatif wilayah dirgantara. Pembangunan kedirgantaraan ditujukan pada perjuangan memperoleh pengakuan internasional atas hak penggunaan wilayah dirgantara nasional dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan produk dan jasa kedirgantaraan.
 - b. Kemampuan pemanfaatan wilayah dan sumber daya dirgantara, termasuk frekuensi gelombang radio, perlu dikembangkan melalui penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penggunaan sumber daya yang terdapat di udara untuk keperluan energi, pertanian dan industri, pembangun industri dirgantara, pemanfaatan udara sebagai media transportasi, pemanfaatan kawasan antariksa untuk penempatan satelit, penyediaan jasa kedirgantaraan, penginderaan jarak jauh, survei dan pemetaan udara, serta prakiraan cuaca, dan untuk keperluan navigasi dan telekomunikasi dengan memperhatikan aspek pertahanan keamanan negara serta pengamanan terhadap pencemaran udara.
 - c. Pendidikan dan pelatihan kedirgantaraan terus ditingkatkan dan diperluas secara intensif, terarah, dan terpadu serta diselenggarakan sesuai dengan program yang konkret untuk menghasilkan tenaga

profesional, ahli, dan terampil dalam penelitian dan pengembangan teknologi kedirgantaraan, teknik produksi, serta manajemen.

- d. Organisasi dan kelembagaan kedirgantaraan terus disempurnakan agar makin terwujud sistem pengelolaan yang terpadu, serasi, efektif, dan efisien dalam koordinasi dan pengendalian pemerintah sehingga mampu memberikan pelayanan dan dorongan bagi berbagai kegiatan ekonomi di sektor kedirgantaraan. Kerja sama internasional kedirgantaraan baik bilateral maupun multilateral terus dikembangkan, khususnya dalam pengembangan informasi dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan.

15. Keuangan

- a. Pembangunan keuangan diarahkan pada peningkatan kemampuan dan daya guna keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijaksanaan keuangan dalam menunjang kesinambungan pembangunan dan peningkatan kemandirian bangsa melalui peningkatan kemampuan keuangan yang makin andal, efisien, dan mampu memenuhi tuntutan pembangunan, penciptaan suasana yang mendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas masyarakat, serta meluasnya peran serta masyarakat dalam pembangunan dan melalui upaya untuk terus meningkatkan tabungan nasional sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Kebijakan fiskal, moneter, dan neraca pembayaran dilaksanakan secara serasi dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang makin meluas dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis. Kebijakan keuangan harus mendukung dan mengembangkan hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang serasi dalam mencapai keseimbangan pembangunan antar daerah yang mantap dan dinamis.
- b. Kebijakan fiskal tetap didasarkan pada prinsip anggaran berimbang yang dinamis dengan memungkinkan dibentuknya dana cadangan pada masa penerimaan negara melebihi yang direncanakan dan dimanfaatkannya dana cadangan tersebut pada masa penerimaan negara kurang dari yang direncanakan atau tidak cukup mendukung program yang telah direncanakan dan/atau yang sangat mendesak sehingga terjamin kesinambungan pembiayaan yang diiringi oleh stabilitas ekonomi yang mantap. Penerimaan negara terus diupayakan meningkatkannya dengan menggali dan mengembangkan semua sumber penerimaan negara, terutama sumber penerimaan yang berasal dari perpajakan dan sumber lainnya, dengan tetap memperhatikan peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan oleh masyarakat

dan dunia usaha. Pengeluaran negara direncanakan secara cermat berdasarkan prioritas yang tajam untuk memberikan dampak yang sebesar-besarnya bagi pembangunan. Tabungan pemerintah terus diupayakan peningkatannya dalam rangka peningkatan tabungan nasional.

- c. Pengembangan perangkat fiskal yang meliputi perpajakan dan berbagai bentuk pendapatan negara lainnya dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan pemerataan dengan meningkatkan peran pajak langsung sehingga mampu berfungsi sebagai alat untuk menunjang pembangunan dan meningkatkan serta pemeratakan kesejahteraan rakyat. Sistem dan prosedur perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat, dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang tercermin dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab dan dedikasi serta melalui penyempurnaan sistem administrasi.
- d. Kesadaran masyarakat membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab terus ditingkatkan melalui motivasi, penerangan, penyuluhan, pendidikan sejak dini, serta langkah keteladanan. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sebagai kewajiban warga negara perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan aparatur negara kepada pembayar pajak, disertai penerapan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu pula dicegah adanya pajak ganda yang memberatkan kehidupan masyarakat banyak.
- e. Penganggaran negara yang meliputi pendapatan dan belanja negara perlu ditata dalam suatu sistem anggaran yang mampu meningkatkan penyelenggaraan negara, baik tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan. Penganggaran rutin dan pembangunan perlu lebih diserasikan serta dimantapkan menurut perencanaan penganggaran yang berlanjut, bertahap, dan makin meningkat dengan orientasi hasil guna yang maksimal.
- f. Badan usaha milik negara terus ditingkatkan efisiensi dan produktivitasnya sehingga makin mampu berperan dalam pembangunan dan dalam ikut membiayai pembangunan. Investasi badan usaha milik negara dan sumber pembiayaannya dituangkan dalam suatu rencana menyeluruh yang dirumuskan secara cermat dan diserasikan dengan kebijaksanaan fiskal dan moneter sehingga pengelolaan keseimbangan ekonomi makro makin efektif.

- g. Kebijakan moneter diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang makin luas, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas ekonomi yang mantap. Kebijakan moneter yang meliputi kebijaksanaan pengendalian uang beredar, termasuk kebijaksanaan perkreditan pengendalian uang beredar, termasuk kebijaksanaan perkreditan dan kebijaksanaan nilai tukar uang, dilaksanakan secara terpadu untuk memantapkan kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja dengan mengembangkan perangkat moneter dan devisa. Kemantapan nilai uang mendukung terciptanya iklim usaha dan investasi yang sehat, mendorong gairah masyarakat untuk menabung, dan menimbulkan rasa tenteram dalam kehidupan rakyat.
- h. Lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank seperti lembaga pembiayaan dan investasi, pasar modal, asuransi, dana pensiun, sewa guna modal ventura, giro pos, dan pasar uang, lebih ditingkatkan fungsi dan peranannya agar makin mampu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Lembaga keuangan ini harus makin mampu berperan sebagai penggerak dan sarana mobilisasi dana masyarakat yang efektif dan sebagai penyalur yang cermat dari dana tersebut untuk pembiayaan kegiatan yang produktif. Lembaga keuangan yang andal dan dipercaya masyarakat dengan jaringan pelayanan dan jasa perantara ditumbuhkembangkan dan diperluas penyebarannya agar dapat mejangkau seluruh pelosok tanah air serta segenap lapisan masyarakat sehingga mampu mendorong, merangsang, dan menumbuhkan motivasi masyarakat berperan serta dalam pembangunan serta sekaligus meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta keandalannya. Lembaga keuangan membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat dan diberi kepercayaan untuk mengalokasikan dana masyarakat yang terhimpun secara efisien dan efektif bagi masyarakat dengan memberikan prioritas dalam penyediaan dan kemudahan kredit bagi pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan koperasi dalam rangka memeratakan kesempatan usaha dan memperluas lapangan kerja.
- i. Sumber dana dari luar negeri dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi pembangunan nasional sebagai sumber pelengkap pembiayaan pembangunan dan sebagai wahana alih teknologi yang efektif. Penanaman modal asing terus didorong bagi kegiatan ekspor dan kegiatan pembangunan yang belum mampu ditanggulangi dengan modal dan kemampuan teknologi dalam negeri melalui pengembangan iklim yang menarik, prosedur yang sederhana, pelayanan yang lancar, sarana dan prasarana ekonomi yang menunjang, serta peraturan yang

konsisten sehingga memberi jaminan kepastian berusaha dan keamanan investasi. Bantuan luar negeri dan pinjaman luar negeri dimanfaatkan sepanjang tidak ada ikatan politik, tidak memberatkan perekonomian, dan digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif sesuai dengan prioritas dan yang memberikan dampak sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

- j. Pendapatan daerah ditingkatkan melalui penggalian sumber dana asli daerah, antara lain dari pajak daerah, pungutan daerah, perusahaan daerah, disamping bantuan pusat, pinjaman daerah, dan investasi di daerah dengan jalan meningkatkan efisiensi pengumpulan dan penggunaannya yang tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Transmigrasi

- a. Pembangunan transmigrasi diarahkan pada pembangunan daerah, penataan penyebaran penduduk yang serasi dan seimbang serta peningkatan mutu kehidupan penduduk yang berpindah dan menetap di lokasi transmigrasi. Persebaran penduduk yang serasi dan seimbang juga dimaksudkan agar tersedia tenaga kerja yang diperlukan di daerah jarang penduduk, dan berfungsi sebagai unsur yang memperkuat pertahanan keamanan rakyat semesta di daerah bersangkutan. Pembangunan transmigrasi bertujuan pemerataan pembangunan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan berpegang pada rencana tata ruang daerah dan wilayah serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. Penyelenggaraan transmigrasi terus disempurnakan dengan penyediaan lahan yang memadai dan layak bagi usaha produktif dan bagi kehidupan transmigrasi melalui perencanaan terpadu dengan sektor pembangunan lain serta koordinasi pelaksanaan dengan pemerintah daerah tempat tujuan transmigrasi yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah asal transmigrasi.
- c. Pembangunan transmigrasi memerlukan sistem manajemen transmigrasi yang menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pembangunan dan pengembangan wilayah secara terpadu dengan keterlibatan sepenuhnya penduduk di sekitarnya, termasuk pemukiman kembali peladang berpindah dan penduduk yang hidup terpencar agar terwujud perkembangan bersama yang serasi antara para transmigrasi dan penduduk setempat.
- d. Pola usaha di permukiman transmigrasi dan sekitarnya perlu terus dikembangkan dan dianekaragamkan sesuai dengan potensi dan

keunggulan komparatif yang ada di daerah yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana produksi yang memadai, permodalan dan teknologi untuk memperluas pilihan para transmigran dalam menentukan usaha yang menguntungkan bagi dirinya, serta didukung oleh pemasaran hasil yang memberikan peningkatan pendapatan transmigrasi dan penduduk setempat. Di wilayah transmigrasi perlu diciptakan daya tarik berupa penyediaan prasarana, fasilitas umum, penetapan hak kepemilikan tanah, dan berbagai kemudahan termasuk permodalan dan kemudahan untuk berusaha, sekaligus lebih mendorong berkembangnya usaha nasional terutama koperasi dan usaha swasta. Semua itu dimaksudkan juga agar motivasi dan minat masyarakat untuk bertransmigrasi swakarsa makin meningkat.

- e. Keterkaitan antara kegiatan ekonomi di daerah transmigrasi dengan pembangunan daerah sekitarnya perlu terus diperluas dan dikembangkan dalam rangka menumbuhkan perekonomian rakyat yang bersemangat swadaya. Upaya penyuluhan, penerangan, pelayanan, serta pengembangan daerah penerima terus ditingkatkan untuk lebih mendorong peran aktif masyarakat bertransmigrasi dengan dukungan aktif penduduk di daerah penerima.

17. Energi

- a. Pembangunan energi diarahkan untuk mendorong kegiatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat serta memenuhi kebutuhan energi masyarakat dengan menjamin tersedianya energi dan peningkatan mutu serta pelayanannya. Pembangunan energi harus memperhatikan kelestarian sumber energi untuk jangka panjang, kebutuhan energi dalam negeri, peluang ekspor, keamanan dan keselamatan masyarakat, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pembangunan energi dilaksanakan melalui survei, eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan sumber energi baru serta peningkatan efisiensi dan efektivitas penambangan dan pengolahan sumber energi. Untuk menjaga kelestarian sumber energi perlu diupayakan pemanfaatan secara hemat, penganekaragaman dan penggunaan berbagai sumber energi secara optimal, dan penggunaan peralatan dan teknologi hemat energi dalam kerangka kebijaksanaan energi nasional yang menyeluruh dan terpadu.
- b. Sumber energi baru dan energi yang terbarukan serta energi lestari, seperti energi panas bumi, energi air, energi biomassa, energi surya, energi angin, dan energi laut, perlu ditingkatkan pemanfaatannya dengan berpegang pada prinsip menguntungkan secara ekonomis, layak secara teknis, diterima secara sosial budaya dan tidak mengakibatkan

- kerusakan lingkungan. Pengembangan energi di pedesaan perlu terus ditingkatkan, terutama dengan memanfaatkan potensi sumber energi setempat, ditunjang dengan upaya peningkatan swadaya masyarakat.
- c. Laju pertumbuhan pemakaian energi perlu dikendalikan dengan meningkatkan pola konservasi energi, baik yang berasal dari minyak bumi maupun sumber lain, menetapkan kebijaksanaan energi yang tepat, menggunakan alat dan teknologi yang hemat energi, dan menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara peningkatan efisiensi penggunaan energi.
 - d. Pembangunan dan pengembangan tenaga listrik terus ditingkatkan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Pembangunan sarana dan prasarana tenaga listrik dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, dan koperasi. Pengelolaan ketenagalistrikan harus dilakukan secara efisien serta dapat menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan merata, andal, dan bermutu serta dengan tingkat harga yang wajar yang menjamin kelangsungan pengembangan usaha penyediaan dan penyaluran tenaga listrik. Dalam menetapkan rencana umum ketenagalistrikan nasional perlu diupayakan pemanfaatan secara optimal segenap potensi sumber daya energi.
 - e. Penyelenggaraan program listrik masuk desa dilanjutkan dan dikembangkan untuk mendorong kegiatan ekonomi serta meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat di daerah pedesaan, dengan meningkatkan peranan dan swadaya masyarakat pedesaan. Pengadaan listrik dengan menggunakan sumber energi setempat, seperti tenaga air mikro, energi angin, energi surya, dan energi biomassa perlu terus dikembangkan dalam rangka menghemat penggunaan bahan bakar minyak dan mengurangi penggunaan sumber energi yang membawa dampak kerusakan lingkungan alam dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat setempat melalui koperasi untuk melaksanakannya.
 - f. Kemampuan nasional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi energi dan penyediaan, pemanfaatan serta pengelolannya secara ekonomis dan efisien perlu makin dikembangkan melalui berbagai upaya, terutama penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan. Sejalan dengan pembangunan energi, industri peralatan dan industri jasa dalam negeri yang terkait dengan pembangunan energi dalam rangka pengembangan kemampuan sumber daya manusia dan alih teknologi perlu ditingkatkan.

18. Lingkungan Hidup

- a. Pembangunan lingkungan hidup yang merupakan bagian penting dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi diarahkan pada terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan lingkungan hidup bertujuan meningkatkan mutu, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lingkungan, mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- b. Sumber daya alam di darat, di laut maupun di udara dikelola dan dimanfaatkan dengan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat mengembangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang memadai untuk memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi masa kini maupun bagi generasi masa depan. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peranan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia terus ditumbuhkembangkan melalui penerangan dan pendidikan dalam dan luar sekolah, pemberian rangsangan, penegakan hukum, dan disertai dengan dorongan peran aktif masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam setiap kegiatan ekonomi dan sosial.
- c. Konservasi kawasan hutan nasional termasuk flora dan faunanya serta keunikan alam terus ditingkatkan untuk melindungi keanekaragaman plasma nutfah, jenis spesies, dan ekosistem. Penelitian dan pengembangan potensi manfaat hutan bagi kepentingan kesejahteraan bangsa terutama bagi pengembangan pertanian, industri, dan kesehatan terus ditingkatkan. Investasi, pemantauan, dan penghitungan nilai sumber daya alam dan lingkungan hidup terus dikembangkan untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatannya.
- d. Lingkungan hidup yang rusak atau terganggu keseimbangannya perlu direhabilitasi agar kembali berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pembinaan dan penegakan hukum untuk mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan ditingkatkan. Dalam upaya pengendalian pencemaran dapat digunakan berbagai perangkat ekonomi dengan pemanfaatan teknologi yang sesuai agar kualitas lingkungan hidup dapat dipertahankan. Sarana dan prasarana dalam pengelolaan limbah termasuk limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah berbahaya serta beracun perlu

ditingkatkan agar kualitas lingkungan hidup yang lestari dapat terjamin keberlanjutannya.

- e. Dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dikembangkan pola tata ruang yang menyasikan tata guna lahan, air, serta sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi. Tata ruang perlu dikelola berdasarkan pola terpadu melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Tata guna lahan dikembangkan dengan memberikan perhatian khusus pada pencegahan penggunaan lahan pertanian produktif yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Dalam mengembangkan tata guna air perhatian khusus perlu diberikan pada penyediaan air yang cukup dan bersih serta berkesinambungan, pencegahan banjir dan kekeringan, pencegahan kemerosotan mutu dan kelestarian air, serta penyelamatan daerah aliran sungai. Setiap perubahan keadaan dan fungsi lingkungan berikut segenap unsurnya perlu terus dinilai dan dikendalikan secara saksama agar pengamanan dan perlingkungannya dapat dilaksanakan setepat mungkin.
- f. Kerja sama regional dan internasional mengenai pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup, dan peran serta dalam pengembangan kebijaksanaan internasional serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang lingkungan perlu terus ditingkatkan bagi kepentingan pembangunan berkelanjutan.

KESEJAHTERAAN RAKYAT

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Kesejahteraan Sosial
 - a. Kesejahteraan rakyat mengandung makna kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin seluruh rakyat yang berisikan unsur kualitas kehidupan beragama, tingkat pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani serta pelayanan sosial dan pemenuhan kebutuhan materiil masyarakat pada umumnya.
 - b. Pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia serta ditujukan pada peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kemampuan serta kesempatan setiap warga negara untuk turut serta dalam

pembangunan dan menempuh kehidupan sesuai dengan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

- c. Pelayanan sosial perlu dikembangkan melalui keterpaduan upaya antara lain bimbingan, pembinaan dan pemberian bantuan, santunan, dan rehabilitasi sosial, peningkatan taraf kesejahteraan sosial, serta pengembangan dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta kegotongroyongan. Pelayanan sosial terutama diberikan kepada fakir miskin, anak, dan penduduk usia lanjut yang terlantar, penyandang cacat termasuk cacat veteran, korban penyalahgunaan obat, zat adiktif, dan narkotika, korban bencana alam dan musibah lainnya, kelompok masyarakat yang hidupnya masih terasing dan terpencil, serta anggota masyarakat lain yang kurang beruntung agar memperoleh kesempatan berusaha dan bekerja serta menempuh kehidupan sesuai dengan kemampuan dan martabat kemanusiaan.
 - d. Kemampuan profesional lembaga sosial, asuransi sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta panti sosial, baik pemerintah maupun masyarakat perlu ditingkatkan, antara lain melalui pembinaan dan pengawasan, agar lebih mampu memberikan pelayanan sosial yang layak dan turut mengatasi dampak kesenjangan sosial masyarakat.
 - e. Kesadaran, kesetiakawanan, dan tanggung jawab sosial masyarakat serta iklim yang mendukung perlu dikembangkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan bagi kesejahteraan sosial dan untuk menjadi pekerja sosial dalam suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan yang didorong oleh rasa kemanusiaan yang tinggi.
 - f. Nilai kepeloporan, keberintisan, dan kepahlawanan terus dijunjung tinggi dan dikembangkan melalui pemberian penghargaan negara kepada mereka yang telah berjasa. Secara khusus kepada warga negara yang berjasa luar biasa terhadap bangsa dan negara diberikan penghargaan dalam bentuk berbagai kemudahan kepada keluarganya atau dalam bentuk lain yang sesuai. Penghargaan yang sepadan kepada veteran perang kemerdekaan dan pejuang kemerdekaan lainnya serta cacat veteran harus diberikan dengan tetap dapat memelihara harga dirinya dan mampu menumbuhkan dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya.
2. Pendidikan
 - a. Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan

untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa

- b. Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa patriot dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi masa depan. Iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan budaya belajar di kalangan masyarakat terus dikembangkan agar tumbuh sikap dan perilaku yang kreatif, inovatif, dan keinginan untuk maju.
- c. Pendidikan nasional perlu terus ditata, dikembangkan, dan dimantapkan dengan melengkapi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar, perluasan dan peningkatan kualitas pendidikan kejuruan serta pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun. Upaya itu perlu didukung oleh peningkatan sumber daya pendidikan secara bertahap, disertai keterpaduan dan efisiensi pelaksanaannya sehingga mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan pembangunan.
- d. Pendidikan nasional dikembangkan secara terpadu dan serasi baik antar berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan maupun antara sektor pendidikan dengan sektor pembangunan lainnya serta antar daerah. Masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Kualitas pendidikan perlu disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan perkembangan pembangunan. Perlu pula terus dikembangkan kerja sama antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dalam rangka pendidikan dan pelatihan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga yang cakap dan terampil bagi pembangunan sehingga tercipta keterpaduan dengan perencanaan tenaga kerja nasional.

- e. Penyelenggaraan pendidikan nasional harus mampu meningkatkan memperluas, dan memantapkan usaha penghayatan dan pengamalan Pancasila serta membudayakan nilai-nilai Pancasila agar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila termasuk pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), pendidikan moral Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan sejarah perjuangan bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat, dan nilai kejuangan, khususnya nilai 1945, dilanjutkan dan ditingkatkan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan termasuk prasekolah.
- f. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan disemua jenis dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah terus dikembangkan secara merata di seluruh tanah air dengan memberikan perhatian khusus kepada peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, penyandang cacat, serta yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan luar biasa perlu mendapat perhatian lebih khusus agar dapat dipacu perkembangan prestasi dan bakatnya.
- g. Pembinaan terhadap pendidikan di lingkungan keluarga sebagai tempat pendidikan pertama dan pendidikan prasekolah, di samping sebagai wahana sosialisasi awal sebelum pendidikan dasar, dikembangkan agar lebih mampu meletakkan landasan pembentukan watak dan kepribadian, penanaman dan pengenalan agama dan budi pekerti serta dasar pergaulan. Dalam hal ini perlu keteladanan dan pengembangan suasana yang membarufu peletakan dasar ke arah pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta.
- h. Pendidikan luar sekolah, termasuk pendidikan yang bersifat kemasyarakatan seperti kepramukaan, berbagai kursus dan pelatihan keterampilan, perlu ditingkatkan kualitasnya dan diperluas dalam rangka mengembangkan sikap mental, minat, bakat, keterampilan, dan kemampuan anggota masyarakat serta menyiapkan dan memberi bekal kepada warga belajar agar mampu bekerja dan berwirausaha serta meningkatkan martabat dan kualitas kehidupannya.
- i. Pendidikan dasar sebagai jenjang awal dari pendidikan di sekolah lebih ditingkatkan pemerataan, kualitas, dan pengembangannya agar dapat memberikan dasar pembentukan pribadi manusia sebagai warga masyarakat dan warga negara yang berbudi pekerti luhur, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta berkemampuan dan berketerampilan dasar sebagai bekal untuk pendidikan selanjutnya atau untuk bekal hidup dalam masyarakat.

- j. Pengembangan pendidikan menengah sebagai lanjutan pendidikan dasar di sekolah ditingkatkan agar mampu membentuk pribadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, serta untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang memerlukan tenaga berkemampuan dan berketerampilan. Perlu diadakan penyesuaian kurikulum dan isi pendidikannya serta penataan kelembagaan pendidikan menengah, termasuk pendidikan kejuruan, yang merupakan pembekalan untuk pendidikan tinggi atau bekal hidup dalam masyarakat.
- k. Pendidikan tinggi terus dibina dan dikembangkan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, serta kemampuan kepemimpinan yang tanggap terhadap kebutuhan pembangunan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berjiwa penuh pengabdian, dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. Sejalan dengan itu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan perguruan tinggi ditingkatkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan masa sekarang dan masa depan. Kehidupan kampus dikembangkan sebagai lingkungan ilmiah yang dinamis, berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila, dan berkepribadian Indonesia.
- l. Perguruan tinggi diusahakan agar mampu menyelenggarakan pendidikan, melakukan penelitian dan pengkajian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kegiatan mahasiswa dan ilmuwan dikembangkan sesuai dengan disiplin ilmu dan profesinya, antara lain dengan jalan mendorong pengembangan wadah disiplin keilmuan, sehingga para mahasiswa dan ilmuwan dapat meningkatkan dan mengembangkan prestasinya untuk berperan serta dalam pembangunan. Sejalan dengan itu terus dikembangkan iklim yang demokratis yang mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi perguruan tinggi sebagai lembaga keilmuan agar sivitas akademika secara bertanggung jawab dapat mengembangkan pemikiran yang konstruktif dan kreatif baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan maupun bagi pembangunan nasional.
- m. Perguruan swasta sebagai bagian dari pendidikan nasional terus ditingkatkan pembinaannya agar lebih berperan dan lebih bertanggung jawab dalam upaya peningkatan kualitas serta perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dengan tetap mengindahkan ciri

khasnya, serta memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- n. Pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional terus ditingkatkan untuk mempertinggi mutu pemakaian serta sikap positif terhadap bahasa Indonesia dan untuk mengembangkan bahasa Indonesia agar mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlu terus ditingkatkan dan diperluas penerapan dan penggunaannya sehingga menjangkau seluruh masyarakat tanpa mengabaikan pengembangan bahasa daerah sebagai salah satu sarana pendidikan dini dan landasan pengembangan bahasa Indonesia. Perlu pula ditingkatkan kemampuan penggunaan bahasa asing untuk memperluas cakrawala berpikir dan memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam masyarakat internasional.
- o. Pendidikan, pengadaan, dan pembinaan guru serta tenaga kependidikan lainnya pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh tanah air. Kualitas pendidikannya ditingkatkan dan diselenggarakan secara terpadu dalam jumlah yang memadai. Pengembangan karier dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan lainnya, termasuk penghargaan bagi yang berprestasi dan yang bertugas di daerah terpencil, ditingkatkan serta penempatannya disebar merata di seluruh tanah air sesuai dengan kebutuhan pendidikan nasional.
- p. Pembinaan dan pengembangan kurikulum dan isi pendidikan, yang merupakan wahana utama pendidikan, diusahakan agar mampu mewujudkan manusia yang berkualitas yang dituntut oleh pembangunan bangsa dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kurikulum perlu terus dikembangkan secara dinamis dengan memperhatikan kepentingan dan kekhasan daerah serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum dan isi pendidikan yang memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan terus ditingkatkan dan dikembangkan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan nasional. Ilmu dasar, ilmu pengetahuan alam dan eksakta, ilmu pengetahuan sosial, dan humaniora perlu dikembangkan secara serasi dan seimbang.
- q. Sarana dan prasarana pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, sarana keterampilan dan pelatihan, media pengajaran, teknologi pendidikan, serta fasilitas pendidikan jasmani dikembangkan dan disebarluaskan secara merata untuk membantu terselenggaranya dan

meningkatnya kualitas pendidikan sesuai dengan tuntutan persyaratan pendidikan serta kebutuhan pembangunan.

- r. Penulisan, pemerjemahan, dan penggandaan buku pelajaran, buku bacaan, khususnya bacaan anak yang berisikan cerita rakyat, buku ilmu pengetahuan dan teknologi, serta terbitan buku pendidikan lainnya digalakkan untuk membantu peningkatan kualitas budaya baca. Jumlah dan kualitasnya perlu terus ditingkatkan serta disebarakan merata di seluruh tanah air dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Bersamaan dengan itu dikembangkan iklim yang dapat mendorong penulisan dan penerjemahan buku dengan penghargaan yang memadai dan jaminan perlindungan hak cipta.
3. Kebudayaan
 - a. Pengembangan kebudayaan nasional diarahkan untuk memberikan wawasan budaya dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia serta memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. Kebudayaan nasional yang mencerminkan nilai luhur bangsa terus dipelihara, dibina, dan dikembangkan dengan memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas kehidupan, memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional, memperkukuh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa. Hasrat masyarakat luas untuk berperan aktif dalam proses pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional terus digairahkan.
 - b. Dalam mengembangkan kebudayaan bangsa perlu ditumbuhkan kemampuan masyarakat untuk pemahaman dan pengamalan nilai budaya daerah yang luhur dan beradab serta menyerap nilai budaya asing yang positif untuk memperkaya budaya bangsa. Dalam proses pembangunan perlu dicegah sikap feodal, sikap eksklusif dan paham kedaerahan yang sempit serta pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan nilai budaya bangsa. Perubahan dan pembaharuan struktur dan nilai budaya masyarakat yang sesuai dengan jati diri bangsa dan kebutuhan pembangunan terus digerakkan untuk memantapkan landasan spiritual, moral, dan etik pembangunan yang berdasarkan Pancasila.
 - c. Dalam pembangunan budaya nasional perlu diciptakan suasana yang mendorong tumbuh dan berkembangnya sikap kerja keras, disiplin, sikap menghargai prestasi, berani bersaing, mampu menyesuaikan diri dan kreatif. Perlu terus ditumbuhkan budaya menghormati dan

menghargai orang yang lebih tua, budaya belajar, budaya ingin maju, dan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perlu dikembangkan pranata sosial budaya yang dapat mendukung proses pemantapan budaya bangsa.

- d. Pembauran merupakan bagian proses pembudayaan bangsa yang harus dipacu ke arah yang positif dan harus dijiwai sikap mawas diri, tahu diri, tenggang rasa, solidaritas sosial ekonomi serta rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kebersamaan dan kesetiakawanan dalam upaya memajukan dan menyejahterakan kehidupan masyarakat, bangsa serta negara Indonesia. Penyelenggaraannya harus dapat mencegah dan menghilangkan melebar-barnya kesenjangan sosial ekonomi dan sikap eksklusif serta harus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
- e. Pembinaan bahasa Indonesia terus ditingkatkan sehingga penggunaannya secara baik dan benar serta dengan penuh rasa bangga makin menjangkau seluruh masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta memantapkan kepribadian bangsa. Penggunaan istilah asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia harus dihindari. Pengembangan bahasa Indonesia juga terus ditingkatkan melalui upaya penelitian, pembakuan peristilahan dan kaidah bahasa, serta pemekaran perbendaharaan bahasa sehingga bahasa Indonesia lebih mampu menjadi sarana pengungkap cipta, rasa, dan karsa secara tertib dan lebih mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Penulisan karya ilmiah dan karya sastra, termasuk bacaan anak yang berakar pada budaya bangsa, serta penerjemahan karya ilmiah dan karya sastra yang memberikan inspirasi bagi pembangunan budaya nasional perlu digalakkan untuk memperkaya bahasa, kesusastraan, dan pustaka Indonesia.
- f. Pembinaan bahasa daerah perlu terus dilanjutkan dalam rangka mengembangkan serta memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khazanah kebudayaan nasional sebagai salah satu unsur jati diri dan kepribadian bangsa. Perlu ditingkatkan penelitian, pengkajian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah serta penyebarannya melalui berbagai media.
- g. Kemampuan penguasaan bahasa asing perlu ditingkatkan dan dikembangkan untuk memperlancar komunikasi dengan bangsa lain di segala aspek kehidupan terutama penyerapan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, di samping memperluas cakrawala pandang bangsa sejalan dengan kebutuhan pembangunan.

- h. Pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan terus dilanjutkan dan diupayakan untuk lebih menunjang pengembangan budaya bangsa, mencerdaskan bangsa dan memasyarakatkan budaya gemar membaca dan belajar. Pembangunan perpustakaan dan kearsipan perlu ditingkatkan dan disebarluaskan merata di seluruh pelosok tanah air, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
 - i. Pembinaan dan pengembangan kesenian sebagai ungkapan budaya bangsa diusahakan agar mampu menampung dan menumbuhkan daya cipta para seniman, memperkuat jati diri bangsa, meningkatkan apresiasi dan kreativitas seni masyarakat, memperluas kesempatan masyarakat untuk menikmati dan mengembangkan seni budaya bangsa serta memberikan inspirasi dan gairah membangun. Kesenian daerah perlu dipelihara dan dikembangkan untuk melestarikan dan memperkaya keanekaragaman budaya bangsa. Upaya itu perlu didukung oleh iklim serta sarana dan prasarana yang memadai.
 - j. Nilai, tradisi, dan peninggalan sejarah, yang memberikan corak khas pada kebudayaan bangsa, serta hasil pembangunan yang mengandung nilai kejuangan, kepeloporan, dan kebanggaan nasional perlu terus digali, dipelihara, serta dibina untuk memupuk semangat perjuangan dan cinta tanah air. Perencanaan tata ruang di semua tingkatan harus memperhatikan pelestarian bangunan dan benda yang mengandung nilai sejarah.
4. Kesehatan
- a. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas kehidupan dan usia harapan hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, serta untuk mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Perhatian khusus diberikan pada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, daerah kumuh perkotaan, daerah perdesaan, daerah terpencil dan kelompok masyarakat yang hidupnya masih terasing, daerah transmigrasi, serta daerah permukiman baru.
 - b. Pengelolaan kesehatan yang terpadu perlu lebih dikembangkan agar dapat lebih mendorong peran serta masyarakat, termasuk dunia usaha, dalam pembangunan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan ditingkatkan dan jangkauan serta kemampuannya diperluas agar masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, dapat menikmati pelayanan yang berkualitas dengan terus memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran secara serasi dan bertanggung jawab.

- c. Pengadaan dan peningkatan sarana kesehatan perlu terus dikembangkan. Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan lainnya ditingkatkan kualitas dan kemampuannya serta penyebarannya terus diupayakan agar merata dan menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Penyediaan obat dan alat kesehatan yang makin merata dengan harga yang terjangkau oleh rakyat banyak ditingkatkan melalui pengembangan industri peralatan kesehatan dan industri farmasi yang makin maju dan mandiri, yang didukung oleh industri bahan baku obat yang andal melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - d. Upaya perbaikan kesehatan masyarakat terus ditingkatkan antara lain melalui pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, penyehatan lingkungan permukiman, perbaikan gizi, penyediaan air bersih, penyuluhan kesehatan, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Perlindungan terhadap bahaya penyalahgunaan obat, zat adiktif, dan narkotika, terutama bagi generasi muda, serta pencemaran lingkungan perlu diberikan perhatian khusus, juga pengawasan ketat terhadap obat, makanan dan minuman. Penelitian dan pengembangan kesehatan perlu terus dilanjutkan antara lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
 - e. Pelayanan kesehatan baik oleh pemerintah maupun peran serta masyarakat harus mengindahkan prinsip kemanusiaan dan kepatutan dengan memberikan perhatian khusus kepada fakir miskin, anak-anak dan penduduk usia lanjut yang terlantar. Semua usaha untuk mewujudkan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat perlu dikembangkan dengan upaya memasyarakatkan pembiayaan kesehatan oleh masyarakat berdasarkan prinsip gotong-royong.
 - f. Pengobatan tradisional yang secara medis dapat dipertanggungjawabkan terus dibina dalam rangka perluasan dan pemerataan pelayanan kesehatan. Pemeliharaan dan pengembangan pengobatan tradisional sebagai warisan budaya bangsa terus ditingkatkan dan didorong usaha pengembangannya melalui penggalan, penelitian, pengujian, dan pengembangan serta penemuan obat-obatan, termasuk budidaya tanaman obat tradisional yang secara medis dapat dipertanggungjawabkan.
5. Keluarga Sejahtera
- a. Pembangunan keluarga sejahtera diarahkan kepada terwujudnya kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung

- kegiatan pembangunan. Perlu ditumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab, kesukarelaan, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa
- b. Gerakan keluarga berencana nasional sebagai salah satu kegiatan pokok dalam upaya mencapai keluarga sejahtera diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan cara penurunan angka kelahiran untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan keluarga.
 - c. Gerakan keluarga berencana diupayakan agar makin membudaya dan makin mandiri melalui penyelenggaraan penyuluhan keluarga berencana, disertai dengan peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta keluarga berencana dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, etik, dan sosial budaya masyarakat, sehingga norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera dihayati dan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab.
 - d. Peran serta pemuka agama, pemuka masyarakat, organisasi dan lembaga masyarakat lebih ditingkatkan melalui upaya penerangan, bimbingan, dan penyuluhan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda agar gerakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera makin memasyarakat dan membudaya di seluruh tanah air.
6. Kependudukan
- a. Kebijakan kependudukan diarahkan pada peningkatan kualitas penduduk sebagai pelaku utama dan sasaran pembangunan nasional agar memiliki semangat kerja, budi pekerti luhur, penuh keimanan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pengelolaan kependudukan juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, keterampilan, derajat kesehatan dan kesejahteraan, dan menciptakan lapangan kerja, serta memeratakan pembangunan dan pendapatan. Pembangunan kualitas penduduk yang meliputi kualitas fisik dan nonfisik serta pelayanan terhadap penduduk terus ditingkatkan dengan memperhatikan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan hidup agar potensi penduduk dapat dikembangkan secara optimal, khususnya masyarakat rentan. Kualitas dan mobilitas penduduk terus dikendalikan dan diarahkan agar menjadi kekuatan pembangunan bangsa secara efektif.

- b. Pengendalian pertumbuhan penduduk terutama dilakukan untuk lebih menurunkan angka kelahiran melalui gerakan keluarga berencana mandiri, menurunkan angka kematian khususnya kematian anak di bawah usia lima tahun melalui program pelayanan kesehatan terpadu, serta meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan juga melalui langkah yang berhubungan dengan penetapan jumlah, struktur, dan komposisi, serta pertumbuhan dan persebaran penduduk yang ideal. Pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk harus memperhatikan kemampuan daya dukung alam dan harus sesuai dengan tata ruang, yang diselenggarakan melalui transmigrasi, peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang pertumbuhan ekonomi di wilayah sebaran, serta pemberian insentif bagi tenaga kerja sehingga mampu menggairahkan tenaga terdidik untuk mengabdikan di wilayah pertumbuhan baru.
 - c. Penerangan, pendidikan, dan penyuluhan mengenai kependudukan, termasuk keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perlu makin ditingkatkan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda serta organisasi dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Administrasi, pencatatan dan statistik kependudukan terus disempurnakan sehingga menjadi sumber data yang dapat diandalkan untuk menunjang perencanaan pembangunan di berbagai bidang, sektor, wilayah dan daerah, serta menunjang perkiraan dan sasaran berkala dari perkembangan kependudukan. Upaya tersebut perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai termasuk di daerah-daerah.
 - d. Dengan meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut dan makin panjangnya usia harapan hidup sebagai akibat kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan selama ini, maka mereka yang memiliki pengalaman, keahlian dan kearsifan perlu diberi kesempatan untuk berperan dalam pembangunan. Kesejahteraan penduduk usia lanjut yang karena kondisi fisik dan/atau mentalnya tidak memungkinkan lagi untuk berperan dalam pembangunan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat.
7. Anak dan Remaja
- a. Pembinaan anak dan remaja dilaksanakan melalui peningkatan mutu gizi, pembinaan perilaku kehidupan beragama dan budi pekerti luhur, penumbuhan minat belajar, peningkatan daya cipta dan daya nalar serta kreativitas, penumbuhan kesadaran akan hidup sehat, serta penumbuhan idealisme dan patriotisme dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan peningkatan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan masyarakat.

- b. Pembinaan anak yang dimulai sejak anak dalam kandungan diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dengan memperhatikan mutu gizi, menjaga kesehatan jasmani dan ketenangan jiwa ibu serta dengan menjaga ketenteraman suasana keluarga dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Pembinaan anak di bawah usia lima tahun diupayakan terutama dengan meningkatkan mutu gizi anak, pembiasaan awal dalam perilaku kehidupan beragama dan berbudi pekerti luhur serta memberikan kesempatan bermain bersama dalam rangka menumbuhkan daya cipta dan hidup bermasyarakat.
 - c. Pembinaan anak usia sekolah dilaksanakan melalui peningkatan mutu gizi; peningkatan pembinaan perilaku kehidupan beragama dan perilaku terpuji; penanaman rasa cinta tanah air, disiplin, dan kemandirian; penumbuhan minat baca, menulis, berhitung, dan belajar; peningkatan daya cipta, daya analisis, prakarsa dan daya kreasi; penumbuhan kesadaran akan hidup sehat dan hidup bermasyarakat serta peningkatan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya
 - d. Pembinaan remaja dilaksanakan melalui peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; pembiasaan dan penghayatan perilaku terpuji, sikap mandiri, berprestasi, dan bertanggung jawab; peningkatan budaya baca dan budaya belajar, penumbuhan kemampuan dan daya nalar, kemampuan berinisiatif dan berpikir kritis analitis; pengembangan kreativitas dan keterampilan; peningkatan gizi dan kesehatan jasmani; penanaman kesadaran akan bahaya penyalahgunaan obat, zat adiktif, dan narkotika; kepekaan terhadap lingkungan dan pemahaman wawasan kebangsaan serta upaya menumbuhkan idealisme dan patriotisme dalam pembangunan bangsa dan negara sebagai pengamalan Pancasila.
 - e. Pembinaan anak dan remaja dilaksanakan bersamaan dengan peningkatan kesadaran orang tua terhadap tanggung jawab dan peranannya sebagai pendidik pertama dan utama, serta peningkatan perhatian terhadap anak sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Orang tua juga dituntut untuk lebih menyadari betapa besar peranannya sebagai panutan dan teladan bagi anak dan remaja, dengan menciptakan suasana kekeluargaan yang harmonis, sejahtera lahir batin.
8. Pemuda
- a. Pembinaan dan pengembangan pemuda sebagai generasi pewaris nilai-nilai luhur budaya dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan insan pembangunan diarahkan agar pemuda menjadi kader pimpinan bangsa

yang berjiwa Pancasila, disiplin, peka, mandiri, beretos kerja, tangguh, memiliki idealisme yang kuat, berwawasan kebangsaan yang luas, mampu mengatasi tantangan, baik masa kini maupun yang akan datang dengan tetap memperhatikan nilai sejarah yang dilandasi oleh semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan. Pembinaan dan pengembangan pemuda ditujukan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, kesetiakawanan sosial, serta kepeloporan pemuda dalam membangun masa depan bangsa dan negara.

- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pemuda menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, pemerintah, dan pemuda itu sendiri melalui upaya peningkatan pemantapan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalannya, menanamkan dan menumbuhkembangkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, memperkuat kepribadian, meningkatkan disiplin, mempertinggi budi pekerti, meningkatkan kecerdasan dan kreativitas, memperkuat semangat belajar dan etos kerja, serta memiliki keahlian dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang berkualitas.
- c. Peningkatan kualitas pemuda dalam kehidupan politik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk membentuk insan yang berjiwa Pancasila, demokratis, patriotik, dan berwawasan kebangsaan diselenggarakan terutama melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sehingga dapat lebih memantapkan keyakinan pemuda akan kebenaran Pancasila sebagai satu-satunya asas. Peran serta pemuda dalam kehidupan politik nasional dan kegiatan internasional terus ditingkatkan melalui keikutsertaannya dalam organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya sebagai upaya pendidikan politik sehingga proses kaderisasi dapat berlangsung secara wajar dan berkesinambungan.
- d. Pengembangan kepeloporan pemuda dalam pembangunan bangsa dan negara harus diupayakan agar pemuda memiliki jiwa kejujuran, keberintisan, kepekaan terhadap lingkungan, disiplin dan sikap mandiri serta memiliki sifat yang bertanggung jawab, inovatif, kreatif, ulet, tangguh, jujur serta berani dan rela berkorban dengan dilandasi oleh semangat cinta tanah air.
- e. Pemuda sebagai kader bangsa dan kader pembangunan perlu terus meningkatkan kebiasaan gemar membaca yang mendorong semangat dan kemauan belajar dan bekerja keras untuk mengembangkan kecerdasan, keahlian dan keterampilan, serta daya nalar, berpikir kritis

analitis dan tanggap terhadap tantangan dan lingkungan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

- f. Perlu diciptakan suasana yang lebih sehat, dinamis, dan demokratis sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan sehingga terwujud iklim yang mendorong bagi pemuda untuk dapat lebih berperan dalam pembangunan. Fungsi dan peranan organisasi kepemudaan, seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia, organisasi siswa intra sekolah, organisasi kemahasiswaan, pramuka dan karang taruna, terus dikembangkan dan ditingkatkan agar lebih mandiri, berkualitas, dan lebih memiliki semangat kebangsaan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
9. Peranan Wanita dalam Pembangunan Bangsa
- a. Wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya insani pembangunan, mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan di segala bidang. Pembinaan peranan wanita sebagai mitra sejajar pria ditujukan untuk meningkatkan peran aktif dalam kegiatan pembangunan, termasuk upaya mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, dan bahagia serta pengembangan anak, remaja, dan pemuda, dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Kedudukan wanita dalam keluarga dan masyarakat serta peranannya dalam pembangunan perlu dipelihara dan terus ditingkatkan sehingga dapat memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa dengan memperhatikan kodrat serta harkat dan martabatnya.
 - b. Kemampuan wanita perlu lebih dikembangkan melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, serta ketahanan mental dan spiritual agar dapat lebih memanfaatkan kesempatan berperan aktif di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan, serta mampu menghadapi perubahan-perubahan baik di dalam masyarakat maupun di dunia internasional. Iklim sosial budaya perlu dikembangkan agar lebih mendukung upaya mempertinggi harkat dan martabat wanita sehingga dapat makin berperan aktif dalam masyarakat dan dalam lingkungan keluarga secara selaras dan serasi.
 - c. Upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga perlu makin digalakkan antara lain melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah serta melalui gerakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan wanita

sebagai penggeraknya. Peningkatan peran wanita dalam kesejahteraan keluarga dilaksanakan bersamaan dengan pengembangan kesadaran orang tua terhadap peranan dan tanggung jawabnya dalam pendidikan anak dan remaja yang bertumpu pada nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa

- d. Peranan wanita dalam pembangunan masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan, perlu terus ditingkatkan terutama dalam menangani berbagai masalah sosial dan ekonomi yang diarahkan pada pemerataan hasil pembangunan, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, dan pemeliharaan lingkungan.
 - e. Untuk memenuhi kebutuhan yang makin meningkat akan tenaga kerja terampil dalam pembangunan, tenaga kerja wanita sangat diperlukan di berbagai lapangan pekerjaan. Perhatian khusus perlu diberikan kepada peningkatan keterampilan, produktivitas, kesejahteraan, dan perlindungan tenaga kerja wanita, termasuk yang bekerja di luar negeri, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja, perkembangan karier serta jaminan pelayanan sosial bagi tenaga kerja wanita dan keluarganya dengan memperhatikan kodrat serta harkat dan martabatnya sebagai wanita.
10. Perumahan dan Permukiman
- a. Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat serta menciptakan suasana kerukunan hidup keluarga dan kesetiakawanan sosial masyarakat dalam rangka membentuk lingkungan serta persemaian nilai budaya bangsa dan pembinaan watak anggota keluarga. Pembangunan perumahan dan permukiman, baik pembangunan perumahan baru maupun pemugaran perumahan di perdesaan dan di perkotaan, bertumpu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal baik dalam jumlah maupun kualitasnya dalam lingkungan yang sehat serta kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberikan rasa aman, damai, tenteram, dan sejahtera.
 - b. Pembangunan perumahan dan permukiman perlu lebih ditingkatkan dan diperluas hingga dapat makin merata dan menjangkau masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan senantiasa memperhatikan rencana tata ruang dan ketertiban serta keterpaduan dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Pembangunan perumahan dan permukiman harus dapat mendorong kegiatan pembangunannya dengan memperhatikan prinsip swadaya dan gotong-royong, disamping meningkatkan perkembangan pembangunan di sektor lain. Penyuluhan teknis tentang pembangunan

dan pemugaran perumahan perlu dilanjutkan dan diperluas untuk meningkatkan kualitas lingkungan dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan rumah susun di kota-kota besar perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan dengan memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya.

- c. Koperasi, usaha negara, dan usaha swasta yang melayani pembiayaan pembangunan perumahan perlu ditingkatkan dan dikembangkan perannya sehingga dapat mendorong terhimpunnya modal yang memungkinkan pembangunan rumah milik dan rumah sewa dalam jumlah besar. Perlu diciptakan iklim yang menarik bagi pembangunan perumahan oleh masyarakat dan perseorangan antara lain dengan penyediaan kredit yang memadai, pengaturan persewaan dan hipotek perumahan. Perlu didorong peran serta aktif masyarakat dalam pemupukan dana bagi pembangunan perumahan.
- d. Pembangunan perumahan dan permukiman harus mampu memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja serta mendorong berkembangnya industri bahan bangunan murah yang memenuhi syarat teknis dan kesehatan serta bahan setempat. Pemanfaatan sumber daya alam, pengolahan bahan, penyuluhan teknis, dan pemasarannya perlu disempurnakan dan makin dikembangkan. Kualitas tenaga pembangunan perumahan dan permukiman perlu ditingkatkan dan kelebihannya perlu dimanfaatkan.
- e. Penciptaan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, bersih, sehat, dan aman perlu terus ditingkatkan antara lain melalui pembangunan prasarana dan penyediaan air bersih, fasilitas sosial dan ibadah, fasilitas ekonomi dan transportasi, fasilitas rekreasi dan fasilitas olahraga, serta prasarana lingkungan termasuk fasilitas penanganan limbah, disertai upaya peningkatan kesadaran dan tanggung jawab warga masyarakat baik di perdesaan maupun di perkotaan agar semakin banyak rakyat mendiami rumah sehat dalam lingkungan permukiman yang sehat pula.

11. Olahraga

- a. Pembinaan dan pengembangan olahraga yang merupakan bagian upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani, mental dan rohani masyarakat, serta ditujukan untuk pembentukan watak dan kepribadian, disiplin dan sportivitas yang tinggi serta peningkatan prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional.

- b. Gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat terus ditingkatkan agar lebih meluas dan merata di seluruh pelosok tanah air untuk menciptakan budaya berolahraga dan iklim yang sehat yang mendorong peran serta aktif masyarakat dalam peningkatan prestasi olahraga. Perlu ditumbuhkan sikap masyarakat yang sportif dan bertanggung jawab dalam semua kegiatan keolahragaan.
- c. Dalam upaya peningkatan prestasi olahraga perlu terus dilaksanakan pembinaan olahragawan sedini mungkin melalui pencarian dan pemantauan bakat, pembibitan, pendidikan, dan pelatihan olahraga prestasi yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih efektif dan efisien serta peningkatan kualitas organisasi keolahragaan baik di tingkat pusat maupun daerah.
- d. Perbaikan gizi olahragawan, penyempurnaan metode pelatihan, dan penggunaan peralatan olahraga perlu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat. Perlu pula ditingkatkan penanaman nilai budaya yang mampu menumbuhkan dan meningkatkan sportivitas, disiplin, motivasi meraih prestasi, dan sikap pantang menyerah serta bertanggung jawab dalam mengejar keunggulan olahraga untuk menjunjung tinggi nama dan kehormatan bangsa dan negara.
- e. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai dilingkungan sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, serta di lingkungan pekerjaan dan permukiman yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun peran serta masyarakat dilanjutkan dan ditingkatkan agar pembibitan olahragawan dan pembinaan olahraga dapat lebih meningkat dan merata di seluruh pelosok tanah air serta mencakup segenap kelompok umur, baik pria maupun wanita meliputi anak, remaja, pemuda, penduduk usia lanjut dan penyandang cacat. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga, termasuk kesehatan olahraga, penyediaan fasilitas pendidikan guru dan pelatihan olahraga serta penyelenggaraan latihan dan sistem pembinaan olahraga lebih dikembangkan secara profesional.
- f. Olahragawan, pelatih, dan pembina yang berprestasi perlu diberi perhatian khusus dan penghargaan yang wajar untuk meningkatkan semangat dan motivasi dalam memacu prestasi yang lebih tinggi. Khusus bagi olahragawan berprestasi perlu ada penanganan yang mendasar dan melembaga terutama untuk dapat memberikan jaminan bagi masa depannya.

AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

1. Atas dasar keimanan dan ketaqwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.
2. Kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan sehingga terbina kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, kualitas kerukunan antar dan antara umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.
3. Dengan semakin meningkat dan meluasnya pembangunan, maka kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa harus makin diamankan baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.
4. Diusahakan supaya terus bertambah sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk sarana pendidikan agama pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan termasuk prasekolah, yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melanjutkan usaha untuk terus meningkatkan pelayanan dan kelancaran penunaian ibadah haji bagi umat Islam sesuai dengan kemampuan masyarakat.
6. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama. Pembinaan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan:
 - a. Agar tidak mengarah kepada pembentukan agama baru.
 - b. Untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

1. Teknik Produksi
 - a. Pengembangan teknik produksi diarahkan pada usaha mempercepat penguasaan proses produksi, meningkatkan produktivitas, kemampuan, dan keterampilan tenaga kerja dalam mendayagunakan teknologi bagi peningkatan proses pertambahan nilai barang dan jasa yang bermutu dan berdaya saing sehingga mampu memacu proses industrialisasi,

meningkatkan efisiensi produksi, dan makin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

- b. Dalam mengembangkan teknik produksi perlu ditetapkan berbagai rencana produksi manufaktur progresif agar terjamin transformasi teknologi secara berkesinambungan dan terarah. Perkembangan teknik produksi barang dan jasa di luar negeri yang lebih maju perlu diikuti, dipelajari, dan dipahami yang dalam penerapannya disertai dengan upaya penyesuaian, peningkatan keterampilan memproduksi, keahlian organisasi dan manajemen, serta peningkatan prestasi kerja.
 - c. Mutu produksi dan prestasi kerja ditingkatkan, di samping melalui usaha peningkatan keterampilan, juga melalui penerapan standar mutu dan pemeliharaan persyaratan kerja dalam rangka mendorong terbentuknya sikap dan perilaku masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi yang senantiasa berupaya mencapai yang lebih baik.
 - d. Penguasaan teknik produksi dalam pengembangan industri, termasuk kemampuan rancang bangun dan rekayasa, didorong dan ditingkatkan agar industri memiliki kemampuan yang terus meningkat sehingga lebih menjamin dihasilkan barang dan jasa yang unggul dalam mutu serta kuat bersaing baik di pasar dalam negeri maupun di pasar luar negeri.
2. Teknologi
- a. Pembangunan teknologi diarahkan pada kemampuan penguasaan teknologi dan rekayasa sebagai pemacu kemampuan melakukan inovasi dan percepatan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Masyarakat digiatkan untuk berperan aktif dalam upaya penguasaan dan pemanfaatan teknologi dalam rangka mengembangkan keunggulan kompetitif sehingga mampu menghasilkan barang dan jasa yang lebih unggul dan bersaing dengan menggunakan teknologi mutakhir. Budaya ilmu pengetahuan dan teknologi ditumbuhkembangkan dengan selalu memperhatikan nilai-nilai luhur bangsa agar sikap dan perilaku masyarakat makin terangsang untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. Kemampuan untuk mengkaji dan memahami teknologi yang tepat perlu ditingkatkan untuk menunjang transmisi teknologi melalui kajian berbagai ilmu pengetahuan terapan. Pemahaman teknologi secara mendasar, rinci, dan mendalam dilakukan melalui pelaksanaan program yang konkret untuk memproduksi barang dan jasa. Kemampuan alih teknologi perlu dikembangkan menjadi kemampuan pengintegrasian dan penciptaan teknologi baru untuk menghasilkan produk baru, yang

dicerminkan oleh kemampuan membuat rancang bangun dan rekayasa industri serta kemampuan memproduksi.

- c. Pengembangan kemampuan rancang bangun dan rekayasa harus diupayakan untuk mendorong penyempurnaan proses produksi dan pertumbuhan berbagai jenis industri unggulan yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mampu menghadapi persaingan pasar dalam negeri dan pasar luar negeri.
 - d. Kerja sama antar berbagai disiplin ilmu pengetahuan dalam mengembangkan teknologi dan meningkatkan kemampuan rancang bangun dan rekayasa perlu ditingkatkan agar dapat memperkirakan kecenderungan perkembangan teknologi yang makin membutuhkan cara kerja multidisiplin dan standardisasi mutu barang dan jasa yang terus meningkat.
3. Ilmu Pengetahuan Terapan
- a. Untuk mendukung upaya mempercepat pembangunan, pengembangan ilmu pengetahuan terapan perlu ditingkatkan melalui pengembangan dan penguasaan secara lebih luas ilmu pengetahuan dasar serta kegiatan penelitian dan pengembangan baik di lingkungan perguruan tinggi maupun di masyarakat termasuk dunia usaha.
 - b. Pendalaman berbagai disiplin ilmu pengetahuan ditingkatkan secara serasi dan terpadu untuk mengoptimalkan penguasaan ilmu pengetahuan dasar dan penguasaan ilmu pengetahuan terapan untuk menghasilkan teknologi yang tepat bagi kegiatan pembangunan. Pengembangan berbagai disiplin ilmu yang diperhitungkan akan memiliki peluang untuk unggul dalam mempercepat laju pembangunan harus dikenal dan diberi perhatian khusus, meliputi bioteknologi, teknologi kedokteran, teknologi hasil pertanian, rancang bangun, ilmu bahan, ilmu kimia dan proses, teknologi energi, elektronika serta informatika, dan teknologi perlindungan lingkungan.
 - c. Penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan terapan perlu didorong dengan peningkatan mutu dan jumlah tenaga peneliti agar makin banyak tenaga peneliti yang berkeahlian tinggi, berdedikasi, berprakarsa, kreatif, dan inovatif, serta didukung oleh tenaga teknis yang terampil dan tenaga pengelola yang profesional, serta digalakkan melalui pemberian perangkat yang menarik.

- d. Sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan terapan dari berbagai lembaga penelitian dan pengembangan serta perguruan tinggi didayagunakan dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka meningkatkan kegiatan yang lebih efisien dan produktif agar dapat meningkatkan kemampuan bangsa dalam penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Ilmu Pengetahuan Dasar
 - a. Pengembangan ilmu pengetahuan dasar diarahkan untuk mendukung peningkatan mutu dan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan berbagai disiplin ilmu pengetahuan secara mendalam serta mendorong pengembangan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang berkaitan langsung dengan pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri dan pengembangan teknologi yang dapat mempercepat pembangunan.
 - b. Ilmu pengetahuan dasar perlu terus ditumbuhkembangkan agar dapat memberi landasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan alam, sosial, dan humaniora yang bersifat dinamik dan terbuka serta dapat mengantisipasi kebutuhan ilmu pengetahuan, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan umat manusia.
 - c. Sarana, prasarana, dan kegiatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dasar di berbagai lembaga penelitian dan perguruan tinggi perlu makin didayagunakan dan ditingkatkan secara bertahap.
 5. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - a. Pengembangan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan pada usaha untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas seluruh kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melakukan penataan pengelolaannya yang mencakup koordinasi, keterkaitan antar lembaga, pembinaan etika profesi ilmiah, pemanfaatan sistem informasi antar lembaga, penciptaan iklim yang mendukung serta perlindungan bagi ilmuwan, penemu, dan peneliti melalui hak milik intelektual, seperti hak cipta dan hak paten baik nasional maupun internasional, bagi hasil karya ilmiah dan penemuannya.
 - b. Peran pemerintah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk pengembangan sumber daya manusia, perlu ditunjang oleh peran serta masyarakat secara luas sehingga dapat memacu proses peran serta masyarakat secara luas sehingga dapat memacu proses perwujudan masyarakat Indonesia yang sadar akan peran dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam

- pembangunan nasional, serta secara bertahap menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi makin membudaya dalam masyarakat.
- c. Perlu ditingkatkan kerja sama antara lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, menciptakan hubungan yang saling mengisi antar lembaga, serta memperhatikan kesinambungan kegiatan setiap lembaga. Untuk itu perlu lebih ditingkatkan koordinasi kegiatan antar lembaga dalam bidang pendidikan, lembaga penelitian lintas sektoral dan multidisiplin, lembaga pengkajian dan penerapan teknologi yang menunjang industri, serta lembaga penunjangnya. Kegiatan penelitian dan pengembangan perlu ditumbuhkembangkan baik di lingkungan pemerintah, perguruan tinggi maupun di lingkungan industri untuk meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - d. Pengembangan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu ditingkatkan untuk mendukung peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar lebih produktif, kreatif dan inovatif serta mendukung upaya peningkatan mutu dan daya guna kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi agar lebih efektif dalam menunjang dan memacu pertumbuhan produktivitas prestasi nasional. Pertumbuhan produktivitas prestasi nasional yang makin tinggi akan makin mempercepat peningkatan kemampuan bangsa untuk dapat membangun secara lebih mandiri, secara bertahap membentuk keunggulan baik di tingkat regional maupun global. Untuk itu diperlukan peningkatan profesionalisme, kemampuan manajemen, dan mengembangkan faktor lingkungan, seperti iklim usaha, keterkaitan kegiatan usaha, kegiatan pendidikan dan latihan, suasana persaingan yang sehat, serta meningkatkan produktivitas modal.
 - e. Kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi hasil penelitian perlu ditingkatkan melalui publikasi dan pengembangan pelayanan pusat dokumentasi dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia. Jaringan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi, komunikasi, dan komputerisasi. Penelitian ilmiah didasarkan atas tuntutan dan kepentingan pembangunan serta kemampuan nasional sehingga perlu mendapat kemudahan dan dukungan sumber daya yang memadai agar dapat merangsang kegairahan para peneliti dalam penelitian, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlindungan terhadap hasil penemuan para ilmuwan bangsa Indonesia perlu ditata,

dimantapkan, serta dijamin haknya baik di dalam maupun di luar negeri. Pemerintah dan masyarakat perlu memberi penghargaan kepada para ilmuwan yang berprestasi dan menghasilkan penemuan dan karya ilmiah yang dapat dibanggakan oleh bangsa Indonesia

H U K U M

1. Materi Hukum

- a. Materi hukum meliputi aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam penyelenggaraan segenap dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bersifat mengikat bagi semua penduduk. Materi hukum harus dapat dijadikan dasar untuk menjamin agar masyarakat dapat menikmati kepastian dasar untuk menjamin agar masyarakat dapat menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional, kepatuhan hukum serta tanggung jawab sosial pada setiap warga negara termasuk penyelenggara negara, memberi rasa aman dan tenteram, mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, serta mendukung stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.
- b. Pembangunan materi hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional dengan penyusunan awal materi hukum secara menyeluruh yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya penyusunan produk hukum baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu perlu disusun program legislasi nasional yang terpadu sesuai dengan prioritas, termasuk upaya penggantian peraturan perundang-undangan warisan kolonial dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Pembangunan materi hukum yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, serta penelitian dan pengembangan hukum, dilaksanakan melalui penataan pola pikir yang mendasari sistem hukum nasional, penyusunan kerangka sistem hukum nasional, serta penginventarisasian dan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku dengan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- d. Perencanaan hukum sebagai bagian penting dari proses pembangunan materi hukum harus diselenggarakan secara terpadu dan meliputi semua bidang pembangunan agar produk hukum yang dihasilkan dapat

memenuhi kebutuhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam segala aspeknya

- e. Pembentukan hukum diselenggarakan melalui proses secara terpadu dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menghasilkan produk hukum hingga tingkat peraturan pelaksanaannya.

Dalam pembentukan hukum perlu diindahkan ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk hukum kolonial harus diganti dengan produk hukum yang dijiwai dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penggantian produk hukum kolonial dan pembentukan hukum pada umumnya perlu didukung oleh penelitian dan pengembangan, serta ditunjang oleh sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang mantap.

- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta ilmu pengetahuan dilaksanakan secara terpadu yang meliputi semua aspek kehidupan dan terus ditingkatkan agar hukum nasional senantiasa dapat menunjang dan mengikuti dinamika pembangunan, sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat, serta kebutuhan masa kini dan masa depan. Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian di bidang hukum, perlu terus ditingkatkan kerja sama antara lembaga penelitian hukum, perguruan tinggi, badan penelitian internasional di bidang hukum dan lembaga lainnya yang terkait secara terkoordinasi.

2. Aparatur Hukum

- a. Pembangunan aparatur hukum diarahkan pada terciptanya aparatur yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional serta ditujukan kepada pemantapan kelembagaan aparatur hukum dan peningkatan kemampuan profesional aparatnya.
- b. Pembangunan aparatur hukum dilaksanakan melalui pembinaan profesi hukum serta pemanfaatan semua organisasi dan lembaga hukum agar aparatur hukum mampu melaksanakan tugas kewajibannya yang mencakup penyuluhan, penerapan dan penegakan serta pelayanan hukum secara profesional dalam rangka kemantapan fungsi dan peranan hukum sebagai sarana pengatur dan pengayom masyarakat. Kualitas dan kemampuan aparat hukum harus dikembangkan melalui peningkatan kualitas manusianya, baik tingkat kemampuan profesionalnya maupun kesejahteraannya, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang

memadai. Kualitas aparat hukum harus tercermin dalam sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab dalam perilaku keteladanan. Hakim sebagai salah satu aparat hukum perlu terus ditingkatkan kualitas, kemampuan profesional dan kedudukannya untuk mendukung kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab.

- c. Kemampuan penyuluhan hukum dan keteladanan aparat hukum terus ditingkatkan agar tercapai kemantapan kadar kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati secara serasi hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta terbentuk perilaku warga negara Indonesia yang taat hukum.
 - d. Penerapan hukum dan penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan lugas tetapi manusiawi berdasarkan asas keadilan dan kebenaran dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, meningkatkan tertib sosial dan disiplin nasional, mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.
 - e. Pelayanan dan bantuan hukum terus ditingkatkan agar masyarakat pencari keadilan memperoleh perlindungan hukum secara lancar dan cepat. Dalam rangka mewujudkan pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum perlu terus diusahakan agar proses peradilan lebih disederhanakan, cepat dan tepat dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
 - f. Fungsi dan peranan organisasi hukum, lembaga hukum, profesi hukum, serta badan peradilan perlu ditata kembali agar aparat hukum secara terpadu mampu mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - g. Upaya meningkatkan kualitas aparat hukum menuju aparat yang profesional perlu ditunjang oleh sistem pendidikan dan pelatihan, termasuk kurikulum dan manajemen pendidikan tinggi hukum, serta pembinaan profesi hukum yang didukung oleh kelengkapan perpustakaan khususnya di bidang hukum.
3. Saarana dan Prasarana Hukum
- a. Pembangunan sarana dan prasarana hukum diarahkan pada terwujudnya dukungan perangkat yang mampu menjamin kelancaran dan kelangsungan berperannya hukum sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta berfungsi sebagai

- payagom masyarakat dan ditujukan pada peningkatan daya dukungnya secara optimal terhadap pembangunan hukum nasional.
- b. Sarana dan prasarana hukum terus ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya agar dapat mendukung upaya pembangunan hukum secara optimal. Perhatian khusus perlu diberikan pada peningkatan sarana dan prasarana badan peradilan yang mendukung kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan yang berkualitas.
 - c. Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara nasional, sebagai unsur pendukung fungsi hukum, perlu dikembangkan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - d. Sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan hukum terus dikembangkan agar mampu menunjang upaya peningkatan kualitas penelitian ilmu hukum dan pengembangan hukum nasional dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

POLITIK, APARATUR NEGARA, PENERANGAN,
KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA

1. Politik Dalam Negeri
 - a. Pembangunan politik merupakan usaha penataan kehidupan politik yang diarahkan pada penumbuhan dan pengembangan tatanan politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan politik ditujukan kepada pengembangan etika dan moral budaya politik dalam mewujudkan kehidupan politik yang mantap dengan makin berperan dan berlingsinya suprastruktur dan infrastruktur politik secara efektif, otonomi daerah secara nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, serta kesadaran dan peran serta politik masyarakat yang terus meningkat, termasuk upaya pemantapan keyakinan rakyat terhadap Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - b. Kehidupan konstitusional yang meliputi kehidupan demokrasi dan tegaknya hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan dalam rangka terpeliharanya kemantapan stabilitas politik yang sehat dan dinamis, mantapnya mekanisme demokrasi Pancasila, serta mantapnya mekanisme dan siklus kepemimpinan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
 - c. Untuk mendukung tatanan politik demokrasi Pancasila, budaya politik yang menjunjung tinggi semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan

keterbukaan yang bertanggung jawab perlu terus dikembangkan, didukung oleh moral dan etik politik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila serta sikap kenegarawanan di dalam perilaku politik.

- d. Masyarakat dan kebudayaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) terus ditingkatkan dan diperluas melalui pendidikan, penataran, dan keteladanan serta upaya lainnya di semua lapisan masyarakat. Upaya ini perlu disertai dengan perbaikan metode dan perluasan materinya dalam rangka memantapkan pendidikan politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan sekaligus merupakan upaya untuk menggalakan kegiatan penelitian, penulisan, dan pengembangan pemikiran yang positif dan bersifat membangun dalam pengamalan pemikiran yang positif dan bersifat membangun dalam pengamalan Pancasila sebagai ideologi terbuka dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tetap mengacu pada nilai-nilai luhur dan jati dirinya, serta mendorong berkembangnya sikap, tingkah laku, perbuatan dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan itu, pemerintah bersama segenap kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya perlu terus meningkatkan program pendidikan politik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bagi semua lapisan masyarakat agar setiap anggota masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta meningkatkan motivasi dan peran sertanya dalam pembangunan nasional.
- e. Pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam demokrasi Pancasila diselenggarakan oleh Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, perlu terus ditingkatkan kualitas penyelenggaraannya dengan memberikan peran yang lebih efektif kepada organisasi peserta pemilihan umum, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pemilihan umum dari tingkat pusat sampai daerah. Pemilihan umum yang akan datang diselenggarakan pada tahun 1997.
- f. Kesempatan dan kemampuan masyarakat untuk mengutarakan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya melalui wadah penyalur aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu terus dikembangkan untuk memantapkan pertumbuhan demokrasi Pancasila terutama melalui upaya agar makin berperan dan berfungsinya organisasi kekuatan sosial politik dan lembaga perwakilan rakyat khususnya di daerah, termasuk organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya

- g. Dalam rangka pembangunan politik, kemampuan, kualitas, dan kemandirian organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya perlu terus ditingkatkan sehingga dapat menjalankan perannya secara mantap dalam tatanan kehidupan politik, termasuk dalam pemahaman dan pengamalan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta mampu melaksanakan pendidikan politik dalam rangka membentuk kader bangsa yang tangguh dan berkualitas.
- h. Pembangunan kehidupan politik juga diarahkan untuk menumbuhkembangkan peran, fungsi, kualitas, dan kemandirian organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kekhususannya atas dasar kesamaan bidang kegiatan, profesi, fungsi, serta agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa agar benar-benar berpegang pada Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta senantiasa mengarahkan kehidupan dan kegiatan organisasinya untuk kepentingan bangsa dan negara.
- i. Komunikasi antar dan antara supra dan infrastruktur politik perlu terus ditingkatkan untuk mengembangkan mekanisme demokrasi Pancasila dengan menciptakan iklim yang mendukung terwujudnya sikap keterbukaan yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai sikap keterbukaan yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sejalan dengan itu, hubungan dan tata kerja antarsuprastruktur, khususnya antar lembaga tinggi negara, terus ditingkatkan secara serasi dan terpadu sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi antar lembaga dapat berlangsung secara efektif sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
- j. Dalam upaya peningkatan peranan kekuatan sosial politik, keterkaitan pelaku kekuatan sosial politik dalam badan perwakilan dengan masyarakat yang diwajibkan terus ditingkatkan agar sistem perwakilan yang berdasarkan demokrasi Pancasila dapat berkembang secara mantap dan dinamis.
- k. Otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dikembangkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan diarahkan untuk makin memperkuat persatuan dan kesatuan, mendorong prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat, termasuk peranan lembaga Kemasyarakatan terutama di perdesaan, mempercepat upaya dan pemerataan pembangunan, memperlancar proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan, serta makin memantapkan sistem politik berdasarkan Pancasila.

2. Hubungan Luar Negeri

- a. Hubungan luar negeri merupakan kegiatan antar bangsa baik regional maupun global melalui berbagai forum bilateral dan multilateral yang diabdikan pada kepentingan nasional, dilandasi prinsip politik luar negeri bebas aktif dan diarahkan untuk turut mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta ditujukan untuk lebih meningkatkan kerja sama internasional, dengan lebih memantapkan dan meningkatkan peranan Gerakan Nonblok.
- b. Hubungan luar negeri dikembangkan untuk meningkatkan persahabatan dan kerja sama multilateral dan bilateral, baik regional maupun global, sesuai dengan kepentingan nasional. Citra Indonesia yang positif di luar negeri terus dikembangkan antara lain dengan memperkenalkan kebudayaan, hasil pembangunan dan daerah tujuan wisata, pertukaran pemuda, pelajar dan mahasiswa, serta kegiatan olahraga yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
- c. Peranan Indonesia dalam upaya menyelesaikan berbagai masalah dunia, khususnya yang mengancam perdamaian dunia dan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan, terus ditingkatkan melalui tahapan dan langkah yang konstruktif dan konsisten yang dilandasi oleh semangat Dasasila Bandung.
- d. Perkembangan, perubahan, dan gejolak dunia terus diikuti dengan saksama agar secara dini dapat diperkirakan terjadinya masalah yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional serta yang menghambat kelancaran pembangunan dan pencapaian tujuan nasional, agar dapat diambil langkah yang tepat dan cepat untuk mengatasinya. Perkembangan dunia yang mengandung peluang yang menunjang dan mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemampuan antisipasi dan penyesuaian terhadap perkembangan, perubahan, dan gejolak dunia perlu ditingkatkan melalui peningkatan kemampuan diplomasi disertai pendekatan yang tepat sesuai dengan kepentingan nasional.
- e. Peranan Indonesia di dunia internasional dalam membina dan mempererat persahabatan dan kerja sama yang saling menguntungkan antara bangsa-bangsa terus diperluas dan ditingkatkan. Perjuangan bangsa Indonesia di dunia internasional yang menyangkut kepentingan nasional, seperti upaya lebih memantapkan dasar pemikiran kenusantaraan, memperluas ekspor dan penanaman modal dari luar

- nergi serta kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu terus ditingkatkan.
- f. Perjuangan mewujudkan tatanan dunia baru, termasuk tata ekonomi dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan, terus ditingkatkan melalui upaya penggalangan dan pemupukan solidaritas dan kesatuan sikap serta kerja sama di antara negara berkembang dengan memanfaatkan berbagai forum internasional, seperti Persekutuan Bangsa-Bangsa, ASEAN, Gerakan Nonblok, Organisasi Konferensi Islam, dan lain-lain serta peningkatan peran Indonesia dalam upaya restrukturisasi, revitalisasi, dan demokratisasi Persekutuan Bangsa-Bangsa.
 - g. Langkah bersama antar negara berkembang untuk mempercepat terwujudnya perjanjian perdagangan internasional dan meniadakan hambatan serta pembatasan yang dilakukan oleh negara industri terhadap ekspor negara berkembang, dan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan kerja sama teknik antar negara berkembang, terus dilanjutkan dalam rangka mewujudkan tata ekonomi serta tata informasi dan komunikasi dunia baru.
 - h. Kerja sama antar negara anggota ASEAN, baik antar pemerintah maupun antar masyarakat, terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi terus ditingkatkan dalam rangka memperkuat ketahanan nasional masing-masing negara anggota, serta memperkuat ketahanan regional menuju terwujudnya kawasan Asia Tenggara yang damai, bebas, netral, sejahtera, dan bebas senjata nuklir. Hubungan dan kerja sama antar negara di kawasan Asia dan Pasifik perlu terus ditingkatkan.
3. Aparatur Negara
- a. Aparatur negara adalah keseluruhan lembaga dan pejabat negara serta pemerintahan negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara dan pembangunan serta senantiasa mengabdikan dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Pembangunan aparatur negara diarahkan pada makin terwujudnya dukungan administrasi negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan untuk mewujudkan sistem administrasi negara yang makin andal, profesional, efisien, efektif, serta tanggap terhadap aspirasi

rakyat dan terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis. Kebijaksanaan dan langkah pendayagunaan administrasi negara perlu terus dilanjutkan, ditingkatkan, dan ditujukan kepada penataan organisasi, penyempurnaan ketatalaksanaan, pemantapan sistem informasi, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraannya.

- c. Dalam rangka pembangunan aparatur kenegaraan, pelaksanaan fungsi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara perlu terus ditingkatkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengembangkan kerja sama yang serasi dan terbuka berdasar atas asas kekeluargaan serta didukung oleh sumber daya yang memadai.
- d. Pembangunan aparatur pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas seluruh tatanan administrasi pemerintahan, termasuk peningkatan kemampuan dan disiplin, pengabdian, keteladanan, dan kesejahteraan aparatnya, sehingga secara keseluruhan makin mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam melayani, mengayomi, serta menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, serta tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat. Pembinaan, penyempurnaan, dan pendayagunaan aparatur pemerintah baik kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaiannya perlu dilanjutkan dan ditingkatkan.
- e. Sistem pengawasan keuangan negara dan pembangunan, baik pengawasan intelektual maupun pengawasan fungsional termasuk pengawasan oleh masyarakat dimantapkan secara terpadu dan konsisten agar tercapai efisiensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Perangkat pengawasan dan upaya tindak lanjutnya ditingkatkan secara terpadu bersamaan dengan pengembangan tanggung jawab masyarakat disertai peningkatan disiplin nasional. Penerbitan aparatur pemerintah dilanjutkan dan makin ditingkatkan terutama dalam penyalahgunaan wewenang dan bentuk penyelewengan lainnya, yang citra dan kewibawaan aparatur pemerintah, serta korupsi, kolusi, nepotisme, kebocoran, serta pemborosan kekayaan dan keuangan negara.
- f. Pembinaan kepegawaian diarahkan pada makin terwujudnya kepegawaian negara yang mantap dengan pengembangan karier berdasarkan prestasi kerja, kemampuan profesional, keahlian dan keterampilan, serta kemantapan sikap mental aparat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terus ditingkatkan secara berencana melalui upaya pendidikan dan pelatihan, penugasan,

bimbingan dan konsultasi, serta melalui pengembangan motivasi, kode etik, dan disiplin kedinasan yang sehat didukung sistem informasi kepegawaian yang mantap serta dilengkapi sistem pemberian penghargaan yang wajar.

- g. Hubungan kerja yang serasi antara aparat pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya makin mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab terus dikembangkan secara realistis atas dasar asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan dalam rangka mendorong kemajuan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan secara merata di seluruh pelosok tanah air, serta meningkatkan perwujudan Wawasan Nusantara.
- h. Pembangunan aparat pemerintah daerah yang meliputi lembaga, tata kerja, dan aparat pemerintah daerah diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang makin efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta meningkatnya keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan seluruh aparat pemerintah daerah. Pendayagunaan aparat pemerintah daerah ditujukan pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, peningkatan kualitas sistem administrasi, penyempurnaan ketatalaksanaan, serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan aparatnya.
- i. Koordinasi, kerja sama, dan kemampuan aparat pemerintah yang bertugas di daerah makin dimantapkan untuk lebih meningkatkan keserasian, kelancaran, efisien, dan efektivitas serta keterpaduan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah.
- j. Pelaksanaan fungsi dan peranan aparat pemerintahan desa dan kelurahan terus lebih ditingkatkan dan dikembangkan sehingga makin mampu, efisien, dan efektif dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan desa serta kelurahan dalam melayani, mengayomi, menggerakkan, dan menghargai prakarsa dan peran aktif rakyat dalam pembangunan, bersama dengan upaya menciptakan kondisi yang lebih mendorong peningkatan kehidupan dan tanggung jawab masyarakat serta kemampuan kelembagaannya.
- k. Sistem perencanaan penyusunan program dan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dikembangkan secara terpadu dan efisien, sejalan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan negara. Kemampuan aparat pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk

merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pembangunan perlu makin ditingkatkan.

4. Penerangan, Komunikasi dan Media Massa
 - a. Pembangunan penerangan, komunikasi, dan media massa diarahkan untuk makin meningkatkan penghayatan dan pengamanan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam semua segi kehidupan bangsa sehingga makin meningkatkan kesadaran rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat Ketahanan Nasional, dan memelihara stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, sejalan dengan dinamika pembangunan dan kemajuan teknologi.
 - b. Pembangunan penerangan, komunikasi, dan media massa harus mampu menciptakan iklim yang dapat mendorong terjadinya interaksi timbal balik secara terbuka dan bertanggung jawab antar dan antara sesama warga masyarakat dengan pemerintah dalam memperoleh informasi tentang pembangunan dan hasil-hasilnya sehingga makin meningkatkan kualitas, peranan, peran serta, dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan dalam rangka menumbuhkembangkan sikap kemandirian dan ketangguhan bangsa.
 - c. Pembangunan penerangan, komunikasi, dan media massa terus ditingkatkan kualitas dan jangkauannya agar mendukung upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkuat kepribadian bangsa, serta menggajahkan peran serta masyarakat dalam rangka memantapkan kehidupan demokrasi Pancasila sehingga masyarakat siap untuk makin mampu menyerap nilai yang positif dan menangkal pengaruh negatif arus informasi dari luar. Untuk itu, media massa harus makin meningkatkan pengabdian, tanggung jawab profesional, kemampuan, dan kualitas sumber daya manusianya, serta makin mampu meningkatkan pendayagunaan sarana dan prasarana komunikasi dengan lebih efisien dan efektif.
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana penerangan, komunikasi, dan media massa perlu makin ditingkatkan dengan memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi sehingga dapat makin diwujudkan tersedianya wahana komunikasi dan informasi yang andal serta tersebar makin merata di seluruh pelosok tanah air sesuai dengan tuntutan pembangunan. Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana penerangan, komunikasi, dan media massa perlu terus

didorong dan dimantapkan berdasarkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan.

- e. Dalam rangka meningkatkan peranan pers yang bebas dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila perlu terus diupayakan makin berkembangnya interaksi positif antara pers, pemerintah, dan masyarakat. Dengan demikian akan dapat makin diwujudkan peran serta aktif dunia pers dalam mendukung pembangunan dengan menyebarkan informasi yang obyektif dan edukatif, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat serta memperluas komunikasi dan peran serta masyarakat.
- f. Upaya penyebarluasan peran media massa, baik cetak maupun elektronik seperti radio, televisi, film, video, surat kabar, majalah dan kantor berita perlu terus ditingkatkan baik dalam jumlah, kualitas, maupun jangkauannya termasuk media tradisional sehingga makin dapat dicapai tujuan penyebaran informasi yang lebih efektif sesuai dengan kebhinekaan masyarakat Indonesia di perkotaan dan di pedesaan guna mendukung makin tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa yang makin kukuh. Sejalan dengan itu perlu terus dikembangkan dan dilindungi kehidupan pers daerah sehingga mampu berperan secara mandiri dan bertanggungjawab.
- g. Peningkatan peranan pers dan media massa dalam pembangunan perlu terus didukung oleh peningkatan jumlah dan kualitas tenaga terdidik dan profesional, yang mampu mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi komunikasi, sebagai insan pers dan media massa yang memiliki idealisme, integritas, dan wawasan kebangsaan serta pengetahuan, keahlian, dan keterampilan dalam pengabdian terhadap profesinya. Lembaga pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang pers dan media massa perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan.
- h. Pembinaan dan pengembangan film nasional sebagai karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar perlu terus ditingkatkan peran dan fungsinya sehingga mampu menciptakan iklim yang mendukung peningkatan produksi serta perlindungan peredaran film nasional.
- i. Peranan penerangan, komunikasi, dan media massa di dalam pergaulan internasional perlu terus ditingkatkan dalam rangka mengembangkan citra dan pengertian dunia terhadap harkat dan martabat bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila.

PERTAHANAN KEAMANAN

1. Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Penyelenggaraan pertahanan keamanan negara yang mencakup keseluruhan daya mampu bangsa dan negara disusun, disiapkan, dan dikerahkan secara terpadu dan terkendali, serta didasarkan pada keyakinan akan kekuatan sendiri dan tidak kenal menyerah dan yang dijiwai keyakinan akan kebenaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya tersebut dilaksanakan dengan menanamkan sedini mungkin Pendidikan Pendahuluan Bela Negara serta pembinaan pendidikan dan pelatihan keprajuritan. Komponen kekuatan pertahanan keamanan negara perlu lebih ditata secara bertahap dan selektif terutama komponen dasar dan komponen khusus.
 - b. Pembangunan rakyat terlatih ditujukan pada pengembangan daya tangkal bangsa dan negara, dan pada penataan dan pengaturan serta perwujudannya agar fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat dapat lebih terjamin pelaksanaannya dalam rangka lebih menanamkan semangat perlawanan rakyat semesta sebagai pendukung dan pengganda kekuatan ABRI. Pengaturan dan perwujudan rakyat terlatih akan meningkatkan disiplin nasional dalam meningkatkan kesadaran bela negara.
 - c. Pembangunan perlindungan masyarakat ditujukan pada terwujudnya kemampuan masyarakat dan ketahanan serta kemampuan lingkungan untuk secara swadaya aktif menanggulangi dan/atau memperkecil akibat malapetaka yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya.
2. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
 - a. Pembangunan ABRI ditujukan pada peningkatan kemampuan kekuatan pertahanan dan kemantapan keamanan dalam rangka perwujudan daya tangkal pertahanan keamanan negara secara terpadu yang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan bangsa dan negara. Daya tangkal pertahanan keamanan negara diwujudkan dalam bentuk pemantapan ketahanan wilayah nasional serta kemantapan seluruh kemampuan komponen kekuatan pertahanan keamanan negara dengan dilandasi kesadaran, kerelaan dan tekad rakyat untuk bela negara serta kemandirian ABRI-rakyat.
 - b. Pembangunan ABRI ditujukan untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kekuatannya dalam menjamin tetap tegaknya kedaulatan di darat,

laut, udara, dan dirgantara serta menjamin tegaknya hukum, keamanan, dan ketertiban masyarakat melalui keterpaduan upaya dalam rangka memelihara stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. TNI-AD dibangun untuk menjadi inti kekuatan pertahanan keamanan wilayah dengan pola pertahanan wilayah negara yang strategis atas dasar perlawanan rakyat semesta; TNI-AL dibangun untuk menjadi inti kekuatan pertahanan keamanan laut untuk menjamin penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional; TNI-AU dibangun untuk menjadi inti kekuatan pertahanan keamanan negara di seluruh wilayah kedaulatan udara untuk menjamin yurisdiksi nasional; serta Polri dibangun untuk menjadi inti kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegak hukum untuk menjamin terwujudnya tertib hukum dan ketenteraman masyarakat.

- c. ABRI sebagai inti kekuatan pertahanan keamanan negara, pembangunannya diarahkan kepada ABRI dengan kekuatan yang profesional, Efektif, efisien, dan modern dengan kualitas dan mobilitas tinggi serta mampu dalam waktu relatif singkat diproyeksikan ke segala penjuru tanah air dan dalam keadaan darurat dapat cepat dikembangkan kemampuan dan kekuatannya.
- d. ABRI melaksanakan fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Dalam melaksanakan fungsi sosial politik, ABRI harus mampu berperan sebagai stabilisator, dinamisator, dan unsur pemersatu kehidupan nasional, berperan serta secara aktif dalam pembangunan, serta memperkuat kehidupan konstitusional, demokrasi, dan tegaknya hukum dalam rangka memperkuat ketahanan nasional. Peran ABRI sebagai komponen utama kekuatan pertahanan keamanan negara dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta perlu lebih dikembangkan dengan menerapkan pembinaan teritorial yang diselenggarakan secara terpadu dengan instansi pemerintah dan masyarakat.
- e. ABRI sebagai komponen utama kekuatan pertahanan keamanan negara perlu mengembangkan kerja sama keamanan secara bilateral dengan angkatan bersenjata negara tetangga atas dasar saling menghormati kedaulatan wilayah negara masing-masing, di samping terus meningkatkan kerja sama dalam upaya meningkatkan keprofesionalannya.
- f. Sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintikan Polri terus dikembangkan dengan mengutamakan upaya pencegahan dan penangkalan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang keamanan dan ketertiban masyarakat terus dibina

dan ditingkatkan secara terpadu untuk menumbuhkembangkan sikap mental dan meningkatkan kepekaan serta daya tangkap masyarakat terhadap masalah keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing dalam suatu sistem keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa.

- g. Modernisasi ABRI dilanjutkan untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan personel, perangkat lunak, dan perangkat keras, yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sejauh mungkin memanfaatkan kemampuan dan potensi yang terdapat serta dihasilkan di dalam negeri.
 - h. Pembangunan kekuatan cadangan TNI terus dilanjutkan dan ditujukan kepada terbinanya seluruh potensi dan kekuatan yang ada dalam masyarakat, baik tenaga manusia, peralatan, fasilitas maupun jasa, agar pada saat diperlukan dapat dikerahkan untuk memperbesar kekuatan dan meningkatkan kemampuan ABRI dalam rangka kepentingan pertahanan keamanan negara.
 - i. Penyelenggaraan bakti ABRI dalam wujud antara lain ABRI Masuk Desa, yang merupakan pengabdian ABRI dalam menyumbangkan kemampuannya, terus ditingkatkan untuk ikut menunjang pembangunan nasional dan mendorong pembangunan daerah dalam rangka memelihara kemanunggalan ABRI-rakyat.
3. Pendukung
- a. Pembangunan komponen pendukung ditujukan untuk menjamin kelancaran dan kelangsungan serta keterpaduan upaya pertahanan keamanan negara serta pada penciptaan kondisi siap setiap saat diperlukan untuk dapat di dayagunakan secara optimal terutama dalam menanggulangi berbagai tingkat keadaan darurat. Pembangunan dan pendayagunaan komponen pendukung pertahanan keamanan negara perlu ditata dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Setiap investasi dalam pembangunan komponen pendukung pertahanan keamanan negara harus mewujudkan kemanfaatan yang nyata sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mempunyai waktu kegunaan yang cukup panjang, serta sedapat mungkin disertai adanya kegunaan tambahan. Perlu dipersiapkan kemampuan komponen pendukung pertahanan keamanan negara untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pertahanan keamanan negara dalam berbagai tingkat keadaan darurat.
 - c. Industri pertahanan keamanan dan industri strategis lainnya sebagai salah satu unsur komponen pendukung pertahanan keamanan negara

perlu terus dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu penerahan dan teknologi untuk menunjang kebutuhan alat utama ABRI berdasarkan tuntutan lingkungan tugas serta prinsip prioritas ekonomi.

- d. Wilayah negara sebagai salah satu unsur komponen pendukung pertahanan keamanan negara perlu dipersiapkan melalui penyiapan rencana tata ruang pada semua tingkatan agar dapat berperan sebagai wahana penyelenggaraan pertahanan keamanan negara dan agar tercipta keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara dan memperkuat Ketahanan Nasional. Perlu dilakukan inventarisasi potensi cadangan sumber daya strategis dan penentuan garis batas wilayah nasional dalam rangka penyusunan rencana strategis pertahanan keamanan negara.

BAB V
PELAKSANAAN

A. ELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Garis-Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dijalankan oleh Presiden sebagai Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Garis-garis Besar Haluan Negara pada dasarnya merupakan haluan negara tentang pembangunan nasional yang ditetapkan setiap lima tahun berdasarkan perkembangan dan tingkat kemajuan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia, dan pelaksanaannya dituangkan dalam pokok-pokok kebijaksanaan pelaksanaan pembangunan nasional yang ditentukan oleh Presiden sebagai Mandataris dengan mendengarkan dan memperhatikan secara sungguh-sungguh pendapat dari lembaga-lembaga tinggi negara terutama Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden sebagai Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat memberikan pertanggungjawaban kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atas tugas menjalankan garis-garis besar haluan negara tentang pembangunan nasional pada akhir masa jabatannya.

Pembangunan nasional diselenggarakan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hubungan ini pemerintah berkewajiban untuk memberi pengarahan dan bimbingan, serta menciptakan iklim yang mendorong peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan.

B. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

LIMA TAHUN KEENAM

Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Keenam disusun berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara dan ditetapkan oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan Negara dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam Pembangunan Lima Tahun Keenam yang meliputi kurun waktu 1994-1999 pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut saling mengait dan perlu dikembangkan secara selaras, terpadu, dan saling memperkuat.

Program pelaksanaan kebijaksanaan serta usaha pembangunan untuk setiap tahun dituangkan dalam rencana operasional dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan nasional, peranan lembaga yang melaksanakan fungsi pemeriksaan, pengawasan, dan pengendalian perlu makin dikembangkan. Dalam hubungan ini, terutama Badan Pemeriksa Keuangan, wajib meningkatkan kegiatannya sesuai dengan wewenang dan fungsinya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

BAB VI

P E N U T U P

Pembangunan Lima Tahun Keenam merupakan awal dari Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua, yang akan mengantarkan bangsa Indonesia memasuki proses tinggal landas dalam rangka menumbuhkan kemandirian bangsa.

Berhasilnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila tergantung pada peran aktif masyarakat serta pada sikap mental, tekad dan semangat serta ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan itu, semua kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya perlu menyusun program menurut fungsi dan kemampuan masing-masing dalam rangka melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara ini.

Dalam rangka meningkatkan tanggung jawab bersama dan demi makin kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa, perlu dikembangkan peran serta masyarakat di dalam menyiapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang akan datang.

Hasil pembangunan harus dapat dinikmati secara lebih merata dan adil oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Kesejahteraan yang merata dan berkeadilan akan meningkatkan ketahanan nasional yang selanjutnya akan meratakan jalan bagi generasi yang akan datang untuk mencapai masyarakat maju, sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pada akhirnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila akan memperkuat jati diri dan kepribadian manusia, masyarakat, dan bangsa Indonesia yang tercermin dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang.